

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKOMODASI PESERTA DIDIK
BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSI DI KOTA MALANG
(Studi Multisitus SD Anak Saleh dan SD Islamic Global School Kota Malang)**

TESIS

OLEH

NADHIRA RIFQI
NIM. 220106210038



PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKOMODASI PESERTA DIDIK
BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSI DI KOTA
MALANG**

**(Studi Multisitus SD Anak Saleh dan SD Islamic Global School Kota
Malang)**

Oleh
NADHIRA RIFOI
NIM. 220106210038

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang tesis:

Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd.

NIP. 197203062008012010

Dosen Pembimbing II



Dr. Muh. Hambali, M.Ag.

NIP. 197304042014111003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd.

NIP. 198010012008011016

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusi Di Kota Malang (Studi Multisitus SD Anak Saleh dan SD Islamic Global School Kota Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Desember 2024.

Batu, 20 Januari 2025

Dewan Penguji,



(Drs. H. Basri, M.A., Ph.D.)
NIP. 196812311994030122

Penguji Utama



(Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag.)
NIP. 197503102000031002

Ketua/Penguji



(Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd.)
NIP. 197203062008012010

Penguji



(Dr. Muh. Hambali, M.Ag.)
NIP. 197304042014111003

Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nadhira Rifqi

NIM : 220106210038

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam


Judul :“Implementasi Kebijakan Akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusi Di Kota Malang (Studi Multisitus SD Anak Saleh Dan SD Islamic Global School Kota Malang)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain. Adapun pendapat atau temuan orang lain dalam tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah dan dicantumkan dalam daftar rujukan. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 10 Desember 2024

Hormat Saya,



Nadhira Rifqi

NIM. 220106210038

LEMBAR MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”¹

(At Tin ayat 4)

¹ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis lantunkan puji syukur atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Serta sholawat semoga tetap tercurah deras kepada Rasulullah SAW. yang telah menjadi manusia penyempurna akhlak, pemilik akhlak mulia sejagad raya.

Dengan rasa lega, bangga, dan bahagia, penulis mempersembahkan tesis ini, yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusi Di Kota Malang (Studi Multisitus SD Anak Saleh Dan SD Islamic Global School Kota Malang)”, kepada semua yang telah membantu, memotivasi, dan kebersamai penulis dalam menjalani fase kehidupan penulis hingga terselesaikannya karya tulis ini.

Oleh karena itu, dengan penuh penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

- (1) Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang tidak pernah lupa dan tidur, sehingga membuat penulis kuat dan tidak merasa sendirian melalui nafas yang diberikan-Nya.
- (2) Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai sosok role model yang pantas ditiru seluruh umatnya.
- (3) Keluarga penghuni rumah kecil di Jl. Teluk Cendrawasih no. 45 D, Abi Rifqi, Mama Nurul Widayani, Bang Nakhel Rifqi Adam, Bang Nabil Mahira Rifqi, dan Adik Naflah Rifqi, serta 6 kucing lucu yang sekarang ada di rumah.
- (4) Pasangan hidup penulis yang sabar menghadapi dengan senantiasa saling mendengar dan berbicara dalam berbagai keadaan, Muhammad Yusuf Yasir Al Rasyid.
- (5) Teman-teman yang menjalani proses pendewasaan ini dengan bermacam-macam cobaan hidupnya, Annisa Shofi Alfina, dan Oktavia Putri Jayanti, serta bertambah satu Lailatul Zahro (Eli).
- (6) Semua orang yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu penulis selama ini dalam berbagai macam bantuan.
- (7) Tak lupa, skripsi ini penulis persembahkan untuk seluruh anak berkebutuhan khusus, atau yang memiliki keistimewaan dan keunikan luar

biasa di mana pun mereka berada, dan apapun cita-cita mereka, semoga mereka bisa terus menempuh pendidikan yang layak dan tidak patah semangat dalam meraih impiannya.

- (8) Dan yang terakhir, skripsi ini penulis dedikasikan untuk Nadhira Rifqi, sosok diri sendiri yang sudah hebat dan kuat, yang selama 24 tahun ini tidak hanya menempuh pendidikan sampai S2, tapi juga belajar dari berbagai pengalaman pahit, dan manis, dari sebagian kecil dari dunia ini yang begitu besarnya. Diharapkan ke depannya dapat menjelajah dan mempelajari bagian-bagian lain dari semesta ini sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik untuk menghadap dan bertemu *Rabb*-nya.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis lantunkan puji syukur atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang selama ini telah membimbing penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusi Di Kota Malang (Studi Multisitius SD Anak Saleh Dan SD Islamic Global School Kota Malang)”.

Skripsi ini telah penulis susun dengan maksimal dan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, layakanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya.
- 2) Prof. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku Direktur Pascasarjana, dan Drs. H. Basri, MA., Ph. D. Wakil Direktur Pascasarjana.
- 3) Dr. M. Fahim Tharaba, M. Pd., selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam.
- 4) Ibu Prof. Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd., dan Bapak Dr. Muh. Hambali, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaannya.
- 5) Seluruh dosen Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepadapenulis.
- 6) Almamater tercinta dan penulis banggakan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan dan menuntut ilmu di dalamnya, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang mengenal karakteristik rasional dan emosionalnya.
- 7) Orang tua penulis, yaitu Abi Rifqi dan Mama Nurul Widayani selaku pembimbing dari berbagai macam aspek, pencerah ilmu,

pengalaman, petuah, dan kasih sayang, serta yang memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi ini tanpa membebani penulis dengan pertanyaan- pertanyaan yang menggebu.

- 8) Kepala SD Anak Saleh dan Kepala SD Islamic Global School Kota Malang, dan segenap pengurusnya yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan observasi dan penelitian ini serta memberikan pengalaman berharga dalam mengenal lebih jauh siswa-siswi luar biasa.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari segi kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun sehingga penulis mampu untuk menjadi lebih baik lagi pada karya kepenulisan berikutnya.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. Semoga tesis ini dapat menjadi tesis yang bermanfaat untuk khalayak orang.

Malang, 10 Desember 2024

Hormat Saya, "



Nadhira Rifqi

NIM. 220106210038

ix

ABSTRAK

Rifqi, Nadhira. 2024. *Implementasi Kebijakan Akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusi Di Kota Malang (Studi Multisitus SD Anak Saleh Dan SD Islamic Global School Kota Malang)*, Tesis, Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Prof. Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd., Pembimbing II: Dr. Muh.Hambali, M.Ag.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Akomodasi, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Kebijakan akomodasi PDBK adalah salah satu kebijakan baru yang dikeluarkan melalui Permendikbud no. 48 Tahun 2023, tentang Akomodasi Yang Layak (AYL) bagi peserta didik penyandang disabilitas. Regulasi ini mengatur tentang akomodasi minimal yang wajib disediakan oleh sekolah sampai pemerintah untuk mendukung pembelajaran bagi PDBK. Teori implementasi kebijakan Charles O. Jones menyebutkan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Di sisi lain, George Edward III menyebutkan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik perlu memperhatikan 4 faktor, di mana 4 faktor itu apabila terlaksana dengan baik, maka proses implementasi akan berjalan dengan baik, dan hasil akhir hasil implementasi kebijakan tersebut adalah tercapainya tujuan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi proses implementasi kebijakan (2) mengidentifikasi evaluasi implementasi kebijakan, dan (3) mengidentifikasi hasil implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari *output* dan *outcome* pembelajaran.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan studi multisitus di 2 sekolah inklusi, yakni SD Anak Saleh dan SD Islamic Global School Kota Malang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga subjek penelitian ini mencakup Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Proses analisis data dilakukan melalui 4 tahap yakni, *data collection*, *data display*, *data condensation*, dan *conclusion*. Adapun untuk menjamin keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa (1) proses implementasi kebijakan melalui tahap interpretasi dengan faktor komunikasi, organisasi dengan faktor sumber daya, struktur organisasi, dan aplikasi dengan disposisi; (2) Evaluasi implementasi kebijakan akomodasi PDBK meliputi *miss communication* akibat rendahnya kesadaran pelaksana, inkonsistensi akomodasi GPK, dan disposisi dan struktur birokrasi yang kurang merata; (3) *Output* yang berhasil muncul adalah perkembangan softskill-nya, dan *Outcome* yang berhasil muncul adalah PDBK mencapai kemandirian fungsional dan mencapai potensi maksimum sehingga mampu mengatasi disabilitasnya.

ABSTRACT

Rifqi, Nadhira. 2024. *Implementation of Accommodation Policy for Students with Special Needs in Inclusive Schools in Malang (Multisite Study of SD Anak Saleh and SD Islamic Global School Malang)*, Thesis, Master of Islamic Education Management, Postgraduate Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Prof. Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd., Supervisor II: Dr. Muh.Hambali, M.Ag.

Keywords: Implementation, Accommodation Policy, Students with Special Needs

The students with special needs accommodation policy is one of the new policies issued through Permendikbud no. 48 of 2023, concerning Appropriate Accommodation for students with disabilities. This regulation regulates the minimum accommodation that must be provided by schools to the government to support learning for students with special needs. Charles O. Jones' policy implementation theory states that policy implementation consists of interpretation, organization, and application. On the other hand, George Edward III stated that to implement public policy, it is necessary to pay attention to 4 factors, where if the 4 factors are implemented properly, the implementation process will run well, and the final result of the implementation of the policy is the achievement of policy objectives.

This study aims to: (1) identify the policy implementation process (2) identify the evaluation of policy implementation, and (3) identify the results of the implementation of the students with special needs accommodation policy in inclusive schools in Malang in terms of learning output and outcomes.

The study was conducted using a qualitative method, with a multi-site study in 2 inclusive schools, namely SD Anak Saleh and SD Islamic Global School Malang. The sampling technique used purposive sampling technique, so that the subjects of this study included the Principal, vice principal for curriculum, vice principal for student affairs, and Special Assistant Teachers. The data analysis process was carried out through 4 stages, namely, data collection, data display, data condensation, and conclusion. As for ensuring the validity of the data, source triangulation and technique triangulation were carried out. The results of the research and data processing showed that (1) the process of implementing policies through the interpretation stage with communication factors, organizations stage with resource factors and organizational structure, also applications stage with disposition; (2) Evaluation of the implementation of the students with special needs accommodation policy includes miss communication due to low awareness of implementers, inconsistent Special Assistant Teachers accommodation, and uneven disposition and bureaucratic structure; (3) The output that successfully emerged was the development of soft skills, and the outcome that successfully emerged was that students with special needs achieved functional independence and achieved maximum potential so that they were able to overcome their disabilities.

خلاصة

رفقي، نذيرة. 2024. تنفيذ سياسة الإقامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الشاملة في مالانج (دراسة متعددة المواقع لمدرسة عناق صالح الابتدائية ومدرسة إسلاميك جلوبال الابتدائية مالانج)، أطروحة، ماجستير إدارة التعليم الإسلامي، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم: المشرف الأول: الأستاذ الدكتور عيسى نور وحيوبي، ماجستير في الإدارة العامة، المشرف الثاني: الدكتور محمد حنبلي، ماجستير في الزراعة.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، سياسة التكيف، الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

سياسة استيعاب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة هي إحدى السياسات الجديدة الصادرة من خلال المرسوم رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الاستيعاب المناسب للطلاب ذوي الإعاقة. تنظم هذه اللائحة الحد الأدنى من الاستيعاب الذي يجب أن توفره المدارس للحكومة لدعم التعلم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. تنص نظرية تنفيذ السياسة لتشارلز أو. جونز على أن تنفيذ السياسة يتكون من التفسير والتنظيم والتطبيق. من ناحية أخرى، ذكر جورج إدوارد الثالث أنه لتنفيذ السياسة العامة، من الضروري الانتباه إلى ٤ عوامل، حيث إذا تم تنفيذ العوامل الأربعة بشكل صحيح، فإن عملية التنفيذ ستسير بشكل جيد، والنتيجة النهائية لتنفيذ السياسة هي تحقيق أهداف السياسة.

تهدف هذه الدراسة إلى: (١) تحديد عملية تنفيذ السياسة (٢) تحديد تقييم تنفيذ السياسة و (٣) تحديد نتائج تنفيذ سياسة استيعاب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الشاملة في مالانج من حيث مخرجات التعلم والنتائج.

أجريت الدراسة باستخدام طريقة نوعية، مع دراسة متعددة المواقع في مدرستين شاملتين، وهما مدرسة عناق صالح الابتدائية ومدرسة إسلاميك جلوبال مالانج. استخدمت تقنية أخذ العينات أسلوب أخذ العينات العمدية، بحيث شملت موضوعات هذه الدراسة المدير ونائب المدير للمناهج ونائب المدير لشؤون الطلاب والمعلمين المساعدين الخاصين. تمت عملية تحليل البيانات من خلال ٤ مراحل، وهي جمع البيانات وعرض البيانات وتكثيف البيانات والاستنتاج. أما بالنسبة للتأكد من صحة البيانات فقد تم إجراء مثلثات المصدر وتثليث التقنية. أظهرت نتائج البحث ومعالجة البيانات أن (١) عملية تنفيذ السياسات من خلال مرحلة التفسير مع عوامل الاتصال، ومرحلة المنظمات مع عوامل الموارد والهيكلة التنظيمي، وأيضاً مرحلة التطبيقات مع التصرف؛ (٢) يتضمن تقييم تنفيذ سياسة استيعاب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة سوء التواصل بسبب قلة الوعي لدى المنفذين، والتكيف غير المتسق مع المعلمين المساعدين الخاصين، والتصرف غير المتكافئ والهيكلة البيروقراطي؛ (٣) كان الناتج الذي ظهر بنجاح هو تطوير المهارات الناعمة، وكانت النتيجة التي ظهرت بنجاح هي أن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة حققوا الاستقلال الوظيفي وحققوا أقصى إمكاناتهم بحيث تمكنوا من التغلب على إعاقاتهم.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
LEMBAR MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
خلاصة.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Orisinalitas Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II	15
KAJIAN TEORI	15
A. Kebijakan Akomodasi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	15
B. Implementasi Kebijakan Publik	21
C. Peningkatan Mutu Pembelajaran.....	26
D. Pendidikan Inklusif	28
E. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.....	33
F. Kerangka Berpikir	38
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39

B.	Kehadiran Peneliti.....	40
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D.	Subjek Penelitian.....	41
E.	Data dan Sumber Data	42
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
G.	Instrumen Penelitian.....	45
H.	Teknik Analisis Data.....	48
I.	Pengecekan Keabsahan Data.....	49
J.	Prosedur Penelitian.....	51
BAB IV		53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B.	Paparan Data Sekolah Dasar Anak Saleh Kota Malang.....	58
C.	Paparan Data Sekolah Dasar Islamic Global School Kota Malang	105
D.	Temuan Penelitian.....	144
BAB V.....		156
PEMBAHASAN		156
A.	Proses Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Inklusi di Kota Malang	156
B.	Evaluasi Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK Pada Sekolah Inklusi di Kota Malang.....	169
C.	Hasil Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Inklusi di Kota Malang	178
BAB VI.....		183
PENUTUP.....		183
A.	Kesimpulan	183
B.	Saran dan Rekomendasi	184
DAFTAR PUSTAKA		186
LAMPIRAN.....		190
BIOGRAFI PENULIS		193

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi; menunjukkan adanya ketegasan dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Akomodasi layak yang dimaksudkan adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia. Serta kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.¹ Peraturan ini dikeluarkan sebagai landasan bagi seluruh jenjang satuan pendidikan di Indonesia untuk menyediakan akomodasi yang layak dan membuka kesempatan pendidikan yang luas bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus.

Selain itu, muncullah konsep pendidikan inklusi yang merupakan konsep pendidikan yang berusaha untuk memberi kesempatan yang sama bagi siswa disabilitas untuk menempuh pendidikan di sekolah yang sama dengan siswa reguler lainnya. Hal ini disebabkan siswa disabilitas sering

¹ Albertus Adit, "Kemendikbud Terbitkan Peraturan Baru, Dorong Inklusivitas di Sekolah", diakses dari: <https://www.kompas.com/edu/read/2023/08/22/120239371/kemendikbud-terbitkan-peraturan-baru-dorong-inklusivitas-di-sekolah>.

kali mengalami diskriminasi secara sosial, emosional, kultural, dan bahasa, baik di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan pendidikannya.²

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi mengalami beberapa tantangan dan hambatan. Di antaranya adalah kualitas guru pengampu yang belum memadai, sarana-prasarana yang kurang layak, dan pihak sekolah yang belum menjalin komunikasi yang intensif dengan orang tua siswa disabilitas.³ Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan inklusi secara signifikan, dikarenakan guru minimnya keterampilan guru dalam menangani siswa disabilitas dan sikap guru terhadap siswa disabilitas yang dilihat masih memandang sebelah mata. Ditambah dari sisi sarana-prasarana yang belum mendukung tentu mempengaruhi efektivitas dan efisiensi siswa disabilitas dalam menangkap materi pembelajaran. Begitu pula komunikasi sekolah dengan orang tua, berpengaruh dalam proses monitoring perkembangan siswa disabilitas di rumah.

Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Sering kali pendidikan inklusi dilaksanakan dalam konteks formalitas saja, sebatas satuan pendidikan menerima pendaftaran siswa disabilitas, namun dalam pelaksanaannya kurang ditinjau bagaimana cara untuk

² Ishartiwi, "Fungsi Unit Layanan Disabilitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif," *Jurnal Pendidikan Khusus* 19, no. 1 (2023), 1.

³ Rizka Norsy Ramadhana, "Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus," *Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat*, 2020, 5-6.

menyejahterakan layanan pendidikan bagi siswa disabilitas tersebut. Adapun menurut hasil penelitian terdahulu, disebutkan bahwa guru belum mampu memodifikasi kurikulum sesuai kemampuan siswa, kurang pengetahuan tentang siswa disabilitas. Guru juga belum memahami kurikulum yang tepat untuk siswa disabilitas, sehingga terkait dengan isi materi pelajaran dan tujuan pembelajaran guru belum mampu menyesuaikannya dengan kondisi siswa disabilitas.⁴ Secara kuantitatif, berdasarkan penelitian berskala lebih besar yang menggunakan metode *systematic review*, menyatakan bahwa tingkat kompetensi pedagogik guru inklusi di Indonesia dirincikan sebagai berikut: 27% sangat rendah, 44% rendah, 22% cukup, 7% baik, dan 0% guru yang memiliki kompetensi pedagogik sangat baik.⁵ Oleh karena itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga membutuhkan guru atau tenaga pendidik yang mumpuni secara emosional maupun intelektualnya dalam menangani siswa penyandang disabilitas. Tentunya hal ini juga perlu didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah.

Sebagai contoh, menurut hasil penelitian terdahulu, pelaksanaan pembelajaran di Kelas Inklusi SD Internasional Islamic School Yogyakarta diketahui bahwa dalam pengembangan kurikulum bagi Anak Berkebutuhan

⁴ Temi Damayanti, Stephani Raihana Hamdan, dan Andhita Nurul Khasanah, "Kompetensi Guru Dalam Proses Pembelajaran Inklusi Pada Guru SD Negeri Kota Bandung," *Journal of Psychological Research* 3, no. 1 (2017), 86.

⁵ Ratna Sari Wulandari dan Wiwin Hendriani, "Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review)," *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 7, no. 1 (2021), 156.

Khusus (ABK) masih belum dirancang secara khusus.⁶ Sehingga pelaksanaan pembelajaran inklusi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan siswa ABK, serta masih dirancang sama seperti kurikulum siswa reguler.

Di sisi lain, Guru Besar Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Prof. Dr. Budiyanto, M.Pd., mengatakan bahwa satuan pendidikan belum cukup siap dan matang dalam melaksanakan Permen AYL tersebut, salah satunya Kota Surabaya. Selain karena aturan baru diterbitkan beberapa bulan yang lalu (4 Agustus 2023), dan masih dilakukan sosialisasi. Persoalan tenaga pendidikan khusus juga menjadi kendala. Permendikbud Nomor 48 tahun 2023 tersebut, terdapat satuan pendidikan khusus dan kemampuan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang diberikan. Surabaya masih menggunakan rujukan rujukan nomor 70 tahun 2009, dan jumlah guru pembimbing khusus di Surabaya masih terbatas. Untuk menyiapkan Permendikbudristek no 48 tahun 2023, Kemdikbudristek akan mendesain di setiap wilayah kedepan harus ada Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan diisi oleh guru pendidikan khusus.⁷

Keadaan ini tentunya mempengaruhi mutu pembelajaran yang dialami oleh siswa disabilitas itu sendiri. Karena secara teori, kualitas satuan pendidikan dalam implementasi kebijakan, kualitas guru sebagai sumber

⁶ R K Nada, "Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Di Kelas Inklusi Sd International Islamic (Intis) School Yogyakarta," *As-Sibyan*, 2022, 76.

⁷ Danu Setiawan, "Sekolah Formal Belum Siap Laksanakan Permen AYL", Bhirawa Online, diakses melalui <https://www.harianbhirawa.co.id/sekolah-formal-belum-siap-laksanakan-permen-ayl/> pada 6 Desember 2023.

daya manusia, dan pelibatan kepedulian masyarakat serta orang tua merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam mempertahankan, bahkan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.⁸ Sehingga mutu pembelajaran di sekolah sejatinya adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, diharapkan siswa disabilitas akan terjamin mutu proses pembelajarannya, serta mutu *output* pembelajarannya.

Sehingga adanya Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 ini hadir sebagai kontribusi pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran siswa disabilitas, melahirkan lingkungan belajar yang ramah dan memberikan akses yang sama kepada mereka. Penting untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa dengan kebutuhan khusus sehingga mereka dapat belajar dan berkembang dengan baik di lingkungan yang inklusif.⁹ Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan dana bantuan, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung, serta sumber daya manusia yang kompeten.

Oleh karena itu, berdasarkan deskripsi di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan akomodasi siswa disabilitas terhadap mutu pembelajaran di tingkat satuan pendidikan, karena

⁸ Khotibul Umam, 2.

⁹ Ishartiwi, "Fungsi Unit Layanan Disabilitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif.", 8.

setelah lahirnya regulasi yang menjamin akomodasi yang layak selanjutnya adalah tugas dan wewenang sekolah sebagai satuan pendidikan untuk mengimplmentasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu penulis menyusun tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) Pada Sekolah Inklusi Di Kota Malang. (Studi Multisitius SD Anak Saleh dan SD Islamic Global School Kota Malang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus membahas poin-poin berikut:

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari tahap interpretasi, organisasi, dan aplikasi, beserta faktor pendukungnya?
2. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari tantangan dan hambatan di lapangan?
3. Bagaimana hasil implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari *output* dan *outcome* pembelajaran?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan rekomendasi terkait implmentasi kebijakan akomodasi PDBK untuk meningkatkan mutu

pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang. Sehingga tujuan tersebut dirincikan melalui beberapa poin berikut:

1. Untuk mengidentifikasi proses implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari tahap interpretasi, organisasi, dan aplikasi, beserta faktor pendukungnya.
2. Untuk mengidentifikasi evaluasi implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari tantangan dan hambatan di lapangan.
3. Untuk mengidentifikasi hasil implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari *output* dan *outcome* pembelajaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Penulis menuliskan manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini mampu menjadi sumbangsih pengetahuan terkait penerapan kebijakan akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan pemikiran dan memperluas informasi untuk pemangku kebijakan dalam mewujudkan sekolah/madrasah ramah difabel di masa depan.
2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai jembatan yang mengantarkan peneliti menjadi pelaksana pendidikan yang kreatif dan adaptif agar sesuai dan cocok untuk siswanya yang beragam di masa depan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai pengetahuan dan informasi tentang penerapan kebijakan akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran sebagai rujukan pelaksanaan sekolah inklusi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia.

c. Bagi Tenaga Pendidik

Sebagai bahan evaluasi, masukan dan bahan acuan agar guru bisa menyusun aktivitas belajar siswa yang cocok dan sesuai untuk siswanya agar meningkat kemampuan adaptif dan fungsionalnya.

d. Bagi Peserta Didik

Sebagai motivasi siswa dalam meningkatkan kemampuan adaptif dan fungsionalnya dari segi fisik, mental-intelektual, dan emosionalnya.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses dimana sebuah kebijakan publik yang telah dibuat diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan diberlakukan di lapangan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada penelitian, ini

implementasi kebijakan akan ditinjau dengan teori milik George C. Edward III dan teori milik Charles O. Jones.

2. Akomodasi PDBK

Akomodasi untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) merujuk pada upaya penyediaan dukungan anggaran, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga pendidik, penyediaan kurikulum serta penyesuaian lain yang diperlukan agar mereka dapat mengakses, berpartisipasi, dan meraih pembelajaran dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

3. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Peserta didik berkebutuhan khusus merupakan peserta didik yang memiliki kesulitan dan hambatan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah formal sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan yang berbeda dengan siswa pada reguler dikarenakan keterbatasan yang dimilikinya. Contohnya adalah penyandang tuna grahita, tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna wicara, autis dan lain sebagainya.

4. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Evaluasi implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu kebijakan sudah sesuai dengan petunjuk teknis atau perencanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir dari kebijakan dan menjadi tolak ukur untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Evaluasi implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada penelitian diukur melalui kesesuaian fakta di lapangan dengan indikator masing-masing aspek yang telah ditentukan.

5. Hasil Implementasi Kebijakan

Hasil implementasi kebijakan akomodasi PDBK diukur dari kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Hasil implementasi kebijakan ditinjau dari indikator keberhasilan siswa dalam memahami dan menguasai materi yang diajarkan secara kualitatif. Untuk mengetahui hasil pembelajaran, dapat ditinjau dari *output* dan *outcome* yang ditunjukkan melalui perilaku PDBK.

6. Sekolah Inklusi

Sekolah inklusi adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang berbeda, serta kondisi yang berbeda, termasuk bagi semua jenis anak berkebutuhan khusus. Prinsip dari sekolah inklusi adalah kesetaraan, partisipasi, fleksibilitas, dan kolaborasi.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan memiliki kesinambungan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Nur Khasanah, *Implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa (Studi*

Deskriptif di SMP Negeri 2 Belitang), 2018. Penelitian ini mengkaji terkait penerapan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi, yang merupakan regulasi terdahulu sebelum lahirnya Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 yang diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini secara deskriptif mengkaji tentang proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), peran guru pembimbing dalam pelaksanaan pendidikan PDBK di kelas, dan sarana-pra sarana yang dibutuhkan PDBK untuk menunjang pendidikannya di SMP Negeri 2 Belitang. Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan yakni belum mengkaji *output*, *outcome* dan sejauh mana implementasi regulasi tersebut perlu dievaluasi menurut beberapa aspek. Sehingga penelitian ini perlu tindak lanjut untuk mengkaji relevansi dan efektivitas implementasi regulasi oleh satuan pendidikan menurut perspektif orang tua/wali PDBK.

2. Lailatul Munawwaroh, *Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak*, 2018. Juga menganalisis terkait penerapan regulasi tentang pelaksanaan pendidikan inklusi yang sama seperti sebelumnya, yakni Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan studi pustaka untuk menganalisis isi dari regulasi tersebut. Sehingga penelitian ini terbatas pada penelitian isi, belum mengkaji terkait implementasi secara riil regulasi tersebut dilaksanakan dan apa saja hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan.
3. Akhmad Nurul Kawakip, dkk, *Pengelolaan Sekolah Inklusi: Studi Multi Situs Pada Sekolah Islam Di Jawa Timur*, 2023. Penelitian ini berfokus

untuk mengidentifikasi bentuk kebijakan-kebijakan sekolah inklusi di sekolah Islam di Jawa Timur dan bagaimana proses implementasinya. Penelitian ini bersifat mengeksplorasi dan mendalami secara deskriptif objek penelitiannya. Sehingga peneliti meneliti menemukan keterbatasan penelitian ini yaitu perlu adanya tindak lanjut berupa proses evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan sekolah inklusi agar kebijakan tersebut bisa diukur efektivitasnya, dikembangkan kelebihanannya dan diminimalisir peluang kekurangan dan resikonya.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Nur Khasanah, <i>Implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa (Studi Deskriptif di SMP Negeri 2 Belitang)</i> 2018.	Implementasi permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 2 Belitang belum optimal dikarenakan beberapa pendukung penting dalam pendidikan inklusi tidak tersedia.	Mengkaji proses pembelajaran bagi PDBK, peran guru pembimbing dalam pelaksanaan pendidikan PDBK di kelas, dan sarana-pra sarana di SMP Negeri 2 Belitang.	Peneliti berusaha mengidentifikasi proses implementasi, serta menganalisis evaluasi dan hasil implementasi kebijakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang
2.	Lailatul Munawwaroh, <i>Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak</i> , 2018.	Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan substansi isi, seperti adanya segregasi pendidikan khusus dan reguler, ketidaksinkronan peraturan perundangan, kurangnya guru	Analisis isi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, melalui penelitian deskriptif dan studi Pustaka.	Peneliti berusaha mengidentifikasi proses implementasi, serta menganalisis evaluasi dan hasil implementasi kebijakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk

		pembimbing khusus (GPK) dan keadaan masyarakat yang kurang mendukung dalam hal pelaksanaan pendidikan inklusif ramah anak.		peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang
3.	Akhmad Nurul Kawakip, dkk, Pengelolaan Sekolah Inklusi: Studi Multi Situs Pada Sekolah Islam Di Jawa Timur, 2023.	Pelaksanaan pengelolaan sekolah anak inklusi diawali dengan tahapan analisis situasi, penyamaan persepsi, pengorganisasian dan pembentukan tim pelaksana program.	Memaparkan terkait bentuk-bentuk kebijakan sekolah secara otonom, dan implementasinya di sekolah inklusi.	Peneliti berusaha mengidentifikasi proses implementasi, serta menganalisis evaluasi dan hasil implementasi kebijakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang

Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa potensi penelitian yang dapat dikembangkan terkait kebijakan dan regulasi pemerintah yang membahas tentang pendidikan inklusi dan pendidikan bagi PDBK/siswa disabilitas. Perlu adanya penelitian yang mengidentifikasi dan menganalisis proses implementasi kebijakan tersebut melalui beber ditinjau dari proses interpretasi, organisasi, dan aplikasi, beserta faktor pendukungnya (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasinya), serta menganalisis evaluasi dan hasil implementasinya ditinjau dari *output* dan *outcome* pembelajaran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menunjukkan mata rantai gambaran penulisan menyeluruh dari awal hingga akhir, terdiri dari 5 bagian yang penulis susun secara sistematis dengan perincian bab sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, definisi operasional variabel, orisinalitas penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Kajian teori menguraikan teori-teori yang sejalan dengan tema utama penelitian.
- BAB III** Metode penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap-tahap penelitian lainnya.
- BAB IV** Hasil Penelitian mencakup hasil dan paparan data yang didapatkan dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- BAB V** Pembahasan yang berisikan tentang jawaban dari masalah penelitian dan menjabarkan hasil penelitian, berupa implementasi kebijakan Akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang.
- BAB VI** Penutup, yakni mencakup tentang kesimpulan dan saran rekomendasi penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Akomodasi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Kebijakan terkait hak dan akomodasi PDBK dalam menempuh pendidikan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 yang mengatur pendidikan inklusif, termasuk pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Setelah lahirnya kebijakan ini, pemerintah kabupaten/kota akan berusaha melaksanakan program pendidikan di setiap kecamatan untuk menyediakan pendidikan inklusif. Sedangkan melalui Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah menghimbau agar lembaga pendidikan memberi hak-hak siswa disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif; mengakses pembelajaran bermutu di seluruh tingkatan dan jenis fasilitas pendidikan, dan mendapatkan akomodasi pendidikan yang memadai.¹⁰

Melalui kedua rujukan tersebut, Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim, berusaha untuk meninjau kebijakan terkait hak dan akomodasi pendidikan bagi siswa disabilitas dengan menetapkan pemberlakuan Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 sebagai penyempurna Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 dan

¹⁰ INOVASI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Pembelajaran Yang Berkualitas Dalam Pendidikan Inklusif Inovasi," no. November (2019), 2.

Permendikbud Nomor 46 Tahun 2017. Adapun secara umum, Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 mengatur terkait penyelenggaraan penyediaan Akomodasi yang Layak bagi siswa disabilitas yang mana membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, di antaranya adalah Kemendikbudristek sebagai pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan masyarakat secara umum. Ahli mengatakan bahwa Permendikbud ini merupakan langkah konkrit dalam penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di sektor pendidikan.¹¹

Selain itu, adanya peraturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan humanisme, sehingga setiap warga sekolah dapat menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai terhadap sesama manusia.¹² Selaras dengan tujuannya secara umum, menurut Erik Wz Qori, Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia (IGPKhI) penyediaan Akomodasi yang Layak (AYL) bertujuan untuk memberi kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara, memberikan akses dan layanan yang bermutu, serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai.¹³

¹¹ Dinda Shabrina, Media Indonesia, “Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 Wajibkan Sekolah Sediakan Kebutuhan Penyandang Disabilitas” diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/606977/permendikbud-nomor-48-tahun-2023-wajibkan-sekolah-sediakan-kebutuhan-penyandang-disabilitas>.

¹² Permendikbud No. 48 Tahun 2023, Pasal 2

¹³ Erik Wz Qori, (26 Januari 2024), TuPokSi Guru Pendidikan Khusus dalam Penerapan Permendikbud No. 48 Tahun 2023 [Berkas Video], dalam webinar “Ngobrol Inspiratif Solusi Aksi Nyata Dan Interaktif (Ngopi Santai)” diterima dari <https://www.youtube.com/watch?v=MjbrHWfh1QE>.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksana penyedia AYL bagi siswa inklusi terdiri dari Pemerintah Daerah (Pemda), penyelenggara/ pengelola satuan pendidikan, dan satuan pendidikan itu sendiri.¹⁴ Dengan harapan satuan pendidikan secara desentralisasi dioperasikan oleh sumber daya manusia yang professional untuk menciptakan manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Pelaksana penyedia AYL tersebut berupaya untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, melatih tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkomitmen terhadap tugas, menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, mendistribusikan dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta mendorong partisipasi masyarakat. Apabila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/ atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi implementasi Permendikbud No. 48 Tahun 2023 terkait penyediaan AYL akan kurang optimal.¹⁵

Sedangkan penerima AYL adalah terpusat pada siswa inklusi penyandang disabilitas di seluruh jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi.¹⁶ Oleh karena itu, diharapkan dengan mengimplementasi Permendikbud ini dapat merangsang pemerintah daerah

¹⁴ Permendikbud No. 48 Tahun 2023, Pasal 3.

¹⁵ Lailatul Munawwaroh, "Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak," *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 10, no. 2 (2019), 30.

¹⁶ Permendikbud No. 48 Tahun 2023, Pasal 4.

dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memfasilitasi penyediaan AYL tersebut.¹⁷

Bentuk AYL minimum yang dapat disalurkan pada satuan pendidikan dapat berupa bantuan anggaran, penyediaan sarana-prasarana, pengadaan pendidik dan penyediaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa inklusi.¹⁸ Adapun AYL tersebut dapat dilakukan dan dirincikan sebagaimana berikut:¹⁹

1. Bantuan anggaran atau pendanaan dapat disalurkan dalam bentuk bantuan dana operasional, beasiswa pendidikan, ataupun dana untuk menyediakan sarana dan prasarana.
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa sarana dan prasarana umum, khusus, dan pendukung akses pembelajaran jarak jauh.
3. Penyediaan pendidik, merujuk pada penyediaan guru kelas yang mumpuni terkait pendidikan inklusif, dan guru pendidikan khusus yang mana memiliki kompetensi spesifik dalam melayani pendidikan siswa disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka.

¹⁷ Yana Mulyana, Pendidikan Kewarganegaraan, “Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Dan PT”, diakses dari <https://ainamulyana.blogspot.com/2023/08/permendikbudristek-nomor-48-tahun-2023.html?m=1>.

¹⁸ Permendikbud No. 48 Tahun 2023, Pasal 5.

¹⁹ Erik Wz Qori, (26 Januari 2024), TuPokSi Guru Pendidikan Khusus dalam Penerapan Permendikbud No. 48 Tahun 2023 [Berkas Video], dalam webinar “Ngobrol Inspiratif Solusi Aksi Nyata Dan Interaktif (Ngopi Santai)” diterima dari <https://www.youtube.com/watch?v=MjbrHWfh1QE>.

4. Penyediaan kurikulum yang dimaksud adalah mengembangkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta memodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keragaman siswa disabilitas. Namun pengembangan dan modifikasi tersebut harus tetap memperhatikan standar nasional pendidikan.²⁰

Akomodasi yang telah dipaparkan di atas, dapat diberikan oleh Pemda secara bertahap dengan memprioritaskan pada satuan pendidikan yang menerima atau sudah memiliki siswa disabilitas. Sehingga untuk satuan pendidikan tersebut dapat melaporkan data riil terkait siswa disabilitas melalui sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sedangkan satuan pendidikan yang belum memiliki siswa disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitas AYL terlebih dahulu kepada Pemda.²¹

Regulasi ini ditegaskan untuk diterapkan dengan adanya pasal-pasal yang menyebutkan bahwa setelah regulasi dilaksanakan sedemikian rupa, maka pemerintah wajib melaksanakan pelaporan; pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah setingkat kota atau kabupaten. Sehingga Bupati dan atau Wali Kota wajib melakukan pelaporan yang mencakup satuan pendidikan yang telah diberikan fasilitas penyediaan akomodasi yang layak, bentuk akomodasi yang disediakan, daftar PDBK beserta ragam ketunaannya, dan daftar satuan pendidikan yang belum difasilitasi tetapi telah menerima PDBK

²⁰ Permendikbud No. 48 Tahun 2023, Pasal 6-12.

²¹ Permendikbud No. 48 Tahun 2023, Pasal 5.

di wilayahnya. Pelaporan ini akan diteruskan ke Gubernur sampai ke pemerintah pusat, tepatnya menteri urusan bidang pemerintahan dalam negeri.²²

Selain itu, seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari menteri, gubernur, bupati dan atau wali kota beserta komisi nasional disabilitas juga berwenang untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan yang menyediakan akomodasi bagi PDBK. Tidak hanya jajaran pemerintah, masyarakat pun bisa berkontribusi dalam implementasi regulasi ini sebagai pemberi bantuan dalam pemenuhan layanan pendidikan bagi PDBK. Selain itu masyarakat juga dapat mengadu kepada pemerintah apabila terjadi pelanggaran dalam penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas.²³

Dengan adanya aduan, keluhan, dan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat, pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak PDBK dalam sekolah dapat ditangani dengan pemberian sanksi administratif sesuai dengan Permendikbud no. 48 Tahun 2023 Bab VIII pasal 28. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan dan bahkan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan (dengan ketentuan tertentu) oleh pemerintah yang berwenang.²⁴

²² Permendikbud No. 48 Tahun 2023, Pasal 22.

²³ Permendikbud No. 48 Tahun 2023, Pasal 26-27.

²⁴ Permendikbud No. 48 Tahun 2023, Pasal 28.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ripley dan Franklin yang menyebutkan bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi implementasi kebijakan publik, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, juga sumber dana.²⁵ Dengan memperhatikan faktor-faktor yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin, diharapkan implementasi kebijakan akomodasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan lebih efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan produk hukum dari suatu negara yang memiliki tujuan (*goals*) untuk mewujudkan idealis negara, namun di sisi lain juga memiliki beberapa permasalahan publik yang harus diatasi. Oleh karena itu, pemerintah berperan sebagai administrator publik yang berkontribusi secara langsung untuk membuat dan menyusun kebijakan publik. Menurut Charles O. Jones, kebijakan publik diimplementasikan melalui 3 aktivitas penting (sebagai tahap), yakni interpretasi, organisasi, dan aplikasi.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan interpretasi adalah upaya penjelasan kebijakan dalam bahasa operasional yang mengharapkan adanya pemahaman oleh semua pihak

²⁵ Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, n.d., 7.

²⁶ Auldrin M. Ponto, "Implementasi Kebijakan Progam Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado," *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* 7, no. 1 (2019), 40.

yang terlibat dalam proses implementasi, termasuk pelaksana dan sasaran kebijakan tersebut.²⁷ Sedangkan organisasi adalah upaya penataan atau pembentukan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode demi berjalannya kebijakan publik.²⁸ Selanjutnya, aplikasi merupakan upaya penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sarasannya, serta diarahkan oleh pedoman maupun prosedur pelaksanaan kebijakan.^{29, 30}

Selanjutnya, dalam rangka memastikan keberhasilan dan efektivitas implementasi kebijakan publik, terdapat 2 perspektif yang dapat ditinjau. Pertama yakni peninjauan proses perencanaan dan implementasi dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.³¹ Peninjauan ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi hambatan dan masalah dalam proses implementasi kebijakan yang kemudian dapat dirumuskan solusinya.³² Kedua, peninjauan berdasarkan hasil implementasi, berupa *output* dan *outcomes*, setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.³³ Peninjauan ini dilakukan untuk memutuskan tindak lanjut terhadap kebijakan

²⁷ Maisyaroh, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak," *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 4 (2015), 5.

²⁸ Auldrin M. Ponto, "Implementasi Kebijakan Progam Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.," 41.

²⁹ Maisyaroh, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.," 5.

³⁰ Auldrin M. Ponto, "Implementasi Kebijakan Progam Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.," 47.

³¹ Y. Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Cakrawati* 04, no. 01 (2021), 25

³² *Ibid.*, 27.

³³ *Ibid.*, 25.

tersebut, apakah dikembangkan, diperpanjang, dimodifikasi, dikurangi atau bahkan dihentikan.

Dalam peninjauan proses perencanaan dan implementasi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dari kebijakan publik menurut George C. Edward III (1980) adalah:

1. Komunikasi (*Communication*): Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, komunikasi harus dilaksanakan secara efektif agar tercipta implementasi yang efektif pula. Komunikasi yang dimaksud adalah tersampainya informasi dengan jelas dan terbentuknya interpretasi yang selaras antar implementator kebijakan sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakan suatu kebijakan yang telah diputuskan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga faktor komunikasi ini dibangun dari 2 aspek, yakni (a) transmisi, yakni baiknya penyaluran informasi; dan (b) akurasi, yakni kejelasan informasi yang diberikan oleh penyusun kebijakan;³⁴ dan (c) konsistensi komunikasi.³⁵ Faktor komunikasi ini, dalam konteks menyampaikan informasi, berpengaruh besar pada tahap implementasi pertama, yakni interpretasi; yang mana menitikberatkan pada aktivitas penjelasan kepada seluruh pihak yang terlibat pada implementasi kebijakan.

³⁴ Ahmad Mustanir dan Jusman, "Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Ilmiah Akmen* 13, no. 3 (2016), 544.

³⁵ Widya Rhenata, 27.

2. Sumber daya (*Resources*): Untuk memastikan efektivitas pada proses implementasi kedua, yakni organisasi, diperlukan adanya pembentukan dan penataan sumber daya tertentu. Sumber daya yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas suatu kebijakan terdiri dari:³⁶
 - a. Staf/pelaksana yang kompeten dan kapabel dalam mengimplementasikan kebijakan.
 - b. Informasi terkait cara implementasi kebijakan (pedoman, prosedur, SOP, dan lain sebagainya), serta data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi yang telah diputuskan.
 - c. Kewenangan/otoritas/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan publik.
 - d. Fasilitas pendukung baik secara fisik maupun finansial.
3. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*): Struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan pedoman pelaksanaan yang terdapat pada sebuah lembaga/organisasi yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.³⁷ Secara tidak langsung, adanya struktur organisasi ini berpengaruh pada tahap implementasi kedua, yakni Organisasi; berhubungan langsung dengan faktor sumber daya, terkait penataan dan pembagian peran/pemanfaatan sumber daya.

³⁶ Ahmad Mustanir dan Jusman, 544.

³⁷ Ibid.

4. Disposisi pelaksana (*Disposition/Attitude*): Sikap yang diharapkan untuk dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah melaksanakan perintah dengan baik, berdedikasi pada kebijakan yang ditetapkan, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.³⁸ Faktor disposisi inilah yang akan berpengaruh besar pada tahap implementasi ketiga, yakni Aplikasi, di mana disposisi akan menentukan dinamisnya kinerja pelaksana kebijakan.³⁹ Jika disposisi para pelaksana positif dan didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif, maka kebijakan akan lebih mudah diterapkan dan mencapai tujuannya; begitu pula sebaliknya.

Setelah memahami dan memenuhi faktor-faktor tersebut, pelaksana kebijakan kemudian diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan dan masalah dalam proses implementasi, kemudian merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Selanjutnya, dalam peninjauan hasil implementasi, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik dapat dilihat melalui 2 hal, yakni *output* dan *outcome* setelah implementasi kebijakan selesai dilakukan. Hasil implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejauh mana proses pendidikan inklusi memunculkan hasil tertentu dan perubahan yang signifikan pada diri PDBK. Sehingga *output* dan *outcome* yang diteliti adalah ada atau tidaknya peningkatan mutu pembelajaran PDBK.

³⁸ Ibid, 545.

³⁹ Auldrin M. Ponto, "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.", 47.

C. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Peningkatan suatu mutu merupakan salah satu keinginan dasar manusia yang berlaku di setiap lini kehidupannya, termasuk peningkatan mutu dalam bidang pendidikan. Salah satu yang menentukan terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah adalah proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas.⁴⁰ Mutu pembelajaran tentu disesuaikan dengan standar dan orientasi tersendiri bagi masing-masing lembaga pendidikan terhadap kepuasan dan permintaan pelanggan (calon peserta didik).⁴¹

Peningkatan mutu pembelajaran ini menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh sekolah agar masyarakat pengguna lembaga pendidikan mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap layanan pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Dalam peningkatan mutu pembelajaran, terkandung upaya: (a) mengendalikan proses yang berlangsung dalam proses pembelajaran baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, (b) melibatkan proses *diagnose* dan proses tindakan untuk menindak lanjuti *diagnose* kesulitan belajar tersebut, dan (c) memerlukan partisipasi semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, orang tua dan pakar pendidikan dan pembelajaran.⁴² Oleh karena itu, peningkatan mutu pembelajaran akan terwujud dengan baik dan efektif apabila seluruh pihak yang terlibat dapat berkomitmen tinggi pada orientasi yang sama. Bahkan menurut Arcaro, Mutu

⁴⁰ Khotibul Umam, "Menciptakan Mutu Pembelajaran Di Sekolah," 2017., 1.

⁴¹ Hikmah Eva Trisantra, Prim Masrokan Mutohar, dan Sulastrri Rini Rindrayani, "Manajemen Peningkatan Mutu Pembelajaran Dengan Sistem FDS," 2018., 84.

⁴² Trisantra, Mutohar, dan Rindrayani., 90.

menciptakan lingkungan bagi pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil-wakil masyarakat dan pemuka bisnis untuk bekerja bersama guna memberikan kepada para pembelajar sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan masyarakat, bisnis dan akademik sekarang dan masa depan.⁴³

Adapun konsep mutu pembelajaran dapat ditinjau melalui tiga pendekatan operasional, yakni mutu *input*, mutu proses, dan mutu *output*. Apabila mutu input bagus kemudian diolah dengan proses yang bagus, maka *output*-nya akan dihasilkan secara bagus pula.⁴⁴ Indikator mutu input pembelajaran ditinjau dari kebijakan mutu, tersedianya sumber daya yang siap, memiliki harapan prestasi belajar yang tinggi, berfokus pada stakeholder, dan memiliki *input* manajemen yang bagus. Selanjutnya terkait indikator mutu proses pembelajaran terdiri dari 1) proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, 2) kepemimpinan sekolah yang kuat, 3) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, 4) sekolah memiliki budaya mutu, 5) sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, 6) sekolah memiliki kewenangan (kemandirian), 7) tingginya partisipasi warga sekolah dan masyarakat terhadap sekolah, 8) sekolah memiliki transparansi manajemen (keterbukaan) dan 9) sekolah selalu melakukan evaluasi dan perbaikan.

⁴³ Cahyo Budi Utomo, *Manajemen Pembelajaran*, UNNES Press, 2018., 163.

⁴⁴ Umam, "Menciptakan Mutu Pembelajaran Di Sekolah.", 1.

Sehingga keberhasilan indikator mutu input dan proses, dapat ditinjau melalui mutu *output* pembelajaran, yakni 1) *academic achievement* (prestasi akademik); prestasi yang diperoleh berdasarkan hasil proses pembelajaran di kelas, seperti nilai semester, nilai ujian akhir sekolah, nilai ujian nasional dan lain-lain; dan 2) *non-academic achievement* (prestasi non-akademik) prestasi yang diperoleh berdasarkan hasil proses situasi, kondisi, iklim dan budaya sekolah yang diterapkan, seperti kebersihan sekolah, kedisiplinan, ketertiban, bidang olah raga, seni, budaya dan lain-lain.⁴⁵

D. Pendidikan Inklusif

Salah satu bentuk kemajuan dari pendidikan Indonesia, adalah terbentuknya satuan pendidikan yang menunjang pembelajaran bagi seluruh kalangan siswa, termasuk siswa inklusi. Adapun pemerintah Indonesia telah mendukung konsep pendidikan ini melalui beberapa regulasi, di antaranya adalah Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017, dan yang terbaru adalah Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023.

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, tanpa memandang kondisi mereka. Pendidikan inklusi merujuk pada pendekatan di mana semua siswa, termasuk mereka yang memiliki anak cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari penduduk terpencil

⁴⁵ Umam., 2.

ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik ataupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah atau kelompok lain yang tak beruntung,⁴⁶ diajak untuk belajar bersama dalam lingkungan sekolah yang umum atau biasa. Dengan konsep pendidikan inklusif tersebut diharapkan memungkinkan setiap anak merasa diterima, menjadi bagian dari kelas, dan bekerja sama dengan guru, teman sebaya, dan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.⁴⁷

Prinsip dasar pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi atau pemisahan berdasarkan kondisi fisik, mental, sosial, atau emosional.⁴⁸ Pendidikan inklusi harus ramah dan hangat sehingga dapat memberikan rasa nyaman terhadap para pendidik dan tenaga didik. Dalam praktiknya, pendidikan inklusif semestinya memberlakukan tempat duduk yang bervariasi agar bisa saling membaur, materi dan metode pembelajaran bervariasi agar lebih menarik, dan tenaga didik memiliki rencana harian yang akan digunakan untuk media pembelajaran.

Adapun pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara keseluruhan, di mana semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat

⁴⁶Hamsi Mansur, *Pendidikan Inklusif Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2019), 23.

⁴⁷ Munawwaroh, "Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak.", 23.

⁴⁸ Hamsi Mansur, *Pendidikan Inklusif Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua.*, 22.

berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini mendorong nilai-nilai persamaan, keberagaman, dan penghargaan terhadap perbedaan.

2. Karakteristik Pendidikan Inklusi

Karakteristik pendidikan inklusi dapat mencakup berbagai aspek, seperti interaksi guru dan siswa, desain pembelajaran, lingkungan belajar, penilaian, dan model belajar siswa. Berikut adalah beberapa karakteristik pendidikan inklusi, di antaranya:⁴⁹

- a. Akses Untuk Semua: Pendidikan inklusi berusaha untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki akses penuh dan setara terhadap fasilitas, kurikulum, dan peluang pendidikan.
- b. Partisipasi Aktif: Pendidikan inklusi mendorong partisipasi aktif semua siswa dalam kegiatan pembelajaran kelas umum. Ini melibatkan penyusunan strategi dan pendekatan pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa.
- c. Pendukung Individual: Memberikan dukungan individual sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti pemberian bahan ajar alternatif, waktu tambahan, atau dukungan khusus, tanpa mengorbankan integrasi siswa dalam lingkungan kelas umum.

⁴⁹ Hamsi Mansur., 31.

- d. Kerjasama Guru dan Spesialis: Guru dan spesialis kesehatan atau pendidikan khusus bekerja sama untuk menyusun dan melaksanakan strategi pendukung bagi siswa dengan kebutuhan khusus.
- e. Atmosfer Inklusif: Menciptakan atmosfer sekolah yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang perbedaan mereka.
- f. Pembelajaran Kolaboratif: Mendorong pembelajaran kolaboratif di antara semua siswa, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar mereka.
- g. Penilaian yang Adil: Menyesuaikan metode penilaian agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan pendidikan inklusif bersifat ramah anak. Pendidikan inklusif ramah anak berarti bahwa sekolah dan pendidikan harus menerima semua anak, tidak memandang fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi lain. Bahkan anak-anak di daerah terpencil, anak-anak yang dipekerjakan di jalanan, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas, dan anak-anak yang tidak beruntung dan terkucilkan dari masyarakat.⁵⁰

3. Problematika Pendidikan Inklusi

⁵⁰ Munawwaroh, "Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak.", 24.

Pemerintah Indonesia tentu telah berupaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang dapat menerima PDBK, salah satunya dengan pendidikan inklusi yang ramah anak. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa upaya tersebut masih memiliki kekurangan dan menghadapi hambatan, yang kemudian perlu dievaluasi dan diperbaiki ke depannya.⁵¹ Upaya ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan inklusi itu sendiri yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003, dan Permendikbud No. 48 Tahun 2023, yakni pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.⁵²

Namun dalam realitanya, pendidikan inklusi masih mengalami tantangan dan hambatan yang dapat dilihat melalui 2 sisi, yakni sisi pemerintah sebagai faktor eksternal dan sisi pelaksana satuan pendidikan sebagai faktor internal. Adapun dari sisi pemerintah, perlu adanya dukungan secara finansial, dukungan sarana-pra sarana, serta kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal daerah yang dipimpinnya. Hambatan yang terjadi saat ini yakni terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten sehingga perlu adanya pelatihan yang berarti. Seperti sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh Guru Pendidik Khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Antara guru kelas dan GPK saling bekerjasama dalam melayani anak berkebutuhan khusus, mulai dari

⁵¹ Agung T Wibowo dan Nur Laila Anisa, "Problematika Pendidikan Inklusi di Indonesia," *Publikasi Ilmiah UMS*, no. 2 (2017), 16.

⁵² *Ibid*, 17.

mengidentifikasi anak, mengasesmen anak, sampai kepada menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi anak tersebut.⁵³

Sedangkan dari sisi pelaksana satuan pendidikan, sekolah inklusi yang sudah menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus. Namun juga masih harus berupaya untuk menyesuaikan kurikulum dengan kelas yang heterogen dengan memiliki anak didik dengan karakteristik PDBK dan reguler. Selain itu, guru belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan PDBK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dan dengan perlakuan yang sama sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan.⁵⁴

E. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

1. Pengertian Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)

Peserta didik yang memiliki kesulitan dan hambatan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah formal dikenal dengan beberapa istilah antara lain; Peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), anak berkelainan, anak tuna, penyandang cacat, disabilitas. Dari beberapa istilah di atas, anak berkebutuhan khusus (*children with special need*) merupakan penyebutan yang lebih santun dan manusiawi daripada

⁵³ Ibid, 18.

⁵⁴ Ibid, 17.

sebutan yang lain.⁵⁵ Secara eksplisit, PDBK merupakan peserta didik yang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan siswa pada umumnya terkait keterbatasan yang dimilikinya. Namun pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi khusus terkait definisi dan pengertian terkait peserta didik tersebut, yakni dalam Undang-undang no. 8 tahun 2016 pasal 1 ayat 1, yang berbunyi:

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Peserta didik yang dikategorikan anak berkebutuhan khusus memiliki banyak jenis dan tipe dengan penyebutan yang sesuai dengan bagian diri anak yang mengalami hambatan baik telah ada sejak lahir maupun karena kegagalan atau kecelakaan pada masa tumbuh-kembangnya,⁵⁶ antara lain; siswa tunanetra (buta), tunarungu (tuli/bisu), tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, Autis, lambat belajar, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), hiperaktif, indigo, *down syndrome*, idiot, dan lain sebagainya.⁵⁷

Umumnya, PDBK menempuh pendidikan formal di Sekolah Luar Biasa (SLB), namun seiring perkembangan zaman, sekarang ini banyak

⁵⁵ Pedoman Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 1.

⁵⁶ Atien Nur Chamidah, "Mengenal anak berkebutuhan khusus," *Magistra* 25, no. 86 (2013), 1.

⁵⁷ *Ibid.*, 3.

PDBK yang belajar bersama anak-anak normal di sekolah atau madrasah reguler yang biasa disebut dengan pendidikan inklusif.

2. Klasifikasi Siswa Penyandang Disabilitas

Berdasarkan regulasi dan pengertian definisi terkait Siswa Penyandang Disabilitas, kemudian definisi tersebut diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik hambatan dan keterbatasannya menjadi 4, yakni disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik.⁵⁸

a. Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Karakteristik belajar siswa yang menyandang disabilitas fisik umumnya adalah hambatan motorik yang kompleks dan kesulitan terhadap mobilitas, sehingga mengalami ketergantungan terhadap lingkungan. Sehingga dalam proses belajarnya, sekolah juga harus berandil dalam menciptakan lingkungan dan fasilitas sekolah yang ramah disabilitas.

b. Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar,

⁵⁸ Dini Widinarsih, 138.

tunagrahita dan *down syndrome*. Karakteristik belajar siswa yang menyandang disabilitas intelektual umumnya adalah lambatnya kecepatan dan ketepatan berpikir siswa dalam memahami materi. Dalam kasus ini, ciri siswa disabilitas intelektual adalah lebih lambat cara berpikirnya dari pada siswa pada umumnya, kesulitan dalam konsentrasi dan mudah terdistraksi, daya ingat relatif lemah dan mudah lupa, serta kesulitan untuk mengeneralisasi hal baru dalam situasi yang berbeda dengan apa yang diajarkan.

Sehingga tingkat kecerdasan siswa disabilitas intelektual dapat dibagi menjadi beberapa tingkat berdasarkan tingkat intelektualnya, yakni *educable mentally retarded* (mampu didik), *trainable mentally retarded* (mampu latih) dan *totally/custodial dependent* (mampu rawat). Sehingga dalam proses belajarnya guru harus mampu menyederhanakan materi dan mengilustrasikan materi melalui lingkungan dan pengalaman di sekitar siswa, terlebih lagi melalui media visual.

c. Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Disabilitas ini dibagi lagi menjadi 2 jenis yakni disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Sedangkan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Karakteristik belajar siswa yang menyandang disabilitas mental umumnya adalah bersikap acuh dan cenderung tidak memperhatikan orang yang berkomunikasi dengannya. Sikap tersebut diiringi dengan gerakan yang tidak terarah sesuai dengan kemauannya sendiri dan tantrum. Sehingga dalam proses belajarnya guru harus mampu menemukan kegemaran dan bakat yang dimiliki siswa, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan. Selain itu, guru juga dapat dibantu dengan media yang dapat dilihat, dicontoh, dan ditirukan serta dipraktikkan siswa agar terhindar dari verbalisme.

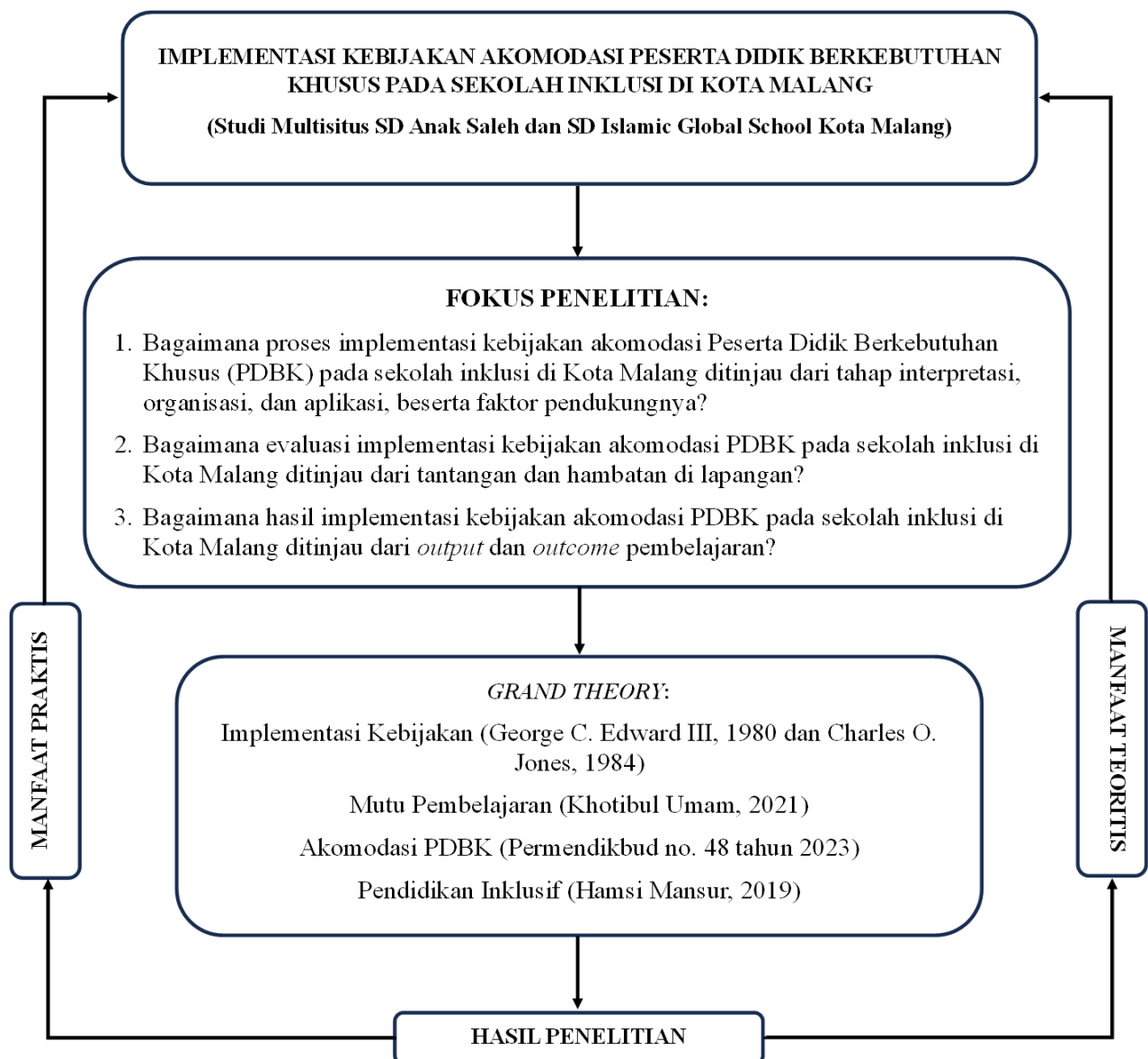
d. Disabilitas Sensorik

Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Karakteristik belajar siswa yang menyandang disabilitas sensorik umumnya adalah tidak mudahnya mereka menerima informasi dan materi yang disampaikan guru, seringkali mereka salah tanggap dan mengalami kesalahpahaman satu sama lain dengan gurunya karena hambatan berkomunikasi. Sehingga dalam proses belajarnya guru harus mampu memahami bahasa tubuh siswa, dan memahamkan siswa akan materi yang disampaikan dengan bahasa atau isyarat tertentu.

F. Kerangka Berpikir

Dalam upaya memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi kebijakan Akomodasi PDBK di sekolah inklusi di Kota Malang. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Maka dapat disusun kerangka pemikiran berikut ini.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian terkait implementasi kebijakan akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang ini menggunakan metode kualitatif, yang mana bertujuan mencari data primer dalam penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁹ Serta penelitian ini menggunakan penelitian yang berusaha mengumpulkan data dari lokasi atau situs yang berbeda, namun memiliki karakteristik yang sama dan relevan dengan fenomena yang diteliti; sehingga disebut dengan penelitian multisitus.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni peneliti bermaksud untuk mengembangkan rekomendasi terkait implementasi kebijakan akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang, dengan mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung yang dapat meningkatkan keberhasilan proses perencanaan dan implementasi, serta menganalisis hasil implementasinya berdasarkan beberapa tinjauan. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan meninjau secara teoritis gambaran implementasi kebijakan akomodasi PDBK

⁵⁹ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, n.d., 148.

secara riil untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian kualitatif karena mereka berfungsi sebagai alat utama (*key instrument*) untuk pengumpulan dan analisis data. Kehadiran penelitian secara fisik dan emosional memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan pengalaman partisipan. Tidak ada orang lain yang dapat menggantikan peran peneliti sebagai bagian penting dari penelitian.

Tingkat partisipasi aktif dalam penelitian menunjukkan seberapa akurat data yang dikumpulkan dan membantu memperoleh data yang asli dan akurat. Dinamika penelitian juga dapat dipengaruhi oleh interaksi antara peneliti dan peserta. Menurut Creswell (2013), kehadiran peneliti juga penting untuk memastikan interpretasi dan validitas data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti sangat penting untuk memastikan kualitas dan validitas hasil penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti bertugas sebagai pengumpul data dan pengamat fakta lapangan terkait informasi implementasi kebijakan Akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sekolah inklusi di Kota Malang, di antaranya adalah SD Anak Saleh, dan SD Islamic Global School. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil survey pra-penelitian, bahwasanya sekolah tersebut sudah memberlakukan kebijakan penerimaan siswa disabilitas dan melaksanakan pendidikan inklusi dalam penyelenggaraan satuan pendidikannya.

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2023/2024 sampai semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Peneliti melakukan studi pendahuluan pada bulan April 2024, kemudian dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian. Sehingga penelitian lapangan dimulai pada bulan Mei 2024 sampai September 2024.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dipilih oleh peneliti sebagai sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian dipilih secara sistematis melalui teknik *purposive sampling*, dalam rangka mendapatkan sampel yang mewakili tujuan penelitian serta memenuhi kriteria dalam memberikan informasi. Sehingga subjek penelitian ini mencakup Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah (waka) bidang kurikulum, waka bidang kesiswaan, dan Guru Pendamping Khusus (GPK), yang mana terlibat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah inklusi tersebut.

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikumpulkan dari sumber primer ataupun sekunder.⁶⁰ Data yang dikumpulkan oleh peneliti tidak jauh dari penentuan objek dan subjek penelitian yang telah tertulis sebelumnya, yaitu implementasi kebijakan akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang, yang mana dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi agar peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan akurat sesuai fakta di lapangan. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dan data yang diperoleh dari subjek penelitian.

Selain itu, akan dikumpulkan pula data penunjang yang mana sudah ada sebelumnya dan dihimpun dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua contohnya berasal dari sumber-sumber tertulis milik lembaga, yang mana dikenal sebagai data sekunder.⁶¹ Terkait penelitian ini, sumber data sekundernya adalah jurnal dan penelitian terdahulu terkait penerapan regulasi yang sama, riwayat dan profil lokasi penerapan regulasi, serta literasi lain yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti.

Adapun data penelitian tersebut apabila ditabulasi maka akan dirincikan sebagaimana berikut:

⁶⁰ Ibid., 401.

⁶¹ Ibid., 401.

Tabel 3.2 Data dan Sumber Data Penelitian

No.	Data	Sumber Data	Teknik	Instrumen
1.	Proses implementasi kebijakan akomodasi	Peneliti, kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan GPK	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	Pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi
2.	Evaluasi implementasi kebijakan akomodasi	Peneliti, kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan GPK	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	Pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi
3.	Hasil implementasi kebijakan akomodasi	Peneliti, kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan GPK	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	Pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan elemen yang memegang peranan penting dalam penelitian, pun, benar atau tidaknya data tergantung dari bagus atau tidaknya alat pengumpul data.⁶² Sehingga dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dan instrumen, dengan harapan penelitian dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi beberapa macam,

⁶² Sulasmiyati, Sumber data dan Instrumen penelitian, 3.

yakni teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶³ Namun teknik pengambilan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data saat pra penelitian untuk mencari tahu masalah dan fenomena yang akan diteliti.⁶⁴ Adapun peneliti melakukan wawancara secara terstruktur, yang mana merupakan wawancara yang menggunakan pedoman wawancara, yang mempertanyakan fenomena, pengalaman, dan pengaruh secara general terkait implementasi kebijakan akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang.

2. Observasi

Observasi adalah cara memperoleh informasi dengan mengamati objek penelitian oleh peneliti secara langsung.⁶⁵ Dalam pelaksanaan observasi, peneliti tentu menggunakan pendekatan empiris yang mengandalkan panca indera terhadap subjek penelitian. Instrumen ini dilakukan saat peneliti lebih berfokus kepada penelitian. Dengan demikian, proses pengumpulan data dilaksanakan dengan berfokus pada sikap ataupun fenomena dari objek penelitian.

⁶³ Rukminingsih, Gunawan Adnan, dan Mohammad Adnan Latief, *Metode Penelitian Pendidikan. Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2020., 166.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta (Bandung, 2015)., 194.

⁶⁵ Muhammad Darwin et al., *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, 2021., 161.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data sekunder, seperti struktur organisasi sekolah, rekam jejak pelaksanaan regulasi terkait, serta jurnal dan penelitian terdahulu terkait kasus yang sama pada lokasi penelitian lain sebagai pembanding. Sehingga dapat diartikan bahwa dokumentasi adalah penelusuran data sekunder atau penelaahan arsip yang telah disediakan oleh suatu lembaga yang diteliti sehingga diisi ke dalam form isian tertentu sebagai laporan.⁶⁶

G. Instrumen Penelitian

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian.⁶⁷ Sehingga instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau yang menjadi variabel dalam penelitian. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yang mana akan mengetahui terkait proses perencanaan hingga hasil dari implementasi kebijakan akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang, maka instrumen yang paling tepat adalah menggunakan wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi.

Instrumen wawancara dan observasi akan disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian yang kemudian akan peneliti ajukan kepada narasumber yang telah ditetapkan. Kedua instrumen ini akan disusun menjadi wawancara

⁶⁶ Muhammad Darwin et al., 162.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 102.

dan observasi terstruktur. Adapun aspek-aspek ataupun indikator yang akan dikaji dan diteliti melalui instrumen penelitian wawancara, dan observasi dirincikan sebagaimana berikut:

Tabel 3.3 Pedoman Wawancara

Fokus Masalah 1: Proses perencanaan dan implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasinya.			
TAHAP	INDIKATOR	PERTANYAAN	NARASUMBER
INTER- PRETASI	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan para pelaksana terkait kebijakan Akomodasi PDBK? 2. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas komunikasi terkait kebijakan akomodasi di sekolah? 	Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, GPK
ORGANISASI	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana sekolah mengalokasikan sumber daya dalam implementasi kebijakan Akomodasi PDBK? 4. Apa saran Anda untuk meningkatkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya untuk implementasi kebijakan akomodasi di sekolah inklusi? 	Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, GPK
	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 5. Bagaimana struktur birokrasi dan pembagian tanggung jawab dalam implementasi kebijakan Akomodasi PDBK? 6. Apa saran Anda untuk meningkatkan efektivitas struktur dan pembagian tanggung jawab dalam implementasi kebijakan akomodasi di tingkat sekolah? 	Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, GPK
APLIKASI	Disposisi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 7. Bagaimana disposisi/kecenderungan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Akomodasi PDBK? 8. Apa saran Anda untuk meningkatkan disposisi/kecenderungan pelaksana pendidikan inklusi dalam implementasi kebijakan akomodasi PDBK? 	Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, GPK

<p align="center">Fokus Masalah 2: Evaluasi implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari tantangan dan hambatan di lapangan.</p>			
EVALUASI	Tantangan dan hambatan	<p>9. Apa saja hambatan atau tantangan yang Anda hadapi dalam memastikan komunikasi yang efektif terkait kebijakan akomodasi di sekolah?</p> <p>10. Apa saja hambatan atau tantangan yang Anda hadapi dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk implementasi kebijakan akomodasi?</p> <p>11. Apa saja hambatan atau tantangan yang Anda hadapi terkait birokrasi dan pembagian tanggung jawab dalam implementasi kebijakan Akomodasi PDBK?</p> <p>12. Apa saja hambatan atau tantangan yang Anda hadapi terkait disposisi/kecenderungan dalam implementasi kebijakan akomodasi PDBK?</p>	Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, GPK
<p align="center">Fokus Masalah 3: Hasil implementasi kebijakan akomodasi PDBK pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari <i>output</i> dan <i>outcome</i> pembelajaran.</p>			
HASIL IMPLEMENTASI	Output	<p>13. Apakah Anda melihat adanya peningkatan kemampuan pada diri PDBK di sekolah setelah implementasi kebijakan akomodasi?</p> <p>14. Apakah sekolah memiliki target tertentu terkait implementasi kebijakan akomodasi PDBK yang berhasil dicapai oleh PDBK?</p>	Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, GPK
	Outcome	<p>15. Secara jangka panjang diimplementasikan, apakah Anda melihat adanya peningkatan kemampuan adaptasi PDBK di sekolah?</p> <p>16. Apakah terlihat adanya perubahan positif dalam partisipasi dan keterlibatan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas setelah implementasi kebijakan akomodasi?</p> <p>17. Bagaimanakah tanda-tanda kemandirian yang muncul pada PDBK setelah implementasi kebijakan akomodasi?</p>	Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, GPK

Tabel 3.4 Pedoman Observasi

Indikator	Deskriptor	Kriteria
1. Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transmisi 2. Akurasi 3. Konsistensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektif • Interpretasi selaras • Konsistensi penyampaian informasi
2. Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM 2. Fasilitas 3. Kurikulum khusus 4. Anggaran sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompeten dan kapabel (SDM) • Baik dan cukup memadai • Sesuai dengana kebutuhan PDBK • Tersedia dan cukup memadai

3. Struktur Birokrasi	1. Pembagian peran 2. Pedoman organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Fleksibel dan akuntabel • Adaptif
4. Disposisi pelaksana	1. Kemauan (motivasi) 2. Kemampuan (skill)	<ul style="list-style-type: none"> • Sadar dan bermotivasi tinggi • Kompeten
5. <i>Output</i>	Keterampilan yang berkembang pada PDBK	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perkembangan diri PDBK • Tercapainya tujuan implementasi kebijakan di sekolah
6. <i>Outcomes</i>	Dampak atau efek jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemandirian • Peningkatan partisipasi • Peningkatan kemampuan khusus PDBK

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yakni (1) *data collection*, (2) *data display*, (3) *data condensation*, dan (4) *conclusion: drawing/verifying*. Tujuan analisis data adalah untuk mengidentifikasi dan memilih data yang penting dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. Tahapan analisis data mengikuti langkah-langkah, yaitu:

1. *Data Collection*

Yakni proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga dapat menghasilkan beberapa simpulan penelitian untuk diverifikasi.⁶⁸

⁶⁸ Yudin Citriadin, "Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner: Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif," 2020, 205.

2. *Data Display*

Maksudnya adalah menyajikan data, terdiri dari sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁹

3. *Data Condensation*

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan/atau transformasi data yang muncul dalam kumpulan teks penuh secara sistematis pada catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.⁷⁰

4. *Conclusion: Drawing/Verifying*

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Ingat simpulan penelitian bukan ringkasan penelitian.⁷¹

I. Pengecekan Keabsahan Data

Faktor dalam keabsahan penelitian kualitatif adalah objektivitas.

Objektivitas dalam penelitian kualitatif menjadi sangat penting karena peneliti

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Citriadin, "Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner: Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif," 207.

⁷¹ Citriadin, 208.

(pewawancara) itu sendiri sebagai alat ukur sehingga memungkinkan terjadinya subjektivitas (tidak objektif) dalam pengukuran dan pengumpulan informasi.⁷²

Untuk mendapatkan objektivitas dan memastikan tingkat keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji kredibilitas sumber data yang sama dengan teknik yang sama karena pemeriksaan ulang dan pengujian data, sehingga peneliti memperoleh data yang benar dan mencegah adanya kesalahan data.⁷³ Berikut ini beberapa metode triangulasi yang digunakan peneliti:

- a. Triangulasi sumber adalah teknik uji kredibilitas untuk mengevaluasi data dengan informasi dari beberapa sumber.⁷⁴ Pada penelitian ini yang berperan sebagai informan yaitu beberapa pihak dalam sekolah inkusi di Kota Malang seperti Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Sarana-Prasarana, juga beberapa wali siswa disabilitas.
- b. Triangulasi teknik yaitu metodologi untuk menguji kepercayaan data-data yang melibatkan penggunaan beberapa teknik untuk memeriksa data dari sumber yang sama.⁷⁵ Triangulasi teknik ini

⁷² Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiyati Leli Honesti Sri Wahyuni et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>, 178.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018),

272.

⁷⁵ Ibid. 274.

dicapai dengan membandingkan data yang diamati dengan temuan wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan subjek penelitian, sehingga temuan penelitian ini menjadi lebih valid dan terverifikasi kebenarannya.

J. Prosedur Penelitian

Menurut Suharsini Arikunto (2007), penelitian evaluasi dapat dilakukan melalui prosedur berikut ini:⁷⁶

1. Tahap Pra-Penelitian

- a. Peneliti mengkaji sumber literatur, lapangan, dan menggali informasi dari para pakar untuk menemukan problematika terkait penerapan kebijakan Akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi sebagai studi pendahuluan
- b. Peneliti merumuskan problematika penelitian dalam bentuk pertanyaan
- c. Peneliti menyusun rancangan penelitian yang berupa proposal penelitian yang akan dilakukan
- d. Peneliti mengatur perencanaan penelitian, menyusun instrumen, menyiapkan kancan penelitian, dan melaksanakan uji coba instrumen
- e. Peneliti menyelesaikan urusan administrasi terkait perizinan dan menyusun instrumen penelitian

⁷⁶ Maflahah, (10 Oktober 2020), Metode Penelitian Evaluasi, Macam, Cara Membuat, dan Contohnya [Berkas Video], diterima dari <https://www.youtube.com/watch?v=ATsTD1ZPPUI>.

- f. Peneliti menentukan narasumber dan subjek penelitian sebagai sampel penelitian

2. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, dan pengamatan serta dokumentasi terkait kebijakan Akomodasi PDBK untuk peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang sebagai upaya pengumpulan data dengan instrumen yang telah disusun berdasarkan rincian komponen yang akan dievaluasi.

3. Tahap Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, maka peneliti melakukan pengolahan data yang terdiri dari:

- a. Menganalisis data yang terkumpul
- b. Memverifikasi hasil penelitian yang telah dikumpulkan
- c. Menyimpulkan hasil penelitian
- d. Menginformasi mengenai hasil penelitian disampaikan kepada pengelola sekolah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sekolah Dasar Anak Saleh

Sekolah Dasar Anak Saleh atau yang dapat disingkat menjadi SD-AS merupakan salah satu sekolah dasar (SD) inklusi yang ada di Kota Malang. SD-AS ini beralamatkan di jalan Jl. Arumba No.31, Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Anak Saleh (YPAS). SD-AS memiliki tujuan untuk mengembangkan pendidikan Islam berkualitas di bawah panji-panji al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas dengan pengembangan wadah Panca Karakter Anak Saleh yang menjadi ciri khas di Sekolah Anak Saleh hingga tingkat-tingkat selanjutnya.

Konsep inklusi yang diusung oleh SD-AS, seiring dengan nama branding sebagai “Sekolah Ramah Anak”, yang mana SD-AS memang membuka lebar pendaftaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) sejak 2005. Karakteristik PDBK yang diterima di sekolah ini adalah PDBK yang menyandang disabilitas secara mental, di antaranya *slow-learner*, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*, *speech delay*, *spectrum autism*, *Autism Spectrum Disorder (ASD)*, *Global development delay (GDD)*, dan lain sebagainya. Adanya kriteria penerimaan ini disesuaikan dengan fasilitas, akomodasi SDM, dan pelayanan yang telah dimiliki SD-AS sendiri.

Di SD-AS, PDBK memiliki kesempatan dan fasilitas yang sama dengan siswa reguler lainnya, di mana ada beberapa tambahan akomodasi yang diberikan untuk memudahkan PDBK belajar. Salah satunya adalah dengan memberi kesempatan PDBK untuk belajar di kelas dengan siswa reguler lainnya didampingi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK). Tiap-tiap PDBK akan memiliki 1 orang GPK yang kompeten sesuai dengan kebutuhan PDBK. Secara rinci, SD-AS memiliki 33 PDBK yang diampu oleh 23 GPK.

Sedangkan untuk fasilitas khusus inklusi SD-AS juga memiliki 2 ruangan khusus untuk PDBK yang dinamai dengan Ruang Inklusi, di mana di kelas tersebut PDBK akan diberi *treatment* tambahan sesuai dengan kebutuhan dan ketunaannya. Kelas tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan PDBK bersama dengan GPK-nya.

Secara umum, untuk kurikulumnya dirancang secara terpadu, SD-AS menggunakan penggabungan antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum Internal. Kurikulum Nasional sebagai acuan standar kompetensi minimal, sedangkan Kurikulum Internal Sekolah Dasar Anak Saleh untuk memberikan nilai tambah berupa nilai-nilai Keislaman dan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Untuk PDBK akan diberikan beberapa penyesuaian, baik disederhanakan ataupun dirancang Program Pembelajaran Individu (PPI), tergantung dengan ringan-beratnya disabilitasnya. Adapun bagi PDBK yang sudah mulai

mandiri dan bebas dari disabilitasnya, maka dia akan secara *full* belajar di kelas reguler tanpa penyederhanaan ataupun GPK.

PPI adalah salah satu bentuk perencanaan pembelajaran terpadu yang disusun khusus untuk PDBK oleh pelaksana sekolah. Tim penyusun PPI terdiri dari Kepala Sekolah, GPK, Wakil Kepala Sekolah (Waka) Kurikulum, wali murid, bahkan terapis dan psikolog. PPI berguna seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi PDBK, sehingga PPI ini memuat diagnosa PDBK; perilaku PDBK; kondisi belajar PDBK, baik secara kognitif, kemampuan motorik kasar dan halus, kemampuan komunikasi, kemampuan sosial, dan kemandirian; tujuan dan rencana jangka panjang maupun pendek, disertai dengan metodenya; dan yang terakhir instruksi dan adaptasi bagi PDBK. PPI inilah yang akan digunakan oleh semua pihak yang bersangkutan untuk bersinergi membantu dan mendukung proses belajar PDBK di sekolah, di rumah, maupun di tempat terapi.

2. Sekolah Dasar Islamic Global School

Sekolah Dasar Islamic Global School (SD-IGS) beralamatkan di Jl. S. Supriadi No.35, Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dan bernaung pada Yayasan “Dian Nusantara Malang”. SD IGS adalah salah satu sekolah inklusi ramah anak yang berorientasi untuk turut mencerdaskan dan mempersiapkan anak bangsa berkarakter Islami dan berkualitas. SD IGS menggunakan sistem *Full Day School* dalam rangka pembiasaan karakter siswa agar mudah dibentuk selama di

sekolah melalui lingkungan yang Islami, latihan disiplin dan daya tahan belajar, serta pembiasaan perilaku mulia dengan adanya sinergi pendidik dan siswa yang intensif. Motto yang diterapkan SD IGS pada siswa adalah 6B, beriman, bertaqwa, berilmu, berakhlak, berkarakter, berprestasi.

SD-IGS dikenal sebagai sekolah inklusi sejak tahun berdirinya, yakni 2014, yang mana dalam orientasi membentuk lingkungan sekolah yang inklusi, SD IGS memberikan layanan tambahan bagi siswa disabilitas/berkebutuhan khusus, yakni sistem pembelajaran *Pull Out*, di mana PDBK akan belajar di 2 kelas, yakni kelas reguler dan Kelas Sumber. Kelas Sumber adalah kelas yang dilaksanakan sebagai penunjang pembelajaran akademik bagi siswa disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ketunaannya. Dalam 5 hari aktif sekolah, siswa disabilitas diberi kesempatan untuk mengikuti kelas reguler bersama teman-teman lainnya selama 3 hari, dan 2 hari sisanya belajar di Kelas Sumber bersama Guru Pendamping Khusus (GPK) inklusi. Secara administrasi pun, siswa disabilitas akan mendapatkan 2 catatan raport yang berbeda, yakni catatan akademik di kelas reguler, dan catatan perkembangan di Kelas Sumber.

Adapun dalam kurikulumnya, SD IGS menggunakan kurikulum terpadu, yakni dengan memadukan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional 100% dan kurikulum Departemen Agama serta dipadukan

dengan kurikulum khusus. Kebijakan unggulan dalam pengelolaan pembelajaran yang telah diterapkan sebagai berikut:

1. Kelas ideal, tiap kelas maksimal hanya untuk 28 siswa
2. *Team teaching*, dua guru dalam satu rombongan belajar untuk kelas 1 - 3.
3. Penerapan pembelajaran sesuai dengan kurikulum
4. Strategi pembelajaran dengan model terbaru (*CTL*, *Joyful*, dan *Pakem*) dan berbasis lingkungan (*Studi Empiris*)
5. Pembinaan karakter unggulan untuk setiap bidang studi sesuai profil pelajar Pancasila.
6. Remedial dan pengayaan berkelanjutan
7. Gerakan Cinta Membaca (literasi)
8. Gerakan Cinta Bersih dan Sehat

Semua tujuan dan kurikulum pembelajaran yang telah ditetapkan tersebut didukung oleh beberapa fasilitas penunjang, di antaranya adalah

1. Gedung dan arena bermain di atas lahan + 10.000 m²
2. Ruang kelas bersih, rapi dan pencahayaan yang cukup
3. Ruang UKS
4. Laboratorium computer
5. Perpustakaan
6. Ruang Makan
7. Masjid

8. Kebun dan taman toga
9. Kantin
10. Lapangan yang luas

Menapak tahun ke tahun SD IGS terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan dengan program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan kepada guru-guru. Melalui pelatihan ini diharapkan guru-guru memperoleh peningkatan kompetensi dan ketrampilan mengelola pembelajaran yang dinamis dan inovatif dengan menerapkan praktik terbaik (*The Best Practice*) dalam pembelajaran di kelas. Pelatihan ini kemudian akan dibawa ke dalam kelas sebagai bekal guru untuk membingkai seluruh rangkaian pembelajaran dengan aktivitas menyenangkan (*joyfull learning*) sekaligus mencerdaskan (*smart learning*) baik bagi perkembangan *Intelligence Quotient* (IQ), *Emotional Quotient* (EQ) maupun *Spiritual Quotient* (SQ) siswa.

B. Paparan Data Sekolah Dasar Anak Saleh Kota Malang

Paparan data hasil penelitian SD-AS diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 narasumber utama, yakni Bapak Andreas Setiyono, S.Pd. Gr., M.Kom., atau Bapak Andre selaku Kepala SD-AS; Ibu Binti Saniatul M, S.Pd., M.Pd., Gr., atau Ibu Sani selaku Wakil Kepala SD-AS bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana; dan Ibu Heni Hidayah, S.Pd., M.Pd., Gr., atau Ibu Heni selaku Wakil Kepala SD-AS bidang Kurikulum. Selain itu peneliti juga berupaya mengumpulkan data penelitian melalui hasil observasi dan dokumentasi.

1. **Proses Perencanaan Dan Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK**

Pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berfokus pada rumusan masalah pertama, yakni proses perencanaan dan implementasi kebijakan akomodasi PDBK yang terdiri dari tahap interpretasi melalui faktor komunikasi; tahap organisasi melalui faktor sumber daya dan faktor struktur birokrasi; serta tahap aplikasi melalui faktordisposisi yang terjadi di SD Anak Saleh Kota Malang.

a. Komunikasi

Menurut hasil observasi peneliti, dalam tahap interpretasi terkait kebijakan akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SD-AS pada faktor komunikasi ditandai dengan adanya perencanaan dan penyampaian informasi program inklusi sebelum sekolah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pola komunikasinya dilakukan pertama kali secara *bottom to top*, yang maknanya adalah pihak sekolah (*Bottom*) menyampaikan kepada pimpinan yayasan (*Top*) untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan untuk PDBK sesuai dengan permintaan masyarakat. Setelah adanya *approvement* dari pihak yayasan, maka pihak sekolah akan melaksanakan rapat kerja untuk menyepakati banyak hal terkait program inklusi, baru menkomunikasikannya kepada masyarakat secara masif melalui berbagai media (*top down*).⁷⁷

⁷⁷ Peneliti, *Hasil Observasi di Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andre, yang mana berbunyi:

“Peran kami ini sebagai sekolah inklusi adalah memberikan tempat atau wadah untuk anak-anak ini mengenyam pendidikan secara reguler, artinya anak-anak kita ini juga butuh tempat atau butuh sekolah dimana mereka juga bisa diakui di masyarakat, itu satu. dan yang kedua mereka juga bisa mendapatkan ijazah yang reguler gitu di sekolah pada umumnya karena mungkin kita tahu ya, di tahun-tahun sebelumnya masih minim sekali sekolah-sekolah yang mau menerima anak berkebutuhan khusus. sehingga pola komunikasi ini yang kami sampaikan ke stakeholder, pimpinan, kemudian ke teman-teman bahwa mereka ini juga punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama, untuk bersekolah di sekolah umum. sehingga pola komunikasi yang kami lakukan sebenarnya bottom to top gitu ya. Jadi kami yang mempunyai inisiatif, kemudian kami sampaikan ke tim Pimpinan kemudian baru kami upayakan secara masif untuk menyampaikan informasi ini ke masyarakat, seperti itu.”⁷⁸

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan fasilitas dan pelayanan akomodasi PDBK di SD-AS berangkat dari permintaan Masyarakat, kemudian disampaikan kepada pihak penyelenggara sekolah, dan kembali dikomunikasikan kepada masyarakat.

Dalam pengkomunikasian kepada masyarakat tersebut, SD-AS juga menegaskan bahwa terdapat beberapa kriteria PDBK yang diterima sesuai dengan kemampuan SD-AS, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia (SDM), yakni PDBK yang

⁷⁸ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

menyandang disabilitas secara mental, di antaranya slow-learner, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), speech delay, spectrum autism, Autism Spectrum Disorder (ASD), Global development delay (GDD), dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Andre, yakni:

“Intinya kami pada dasarnya itu sekolah yang menerima semua jenis peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi memang kami kategorikan yang kami mampu gitu ya. Artinya ada beberapa kategori yang memang kami belum mampu dan belum ada tenaga. Nah itu kami belum berani mengakomodasi, contoh misalkan kayak tunarungu tunanetra tunadaksa, nah itu kami belum. Karena secara physically, secara SDM juga kami belum ada. jadi kami baru menerima yang sifatnya mungkin dalam kategori yang enggak ke disabilitas fisik ya banyak cuman lebih kepada saraf atau gangguan mentalnya lah, seperti Authism, ADHD, Slow learner, dan Learning Disability.”⁷⁹

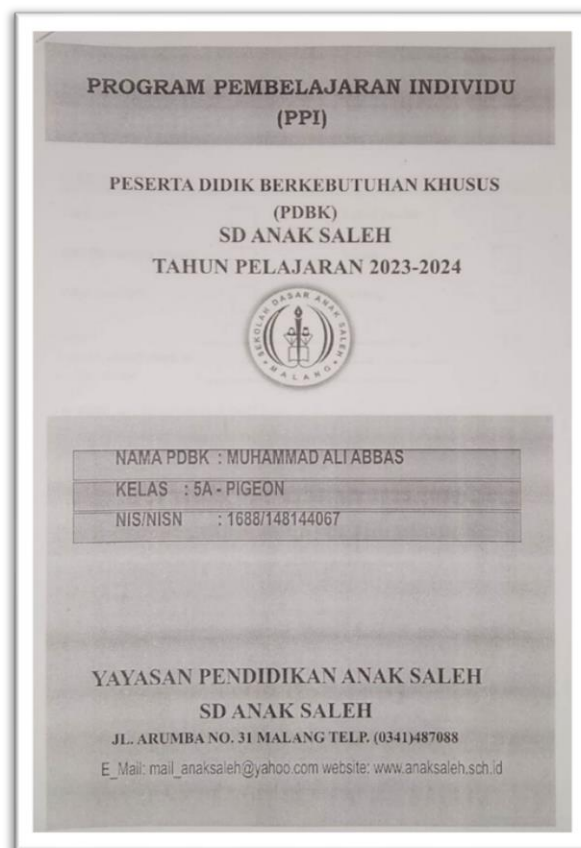
Pernyataan tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Ibu Sani, yang mana pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

“Kami menerima siswa PDBK di mana penerimaan siswa PDBK ini disesuaikan dengan kemampuan kami dari segi fasilitas dari segi guru dan lain sebagainya. Tidak semua anak berkebutuhan khusus kita terima, tetapi kami ada beberapa hal yang perlu disampaikan di khalayak umum bahwasanya ada beberapa PDBK yang tidak diterima karena tidak ada fasilitas seperti misalnya tunanetra, kemudian misalnya tidak bisa bicara dan lain sebagainya. nah tapi kalau misalnya seperti ADHD, autis, slow learner dan sebagainya, itu masih kita terima. Kenapa kita mencanangkan selain inklusi, karena kami mempunyai fasilitas untuk pembelajaran anak-anak tersebut. jadi secara untuk proses penerimaan kita memang mengklasifikasikan gitu tidak semuanya kita terima.”⁸⁰

⁷⁹ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

⁸⁰ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana, 22 Juli 2024.*

Adapun proses implementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK yang terkait dengan komunikasi, SD-AS memiliki salah satu alat komunikasi yang unik, yakni PPI. Sejatinya PPI ini adalah perangkat pembelajaran yang disesuaikan untuk PDBK, namun karena proses penyusunannya yang baik dan melibatkan banyak pihak, baik sekolah, orang tua, dan terapi atau bahkan psikolog, peneliti menilai bahwa PPI ini juga berguna sebagai jembatan komunikasi yang stabil dan efektif untuk menunjang akomodasi bagi PDBK.



Gambar 4.1 Program Pembelajaran Individu (PPI) SD Anak Saleh Kota Malang

PPI berisi tentang rincian kebutuhan dan disabilitas PDBK, yang kemudian disusunlah rincian target dan metode pembelajarannya sesuai dengan kemampuan PDBK. PPI ini kemudian menjadi bahan acuan wali kelas, guru mata pelajaran (mapel), GPK, orang tua, terapis, dan psikolog untuk mengetahui kondisi PDBK selama proses pembelajaran dan menentukan pembelajaran yang terbaik bagi PDBK. Serta PPI ini juga berperan untuk menyelaraskan informasi, sehingga semua pihak yang terkait dapat bersama-sama mendukung pembelajaran bagi PDBK.

Pernyataan di atas sesuai dengan informasi yang didapat dari Ibu Sani, yang menyatakan bahwa:

“Kita juga ada yang namanya PPI, yaitu Program Penyesuaian Individu, untuk anak sesuai dengan kebutuhan PDBK. jadi Setiap anak ini punya target masing-masing dan tidak bisa disamakan setiap PDBK gitu. orang tua, GPK, waka kurikulum, kepala sekolah, terapis dan psikolog, kita undang jadi satu untuk menyusun yang namanya PPI tadi. dari beberapa orang yang kita undang itu Mereka memberi saran dan masukan sekiranya tujuan pembelajaran ke depan seperti apa karena sebelumnya sudah sampai sini misalnya maka perlu disampaikan dari terapinya Oh diterapi sudah sampai A, berarti tahap selanjutnya adalah B. isinya seperti itu di sekolah dilaporkan, di rumah juga seperti apa. jadi seperti itu ada dari ceritanya ada dari orang tuanya kondisi saat ini seperti apa. ini dilakukan di awal tuh supaya lebih jelas tujuan pembelajaran ke depan seperti apa. semuanya orang yang terlibat dalam penyusunan ini besar harapannya memberi saran supaya mereka kan yang tahu di lapangan ya yang tahu bagaimana prosesnya gitu. prosesnya anka ini perkembangannya sampai gimana. jadi memang rinci, karena kami namanya sudah sekolah inklusif tidak hanya di pembelajaran aja tapi kita keseluruhan. jadi mulai proses

pembelajaran seperti apa tujuannya seperti apa hal yang mau dicapai seperti apa.”⁸¹

Sedangkan terkait dengan proses penyusunan PPI ini dijelaskan oleh Bapak Andre, yang menyatakan sebagai berikut:

“Wali kelas, guru kelas, yang ada harus memahami minimal tentang kondisi awal peserta didik ini karena memang kita selalu melakukan yang pertama kali adalah identifikasi pada peserta didik. yang kedua kemudian kami melakukan assessment mengidentifikasi (melalui) assessment lalu kita melakukan planning matrix, nah baru menuju ke PPI tersebut. Jadi proses itu kita lakukan secara bersama-sama gitu. Oh misalkan si anak ini kok dia memang butuh bantuan ya sepertinya. Oke kita lakukan yaitu assessment. Lalu kita baru menduga anak ini masuk kategori seperti apa. Jadi kita tidak menjustifikasi karena memang kita bukan lembaga semacam kayak terapi gitu atau konselor yang bisa mengeluarkan hasil anak ini masuk kategori atau memiliki ketunaan apa. Jadi kita hanya menduga. Nah itu baru kita sarankan orang tua, baru kita lanjutkan planning matrix-nya. Ini loh di kelas 1 misalkan untuk materi bilangan materinya dari 1 sampai 100 nah kemampuan Ananda ini sampai mana, Oh dia hanya sampai 1 sampai 10. Oke jadi itu yang kita berikan. Nah maka otomatis itu kerjasama antara guru kelas komunikasi antara guru kelas komunikasi antara wali kelas dan guru GPK pasti ya sudah connect gitu. karena PPI ini kan disusun berdasarkan materi utama yang ada di kelas tersebut. jadi sudah pasti semua guru memahami itu walaupun secara implisit mereka tidak secara langsung menyampaikan, tetapi sudah paham.”⁸²

Selain PPI, SD-AS juga menerapkan beberapa alat komunikasi lain yang berkaitan dengan administrasi pembelajaran, di antaranya adalah jurnal harian, report, buku penghubung, dan raport. Administrasi tersebut berperan sebagai alat komunikasi yang

⁸¹ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana, 22 Juli 2024.*

⁸² Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

menginformasikan terkait hasil pembelajaran PDBK dalam skala harian. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapat dari Bapak Andre yang menyatakan bahwa:

“Kalau Komunikasi itu kita sebenarnya intens ya. Maksudnya intens itu dalam artian para GPK ini mempunyai jurnal harian, yang mencatat tentang kegiatan apa saja, atau kejadian apa saja yang mereka lalui bersama PDBK di hari tersebut. Nah jurnal itu biasanya juga dibaca oleh guru kelasnya, oleh saya Kepala Sekolahnya, juga kadang kita berikan report ini ke orang tua gitu. nah melalui jurnal tersebut artinya selain komunikasi yang secara langsung, kami juga menggunakan jurnal harian itu sebagai pendukungnya gitu.”⁸³

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Heni, yang menyatakan bahwa:

“Setiap hari teman-teman GPK kami ada jurnal baik itu jurnal laporan sistematis kepada sekolah maupun kepada orang tua karena ciri anak-anak mereka membawa buku tugas atau buku komunikasi untuk memahamkan ke orang tua bahwa memberitahu ini loh mama seperti ini tadi belajarnya seperti ini tadi dia mungkin apa namanya positifnya di sini. ‘Nah ini mungkin yang perlu dibina di rumah nih Ma’, ‘perlu diulang lagi menuju ini perlu dilatih atau diterapi seperti itu’. Sehingga dalam kesehariannya kita selalu ada komunikasi gitu atau jurnal itu tadi.”⁸⁴

Namun, selain komunikasi secara administratif, SD-AS juga melakukan komunikasi secara langsung apabila diperlukan. Misalnya apabila PDBK mengalami kesulitan belajar di luar yang telah diprediksi dan membutuhkan tindakan lebih lanjut, maka sekolah akan melakukan visitasi ke rumah PDBK yang bersangkutan.

⁸³ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

⁸⁴ Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum, 22 Juli 2024.*

Adapun hasil wawancara tersebut didukung oleh hasil dokumentasi yang telah peneliti dapatkan, yakni Profil SD Anak Saleh, pada bab yang menjelaskan dukungan komite sekolah serta masyarakat tentang, termasuk wali PDBK, yang mana sebagaimana berikut:

Dukungan Komite Sekolah Serta Masyarakat

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan sekolah, perlu ada kerja sama yang baik antarasekolah dan orang tua. Peran orang tua yang diharapkan sekolah adalah sebagai berikut:

1. Ikut memantau kemajuan belajar peserta didik secara terus-menerus. Memberikan catatan-catatan atau hasil yang dicapai peserta didik, berkomunikasi dengan guru (melalui buku penghubung atau melalui telepon langsung), membaca buku rapor dengan cermat, atau memberikan usulan-usulan atas proses belajar peserta didik.
2. Melanjutkan kegiatan belajar peserta didik di sekolah dengan kegiatan belajar di rumah yang seiring. Caranya dengan menambah jam belajar di rumah, menggunakan Bahasa Inggris ketika berkomunikasi di luar sekolah, mendukung bakat khusus peserta didik dengan menghadirkan guru privat, atau mengikutkan peserta didik dalam lomba-lomba.
3. Berperan dalam pengadaan sarana dan prasarana belajar peserta didik, sebagai bentuk jihad fisabilillah dan/atau amal jariyah. Sekolah terbuka dalam menerima usulan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar.
4. Berperan dalam kegiatan belajar-mengajar baik indoor maupun outdoor sebagai guru atau narasumber ahli (expert) dalam bidang tertentu. Misalnya, jika ada orang tua peserta didik yang amat fasih dalam bahasa Inggris, sekali waktu akan diminta sekolah untuk mengajar dan bermain bersama anak-anak dalam bahasa Inggris.
5. Berperan sebagai koordinator atau fasilitator pada kegiatan-kegiatan di jenjang kelasnya

Malang, 15 Juli 2024
Kepala Sekolah,

ttd

ANDREAS SETIYONO, S.Pd.Gr. M.Kom

Gambar 4.2 Profil SD Anak Saleh Bab Dukungan Komite Sekolah Serta Masyarakat

Pada poin pertama disebutkan bahwa orang tua, selaku wali PDBK berkewajiban untuk mendukung proses pembelajaran PDBK melalui komunikasi yang aktif, masif, dan bersinergi dengan pihak sekolah, melalui pemantauan kemajuan dan perkembangan belajar PDBK. Bentuk komunikasi ini dapat berupa catatan untuk memberi saran/usulan ataupun menyampaikan hasil perkembangan PDBK di rumah, membaca rapor perkembangan PDBK, dan lain sebagainya. Melalui komunikasi yang intens dan kolaboratif ini, orang tua dan pihak sekolah dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung tumbuh kembang PDBK. Dengan saling bertukar informasi dan bekerja sama, keduanya dapat menyusun strategi pembelajaran yang paling efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu PDBK. Selain itu, keterlibatan aktif orang tua juga memberikan rasa aman dan dukungan emosional yang sangat penting bagi PDBK dalam menghadapi tantangan belajarnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi SD-AS terkait implementasi kebijakan akomodasi untuk PDBK terdiri dari beberapa pendekatan:

- 1) *Bottom to top* atau *Bottom Up*, yakni komunikasi dari pelaksana sekolah kepada pihak Yayasan.
- 2) *Top down*, yakni komunikasi dari pelaksana sekolah kepada masyarakat dan wali PDBK.

Sedangkan untuk menjaga efektivitas dan keselarasan interpretasi dan konsistensi komunikasi, pihak SD-AS menerapkan 2 jenis komunikasi pula, yakni:

- 1) Komunikasi langsung (*direct communication*), yakni komunikasi yang dilakukan secara langsung, seperti tatap muka, dan visitasi.
- 2) Komunikasi tidak langsung (*indirect communication*), yakni komunikasi yang dilakukan melalui perantara, baik secara administrasi (melalui PPI, jurnal harian, buku penghubung, dan lain sebagainya), maupun media sosial.

Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.3 Bagan komunikasi SD-AS

Keterangan:

- : Komunikasi tidak langsung
- : Komunikasi langsung
- : Komunikasi langsung dan tidak langsung

Kedua jenis komunikasi ini mampu meminimalisir *miss communication* antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK, bagi pejabat sekolah, wali kelas, GPK, dan wali PDBK. Sehingga dengan komunikasi ini, sekolah dapat berhasil mendorong terjadinya transmisi komunikasi efektif, dan interpretasi yang selaras serta transparan.

b. Sumber Daya

Dalam tahap organisasi, hal pertama yang menjadi *concern* SD-AS adalah menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memadai, sesuai dengan kebutuhan PDBK yang sudah masuk dan dinyatakan resmi menjadi siswa di SD-AS. Oleh karena itu SD-AS sangat ketat dalam perekrutan GPK. Mereka akan diwawancarai terkait keahliannya, komitmennya, dan juga telah diberikan *briefing* terkait *job description* yang harus dilakukan sebagai GPK.

Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Ibu Sani:

“Pada awalnya jadi kalau kita menghire GPK pastinya kita ada yang namanya tahap wawancara. Dalam artian masih perekrutan, gitu ya. kalau kita yang dibutuhkan adalah GPK kita agak panjang ya, untuk wawancaranya tuh mulai dari keahliannya seperti apa, kita beri sedikit problematika, misalnya anak yang berkebutuhan khusus kita kasih lah latar belakang atau satu problem kepada orang itu, kita dengarkan dulu bagaimana responnya calon GPK ini. Kalau sepertinya dia berkomitmen di SD Anak Saleh sesuai dengan apa yang kita inginkan mulai dari komunikasinya atau kemampuannya kemudian yang berkaitan dengan proses profesionalisme sebagai GPK kok sesuai dari awal, ya berarti kita lanjut sebagai perekrutan GPK-nya itu. Jadi dalam detail tersebut yang kita bicarakan di awal sebagai bentuk komitmen juga kalau nanti dia

nanti lanjut di SD Anak Saleh lagi kalau ada program seperti ini, ada masalah seperti ini, bagaimana anda menyelesaikannya. jadi di awal wawancara itu bahkan kita ada dua kali sesi wawancara, yaitu wawancara skill dan juga wawancara profesional. Juga wawancara dan kewajiban ketika diterima di SD Anak Saleh.”⁸⁵

Pernyataan tersebut juga selaras dengan hasil wawancara Ibu

Heni:

“Kami juga menghire dan mencoba untuk memberikan pelayanan yang bagus dan yang baik dengan memastikan bahwa SDM yang masuk, SDM yang kami hire, SDM yang kami dapat, itu benar-benar sesuai punya pengalaman dan intinya punya hati niat dan kemauan. Karena tidak semua orang punya ilmu tapi terkadang tidak mau. Mau walaupun tidak punya ilmu itu lebih baik kita terima. Kita bilang kita ada pembinaan, kita ada banyak sekali di diklat-diklat yang kita lakukan gitu. Daripada punya ilmu, sudah expertnya, tapi dia enggak punya kemauan malah akhirnya setengah-setengah. Kasihan anak-anak karena itu juga makhluk Allah. Nah itu loh yang kita pikirkan seperti itu. Yang pertama ketika kita meng-hire kita sudah memberitahu bahwa sekolah inklusi dengan kebijakan kurikulum seperti yang tadi saya sampaikan, maka ketika sudah siap menerima menjadi guru GPK atau Guru Pendidikan Khusus, berarti beliau harus siap dengan konsekuensi dan itu tadi ya, nanti fokusnya bukan ke akademik sehingga dia harus ada ekstra untuk penyederhanaan, penyesuaian dengan anaknya, dari mana? Dari psikolog tadi. Jadi di awal sebelum sebelum dia terjun ke kami, kami pasti sudah memberi pemahaman dulu.”⁸⁶

Bapak Andre menambahkan informasi sebagaimana berikut:

“Jadi kami di SD Anak Saleh tidak hanya asal menerima kemudian tidak memfasilitasi, tetapi kami benar-benar konsen untuk bagaimana anak-anak PDBK itu kami berusaha keras untuk merelakan mereka. artinya misalkan dia awalnya ADHD gitu ya, nah kita berharapnya setelah lulus dari SD Anak Saleh atau mungkin pas kelas berapa gitu, dia sudah bisa menuju ke pembelajaran yang reguler itu beberapa siswa memang bisa ke arah sana. Nah otomatis kami pada saat awal, itu selalu

⁸⁵ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana, 22 Juli 2024.*

⁸⁶ Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum, 22 Juli 2024.*

memilih SDM yang tepat untuk anak-anak ini. Misalkan ADHD nih, siapa di SDM kita yang pernah punya pengalaman untuk menangani anak-anak seperti ini dan itu selalu kami rolling setiap tahunnya, jadi tidak terlalu dengan nyaman dengan satu guru aja.”⁸⁷

Sistem rolling tersebut diterapkan dengan maksud agar GPK dapat merasakan, saling berbagi dan berkolaborasi untuk menghadapi PDBK dengan macam-macam karakteristiknya.

No.	Nama GPK	Plotting
1.	Nila Fadilah, S.Pd	Guru Pendamping Khusus 1A
2.	Nurul Asri Fitriyah	Guru Pendamping Khusus 1B
3.	Afriska Nur Azizah, S.Pd	Guru Pendamping Khusus 1B
4.	Ika Puspitasari, S.E	Guru Pendamping Khusus 1C
5.	Rikha Dwi Rachmawati, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 1C
6.	Hilda Aulia Arafah, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 1D
7.	Desilfa Dwi Nursavitri, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 1D
8.	Ayu Septian Nur Andini, S.Pd	Guru Pendamping Khusus 2A
9.	Razza Qurnia Dewi, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 2C
10.	Arik Wijayanto, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 2D
11.	Tursina Ainun Nisa' Caniago, S.Sos	Guru Pendamping Khusus 3B
12.	Selviya Anggraini, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 3D
13.	Anindhya Faza Arzaqi, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 3D
14.	Venorica Afdela, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 4A
15.	Suwaibatul Aslamiyah, A.Md. Keb	Guru Pendamping Khusus 4B
16.	Sukmawati Megawijayanti Susanto, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 4C
17.	Milatun Nafisah, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 4D
18.	Yossy Diko Pratamayuda, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 5A
19.	Khofifah Indar Khoiroh, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 5C
20.	Auliya Adilah Ufairo, S.Pd	Guru Pendamping Khusus 5D
21.	Ari Iswahudi, S.Psi	Guru Pendamping Khusus 6A
22.	Yahya Firmansah, S.Pd	Guru Pendamping Khusus 6B
23.	Ahmad Shobirin, S.Pd	Guru Pendamping Khusus 6D

Gambar 4.4 Data GPK SD Anak Saleh Tahun Pelajaran 2024/2025

Setelah melakukan proses rekrutmen, SD-AS menyediakan SDM dengan jumlah yang memadai untuk melayani pembelajaran PDBK. Diketahui bahwa SD-AS menggunakan konsep 1 GPK untuk

⁸⁷ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

1 PDBK, namun jika PDBK menyandang ketunaan yang ringan, maka bisa diterapkan 1 GPK untuk 2 PDBK dengan ketunaan yang sama. Menurut hasil dokumentasi, SD-AS memiliki 33 PDBK dan 23 GPK, dengan rincian sebagai berikut:

Selain SDM, PDBK di SD-AS juga akan merasakan fasilitas yang sama dengan siswa reguler lainnya, namun ditambahkan beberapa fasilitas khusus untuk PDBK demi menunjang pembelajarannya. Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Ibu Sani:

“Kalau untuk fasilitasnya sih sama sebenarnya. semua anak-anak PDBK bisa menikmati masjid, dia juga memiliki kegiatan outdoor, outing, sama, tidak ada yang membedakan fasilitas, tambahannya mungkin ada seperti ruang sumber. Sebenarnya ruang sumber itu juga bisa digunakan untuk anak reguler, tapi biasanya anak-anak itu tidak menggunakan itu karena memang beda. Di situ ada banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk treatment anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu sih.”⁸⁸

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara Bapak Andre:

“Jadi kami punya dua ruang sumber di atas, atau ruang inklusi dan itu kita bagi dua ada kelas rendah dan kelas tinggi. Nah yang kelas rendah ini ini kebutuhannya apa, maka fasilitas yang dibutuhkan di sana itu berbeda dengan yang di kelas tinggi. Misalkan contoh kalau di kelas rendah mereka masih perlu banyak sekali fasilitas yang berbaur sensorik, motorik halus, motorik kasar; tapi di kelas tinggi mereka butuh yang sudah mengarah pada bagaimana pengendalian dirinya, jadi lebih kepada mainan-mainan yang sudah mengarah ke berpikir, terus menyelesaikan sesuatu, ya walaupun itu masih sederhana ya untuk kita tapi belum buat mereka itu sangat berat sekali. Jadi secara sarana dan prasarana SDM pun sudah kami pasang sedemikian rupa supaya anak-anak benar-benar mendapatkan

⁸⁸ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana, 22 Juli 2024.*

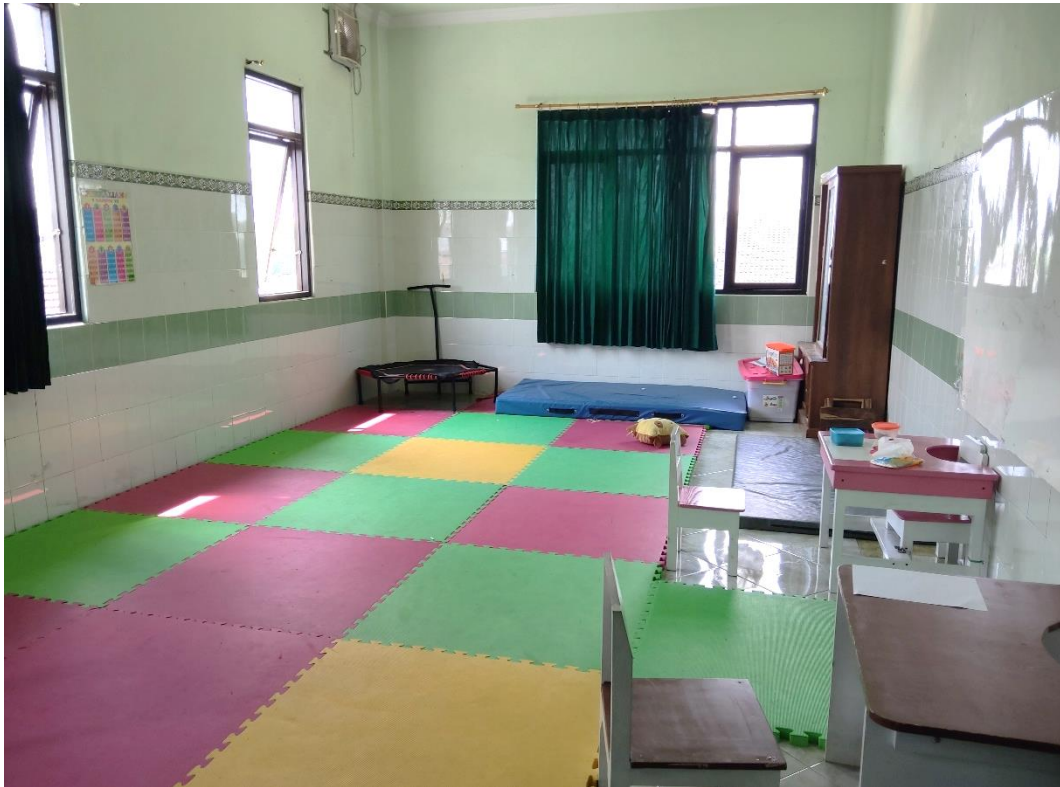
ruang, benda-benda, mendapatkan wadah juga ya, termasuk mendapatkan pembimbing yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.”⁸⁹

Hasil wawancara tersebut didukung dengan adanya hasil dokumentasi dan observasi yang peneliti lakukan, kondisi Ruang Inklusi/Sumber yang dimiliki SD-AS dengan kondisi sangat baik, sebagaimana berikut:



Gambar 4.5 Ruang Inklusi SD-AS tampak depan

⁸⁹ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*



Gambar 4.6 Fasilitas dalam Ruang Sumber/Inklusi berupa bangku belajar, papan tulis, trampolin, matras, dan pendukung pembelajaran lainnya

Ruang inklusi dan seisinya merupakan fasilitas tambahan yang disediakan SD-AS kepada PDBK-nya. Ruang inklusi ini secara fleksibel dapat digunakan oleh GPK dan PDBK sesuai dengan kebutuhannya. Data terkait fasilitas ini juga selaras dengan informasi yang diberikan oleh Ibu Heni:

“Di ruang sumber kita mencoba untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada supaya apa mendukung proses pembelajaran itu dan media dari ruangan kita lokal punya dua, kemudian juga perlengkapan-perengkapan seperti lemari, seperti meja konsentrasi kan ada khusus ya memang kalau untuk anak-anak seperti itu ada. Matras juga sudah kita upayakan Alhamdulillah kerjasama dengan Erlangga kita difasilitasi untuk matras. Sehingga ketika anak-anak mungkin dalam kondisi tidak

nyaman dan tidak semut dia harus ngamuk atau tantrum di atas silahkan, mau guling-guling mau apa asal tidak terluka. Nah itu juga fokus kami bahwa boleh dia marah yang mengekspresikan sampai bising, dan selama itu tapi ada ruangan tersendiri, Silahkan mau apa saja, mau menangis-nangis silahkan. Nah itu kita punya ruangan khusus nah itu yang kami prioritaskan untuk anak-anak ya yang memang membutuhkan kekhususan ya di sana gitu. Jadi kita juga menjaga tetap kenyamanan, keamanan, dan pembelajaran yang ada di sana.”⁹⁰

Selain itu, melalui metode dokumentasi, peneliti menemukan sumber daya lainnya yang bersifat implisit, di mana SD-AS juga berusaha memperhatikan dan menyediakan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan PDBK, di antaranya adalah kurikulum reguler bagi PDBK yang disabilitasnya ringan atau hampir sembuh; kurikulum yang disederhanakan bagi PDBK yang disabilitasnya sedang; dan kurikulum yang telah disusun melalui PPI bagi PDBK yang disabilitasnya berat. Hal ini dikonfirmasi sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Heni yang mana sebagai berikut:

“Kurikulumnya anak-anak PDBK itu diferensiasi banget. jadi memang khusus khusus untuk anak tersebut dan tidak bisa distandarisasi untuk anak yang lain. Jadi walaupun kita mengacu pada kurikulum pemerintah tetapi mereka pasti ada penyesuaian-penyesuaian, baik yang slow learner, maupun yang learning disability, autis dan sebagainya, kami fokuskan lebih pada individunya itu sendiri.”⁹¹

⁹⁰ Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum*, 22 Juli 2024.

⁹¹ Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum*, 22 Juli 2024.

Hal ini sesuai dengan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan, terkait data kurikulum yang diterapkan kepada masing-masing PDBK sesuai dengan ketunaannya.

NO	INISIAL PDBK	KLS	KESETARAAN KELAS	KETUNAAAN
1	I.P.A.M.	1A	DISEDERHANAKAN + PPI	AUTIS +ADHD
2	S.K.D.	1A	PPI	AUTIS
3	K.A.R.	1B	REGULER	ASD
4	M.Z.A.D.	1B	DISEDERHANAKAN+PPI	AUTIS
5	E.A.F.	1C	DISEDERHANAKAN + PPI	ELECTIVE MUTISM
6	M.A.C.	1C	REGULER+ DISEDERHANAKAN	ADD
7	A.N.A.	1D	PPI	AUTIS
8	N.R.P.S.	1D	REGULER	NDs
9	L.K.R.R	2A	DISEDERHANAKAN	GDD
10	A.A.S.	2A	DISEDERHANAKAN	GDD
11	M.A.Z.N.A.	2B	REGULER+DISEDERHANAKAN	SLOWLEARNING
12	E.A.S.	2C	DISEDERHANAKAN	ADHD
13	A.S.W.	2D	DISEDERHANAKAN	
14	K.A.P.	2D	DISEDERHANAKAN	ADHD
15	R.A.G.	3A	PPI	AUTIS + SPEECH DELAY
16	M.H.A.	3B	PPI+DISEDERHANAKAN	AUTIS + SPEECH DELAY
17	R.A.A.	3C	PPI	AUTIS + SPEECH DELAY
18	A.M.D.	3D	DISEDERHANAKAN	ADHD + AUTIS
19	A.M.I.	4A	REGULER+DISEDERHANAKAN	KESULITAN BELAJAR
20	N.R.I.	4B	DISEDERHANAKAN	SPECCH DELAY
21	A.Z.A.F.	4C	PPI + DISEDERHANAKAN	SPECTRUM AUTIS
22	S.W.L.	4D	DISEDERHANAKAN	SPECCH DELAY
23	M.A.A.N.	5A	DISEDERHANAKAN	GDD
24	A.K.A.L	5B	DISEDERHANAKAN	
25	R.A.A.	5C	REGULER	KESULITAN BELAJAR
26	A.A.D.	5D	REGULER	SPEECH DELAY
27	M.I.A.A.	5D	REGULER + DISEDERHANAKAN	SPEECH DELAY
28	D.S.	6A	REGULER + DISEDERHANAKAN	KESULITAN BELAJAR
29	M.D.A.	6A	PPI	ASD + GANGGUAN KONSENTRASI
30	M.M.M.	6B	DISEDERHANAKAN	AUTIS + ADHD
31	M.A.S.	6C	PPI	AUTIS
32	R.J.D.	6D	REGULER	SLOWLEARNING
33	M.H.Z.A.A.	6D	REGULER	SLOWLEARNING

Gambar 4.7 Data Kurikulum sesuai Ketunaan PDBK SD Anak

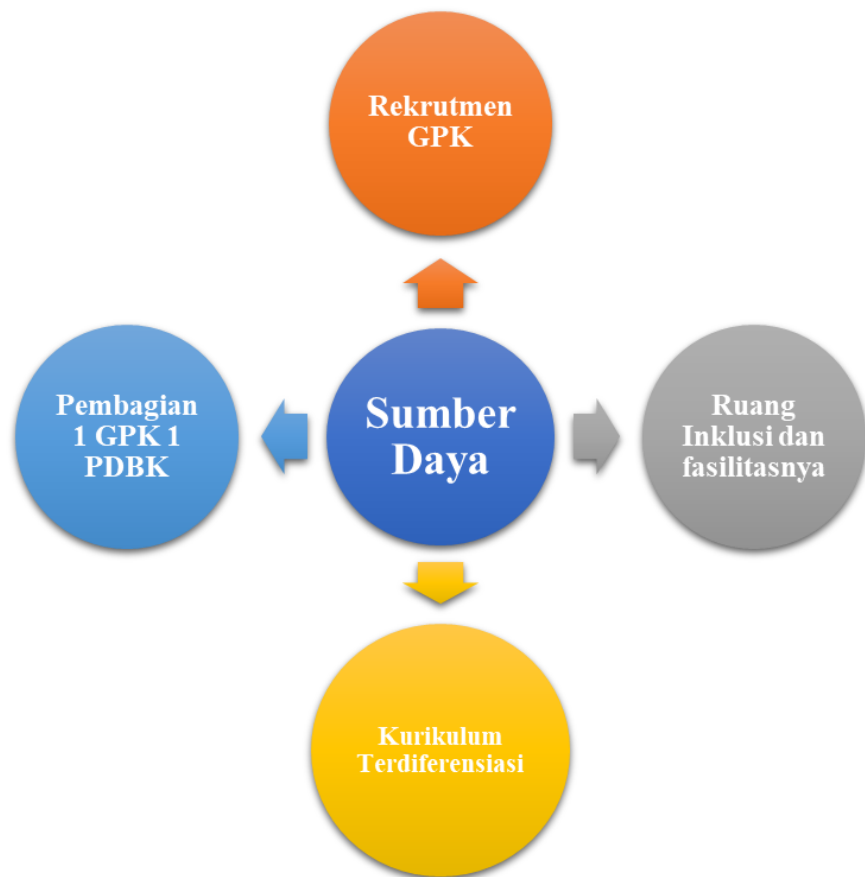
Saleh

SD-AS mengakomodasi kurikulum PDBK dengan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan ketunaannya, apabila PDBK menyangang disabilitas berat, maka kurikulumnya menggunakan PPI; apabila disabilitas sedang, maka menggunakan kombinasi PPI dan kurikulum disederhanakan; apabila disabilitas ringan, maka menggunakan kurikulum yang disederhanakan saja, atau bahkan kurikulum reguler yang sama dengan siswa lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan akomodasi PDBK terkait sumber daya, SD-AS menyediakan beberapa fasilitas tambahan di antaranya:

- 1) SDM yang berkualitas dan kompeten, salah satunya penyediaan 1 GPK untuk 1 PDBK sesuai kebutuhan dan ketunaannya.
- 2) Ruang sumber/inklusi yang berfungsi sebagai ruang pembelajaran tersendiri bagi PDBK yang bersifat fleksibel dapat digunakan sesuai kebutuhan.

- 3) Kurikulum terdiferensiasi, yakni PPI, pembelajaran yang disederhanakan, bahkan kurikulum reguler (jika PDBK dirasa sudah mampu).



Gambar 4.8 Bagan Sumber Daya SD-AS

c. Struktur birokrasi

Pada tahap organisasi, implementasi kebijakan juga perlu diperhatikan struktur birokrasinya, termasuk fragmentasi. Struktur birokrasi sekolah yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan akomodasi bagi peserta didik dengan disabilitas. Struktur yang baik akan memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta adanya koordinasi yang baik antar berbagai komponen sekolah.

Bapak Andre menjelaskan dalam proses wawancaranya sebagai berikut:

“Jadi kalau untuk ini kami akan membagi peran ya. Tentu tidak semuanya Kepala Sekolah yang meng-handling semuanya. Kami punya dua Waka, yaitu bidang akademik dan bidang kesiswaan, artinya dari dua waka ini kami dibantu untuk melakukan koordinasi bersama teman-teman di level bawahnya. Nah nanti di level bawahnya waka ini ada koordinator. Koordinator ini juga nanti berperan membantu guru-guru kelas atau GPK yang di levelnya masing-masing. Sehingga pelibatan para tim pimpinan ya kami menyebutnya, Ya itu sangat membantu sekali untuk saya mengontrol, mengevaluasi, bahkan untuk melakukan umpan balik misalkan terjadi kegiatan-kegiatan yang kurang pas untuk anak-anak. Jadi controlling kami tidak tidak full dilakukan oleh Kepala Sekolah gitu, karena memang guru kami juga lumayan besar gitu ya kalau saya rasa sendirian paling ya satu bulan juga enggak selesai. Maka kami libatkan para pimpinan dan juga guru-guru senior untuk membantu dalam hal pelaksanaan. Nah yang kedua kami juga maksimalkan tenaga seluruh tenaga guru yang ada di sini. Artinya begini mereka juga bisa menjadi istilahnya evaluator atau mereka juga ada bisa menjadi pemberi masukan ketika di pembelajaran-pembelajaran tertentu untuk anak-anak ini. Misalnya ketika dia pembelajaran IPAS, oh mungkin akan pas untuk anak-anak ini kalau dia menggunakan benda yang konkrit, jadi sekolah harus menyediakan. Penyediaan SDM ini juga dilakukan seperti itu. Untuk controlling kami dibantu oleh mereka gitu penggunaannya, pemanfaatannya, sampai ke

penambahannya mungkin. Nah semuanya ada kolaborasi Nah jadi tidak fully top to bottom, karena ya pastinya enggak bisa gitu dan *nonsense* lah kalau misalkan seperti itu. Maka kami melibatkan, bekerja sama, dan berkolaborasi dari tim pimpinan, second layer-nya juga, mulai dari koordinator dan wali kelasnya.”⁹²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Sani, sebagaimana berikut:

“Jadi kalau kami memang sistemnya itu sama. Misalnya saya Waka Sarpras gitu ya, sebenarnya untuk yang PDBK ditangani Usth. Heni, Waka Kurikulum. Tapi saya secara otomatis seperti itu karena di situ ada pasti kaitannya dengan penggunaan fasilitas dan lain sebagainya. Secara birokrasi itu sama, hanya pembedanya adalah mungkin kalau di GPK itu adasistem tersendiri di mana langsung ke manajemen. Kalau untuk guru wali kelas, koordinator, itu di bawah naungan kurikulum saja, tapi kalau untuk yang GPK di bawah manajemen. Kami memang tidak ada koordinator GPK, ya. Japi mereka memang secara otomatis saja. Semuanya sama tidak ada yang khusus jadi koordinator.”⁹³

Adapun Ibu Heni menambahkan informasi sebagai berikut:

“Kalau di inklusi ya semuanya GPK Jadi penanggung jawab ya. Kalau untuk jabatan lebih pada mereka membawakan lebih mereka khusus ya menangani pendidikannya adalah pendidikan anak-anak (PDBK) itu, terbatas. sementara kalau wali kelas kan full 28 tadi, termasuk anak yang inklusi itu tadi. Sehingga untuk kewenangannya lebih luas dan luas sementara untuk GPK dia lebih fokus pada Ananda cuma satu atau dua misalkan tadi dia yang kedua. Namun kita juga memberi pengertian kepada teman-teman GPK ini bahwa dalam satu kelas pun itu siswa Anda cuma memprioritaskannya 60 sampai dengan 80% adalah Ananda Itu tadi nah yang biasanya 40 mungkin 30 mungkin atau yang 20% itu adalah anak-anak dalam kelasnya dia di kelas yang di tempatin gitu. jadi kadang kita minta bantuan itu Coba sih Bu karena ini Kok kayaknya beda ya bantu dong, Oh kayaknya ini nih mereka punya punya ilmunya kan ini Ustadzah ini Ustadz

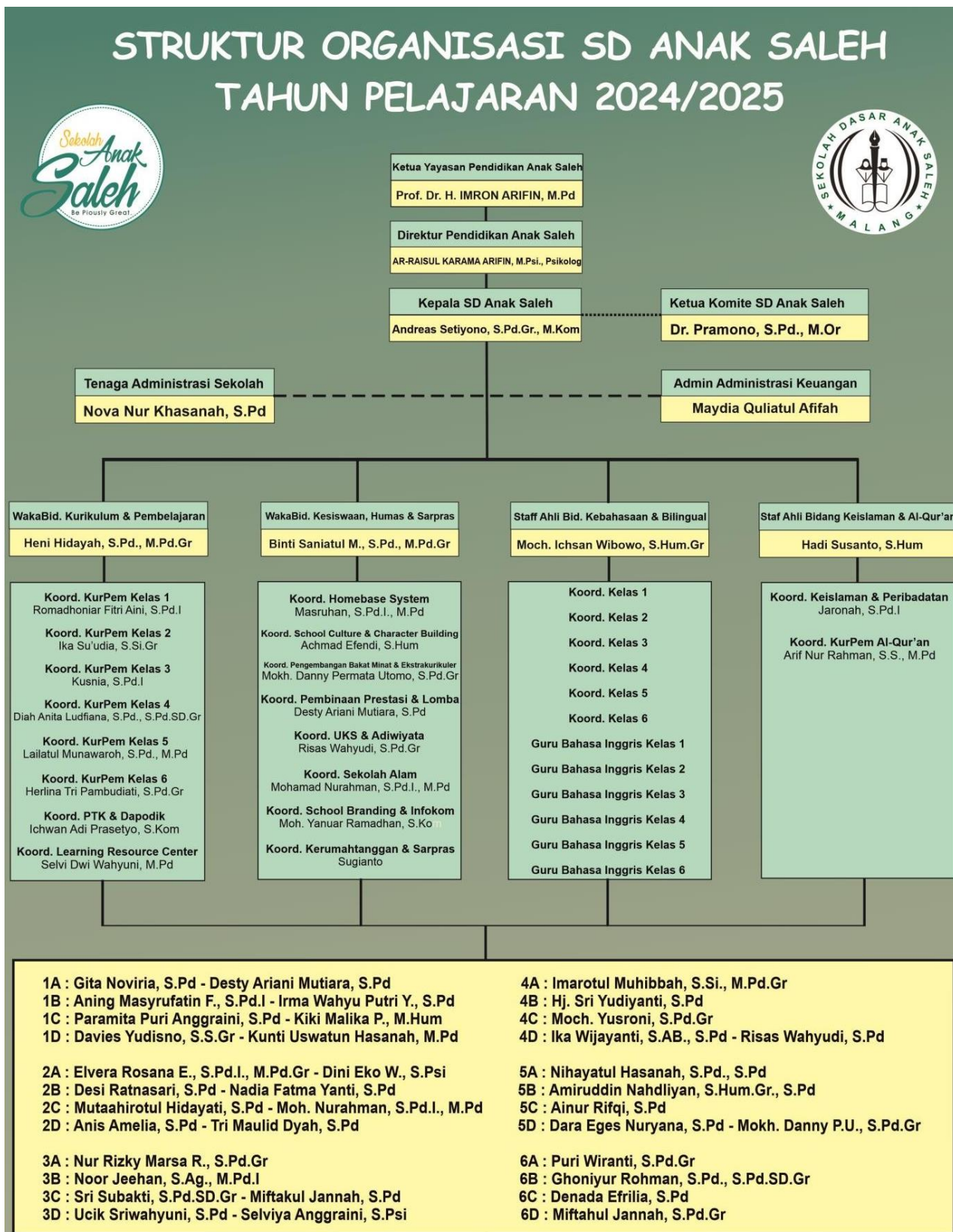
⁹² Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

⁹³ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana, 22 Juli 2024.*

ya ini Ustadz mungkin ini kayaknya perlu diini. Nah baru kita sharing bareng-bareng baru dengan sekolah kalau memang butuh dukungan untuk mengundang orang tua kita undang orang tua Ada apa kok Ananda ada perubahan nih misalkan dengan bantuan dari teman-teman GPK tadi cuman secara kewenangan lebih luas wali kelas, begitu. Kemudian untuk struktur organisasi dalam satu sekolahnya mereka juga kurikulum di bawah kurikulum GPK ini tadi.”⁹⁴

Adapun menurut hasil wawancara dan observasi di atas sesuai dengan data hasil dokumentasi, di mana struktur birokrasi/organisasi SD-AS dilakukan fragmentasi dan pembagian peran dan tugas sebagaimana berikut:

⁹⁴ Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum, 22 Juli 2024.*



Gambar 4.9 Struktur Organisasi dan Rincian Jabatan SDM SD Anak Saleh

Penyesunan struktur organisasi ini berdasarkan dengan kemampuan sesuai pakta ahli yang dimiliki oleh masing-masing SDM. Selain itu, SD-AS juga mempertimbangkan hasil kinerja dan lama masa pengabdian SDM sehingga dapat dibagi peran dan tanggung jawab sesuai dengan porsinya. Struktur organisasi ini dibuat dengan harapan masing-masing SDM dapat bertanggung jawab sesuai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya untuk bekerja sama, kolaborasi, dan bersinergi untuk mencapai tujuan sekolah.

Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang diterapkan di SD-AS menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dan kolaborasi yang kuat antar berbagai komponen sekolah dalam mendukung implementasi kebijakan akomodasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator, guru kelas, dan GPK, tidak terkecuali Guru Pendidikan Al Quran (GPQ), sekolah mampu memberikan layanan yang lebih terintegrasi dan efektif. SD-AS juga menggunakan prinsip fleksibilitas, adaptif, dan akuntabilitas untuk mengimplementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK, baik dari proses perencanaan, pengimplementasian, *controlling*, dan evaluasi.

Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.10 Bagan Struktur Birokrasi SD-AS

d. Disposisi pelaksana

Selanjutnya pada tahap aplikasi, faktor yang diperhatikan adalah disposisi pelaksana. Sebagai sekolah yang telah mem-*branding* diri sebagai inklusi, tentunya disposisi atau kecenderungan tenaga pendidik dalam implementasi kebijakan akomodasi PDBK sangat perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan seiring kebutuhan inklusivitas di sekolah. Kepala SD-AS, Bapak Andre menyampaikan dalam wawancaranya sebagaimana berikut:

“Sebenarnya begini sekolah ini sudah dijadikan sekolah inklusi, maka yang harus ditanamkan pertama kali di SDM ya ataupun siapapun *stakeholder* yang ada di SD Anak Saleh, termasuk guru, karyawan, petugas kebersihan, security, atau apapun maka mereka harus mengikuti yang namanya budaya inklusi. Minimal mereka paham dan tahu bahwa anak-anak kita ini anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ya walaupun memang jumlahnya tidak banyak tetapi itu harus diketahui oleh semua orang gitu. Bahkan kami juga setiap rapat selalu menyampaikan selalu

menginformasikan bahwa kita punya anak-anak yang spesial. Dan itu kita lakukan di awal tahun pembelajaran, fungsinya adalah supaya mereka tahu gitu loh bagi kelas mereka nanti akan ada anak berkebutuhan khusus yang akan menjadi siswanya di kelas. Nah jadi secara tidak langsung mereka akhirnya memahami itu bahwa di kelas itu ada PDBK nih, jadi bagaimana kami harus bertugas, bagaimana kami harus kebersamai anak-anak yang lain yang dalam kategori reguler dan anak kita yang berkebutuhan khusus ini. Untuk lebih jelasnya itu sebenarnya karena kita sudah memproklamirkan kita sekolah inklusi ya terlepas itu di kelasnya ada atau enggak, kita tetap harus memang berbudaya inklusi pada siapa saja. Sudah menyeluruh bisa menghadapi, bukan bisa dalam artian harus bisa menerapi ya tapi bisa sebagai guru yang menghadapi peserta didik.”⁹⁵

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Sani dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa:

“Karena memang selaras dengan salah satu misi sekolah kita juga, bahwasanya di dunia nyata kita tuh akan menemui sesuatu hal yang berbeda dengan kita dan itu sangat wajar gitu. Jadi yang bersifat inklusif tidak hanya di kelas tapi di lingkungan sekolah, entah itu *stakeholder*-nya, entah itu kerjasama dengan pihak luarnya, orang tua dan sebagainya.”⁹⁶

⁹⁵ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

⁹⁶ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana, 22 Juli 2024.*

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil dokumentasi dan observasi yang telah peneliti lakukan, di mana seluruh SDM yang ada di SD-AS bersama-sama berkolaborasi untuk memberikan pelayanan maksimal bagi PDBK dan melibatkan PDBK dalam setiap pembelajaran indoor dan outdoor, termasuk para siswa regular yang membantu PDBK belajar di kelas.



Gambar 4.11 GPK dan Guru Mapel (keduanya berjilbab biru gelap) membantu pembelajaran PDBK (berjilbab hitam)



Gambar 4.12 PDBK dilibatkan dalam setiap pembelajaran di kelas dan tidak hanya didampingi GPK, namun juga dibantu oleh Wali Kelas



Gambar 4.13 Siswa regular (berjilbab abu-abu) membantu PDBK (berjilbab hitam) di kelas

Ibu Sani juga menambahkan apabila terjadi ketidakselarasan antara disposisi tenaga pendidik dengan visi misi sekolah terkait inklusivitas di sekolah, maka akan diadakan *upgrading* guru. Penjelasannya adalah sebagaimana berikut:

“Jadi setelah mereka nanti diterima (semua SDM, baik GPK, wali kelas, dan guru kelas), misalnya tadi ada selip yang sudah kita sampaikan di wawancara, ternyata orangnya berbeda dengan wawancara, saat wawancara sepertinya komitmen, profesionalismenya tinggi lain dan sebagainya, pasti yang bagus-bagus dong. Nah ketika di tengah jalan itu kami tetap ada namanya pembinaan guru, *upgrading*. Bagaimana tentang ke-SD Anak Saleh-an, bagaimana cara berpakaian, bertutur kata, kita kita juga punya motto ‘*Child Friendly*’, gimana seorang guru itu harus ramah, bahkan guru itu harus bisa jadi teman, kita sampaikan. Ada pembinaannya. Misalnya guru kita ini kok nggak semangat untuk pembelajaran gitu, perlu kita adakan workshop, pelatihan, kita mengundang narasumber yang sekiranya bisa memotivasi kembali. Dan itu berkelanjutan, tidak menunggu ada masalah juga dong. Pastinya juga ada pembinaan secara individu, dimana guru-guru yang kurang dalam kinerjanya, kita panggil selaku SDM, kita ajak ngobrol, terus ditanya gimana, apa masalahnya, sejauh mana, bagaimana, dan seperti apa.”⁹⁷

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya motto yang sering kali ditanamkan kepada seluruh warga sekolah, yakni sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Heni:

“Pembentukan komitmen itu kayak jargon atau motto gitu ya yang kami tanamkan agar bisa itu semua bisa menerima. Yang pasti menerima dengan ikhlas bekerja dengan hati. Jadi menerima dulu, kalau dengan menerima apapun beratnya pasti ada jalan pasti ada yang nyaman, sehingga bekerja kita akhirnya kan nyaman kan bisa bekerja dengan hati diawali dengan menerima dulu. Allah mengharuskan kita di sini kan pastinya ada hikmahnya. Kalau bisa kita terima ya eee bisa lebih baik,

⁹⁷ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana, 22 Juli 2024.*

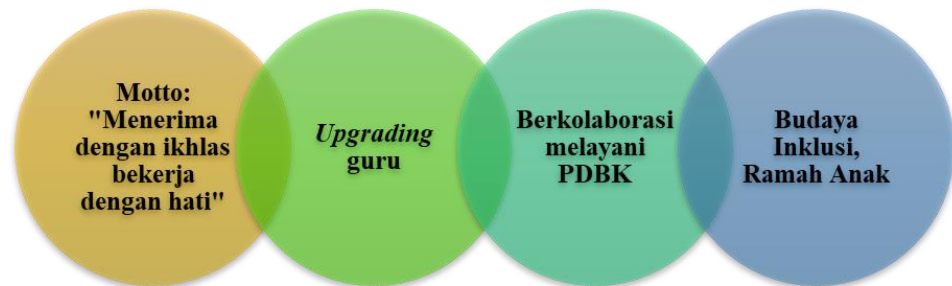
pun demikian dengan anak-anak. Jadi itu yang saya sarankan ke teman-teman. Motto tadi itu loh menerima teman-teman bismillah, ini bisa, ini bisa. Nah itu yang kami tanamkan ke teman-teman. Ayo apa sih yang tidak bisa, ayo kita cari kesulitannya apa, apa yang bisa dibantu sama tim sama teman-teman di lain kelas yang satu yang beda rombel, gimana, butuh apa gitu. Ayo kita cari sehingga teman-teman pun merasa tidak bekerja sendiri tidak jalan sendirian gitu loh.”⁹⁸

Sehingga apabila disimpulkan, warga sekolah dan *stakeholder* telah memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan akomodasi bagi PDBK, sehingga tumbuhlah budaya sekolah yang inklusif. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya PDBK dalam kelas, termasuk pembelajaran, jadwal piket, pembagian kelompok, kegiatan *outing*, rutinan sholat di masjid, dan lain sebagainya.

Selain itu, disposisi SDM di SD-AS akan terus ditingkatkan melalui pelatihan atau workshop bagi guru terkait metode terbaik untuk menghadapi PDBK sesuai kebutuhan masing-masing. Hal ini juga didorong dengan motto kerja “Menerima dengan ikhlas, dan bekerja dengan hati.” Sehingga SD-AS telah menunjukkan bahwa SDM yang di dalamnya memiliki komitmen dan motivasi yang cukup tinggi.

⁹⁸ Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum, 22 Juli 2024.*

Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.14 Disposisi Pelaksana SD-AS

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK

Pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan akomodasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) telah diimplementasikan di SD Anak Saleh Kota Malang. Evaluasi ini akan mengungkap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif.

Untuk aspek komunikasi, Bapak Andre menyampaikan tantangan pertama dalam wawancaranya yakni:

“Tantangan yang masih berat sampai hari ini justru dari statement stakeholder. artinya masyarakat yang masih memandang bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu anak-anak yang ‘ngeribeti’ lah ‘ngerepoti’ gitu dalam kelas. Karena itulah pastinya mereka berharap bahwa anak mereka mending memilih kelas yang tidak ada

anak PDBK daripada nanti ada PDBK-nya. Dengan berbagai alasan yang mungkin, ya ada yang masuk akal, ada yang enggak gitu.”⁹⁹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan negatif masyarakat menjadi penghalang utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Persepsi yang keliru tentang PDBK perlu diluruskan melalui berbagai upaya sosialisasi dan edukasi. Dengan demikian, diharapkan stigma negatif terhadap PDBK dapat dihilangkan dan terjalinnya kerjasama yang bersinergi dari masyarakat dengan sekolah untuk mendukung akomodasi yang layak bagi PDBK. Oleh karena itu, Bapak Andre menambahkan bahwa:

“Justru tantangan ini juga semakin menguatkan kami sebagai sekolah inklusi untuk lebih memahami pada *audience* pada masyarakat tentunya tentang keberadaan mereka di tengah-tengah kita. jadi ya dua tantangan itu sih menurut saya yang memang cukup besar ya memang kami hadapi dan kami upayakan Terus bagaimana menjadi solusi yang terbaik.”¹⁰⁰

Pernyataan tersebut dapat dinilai valid, di mana stigma terhadap PDBK tidak hanya terjadi pada masyarakat secara umum, terbukti dengan adanya beberapa wali PDBK yang tidak mengakui ketunaan dan ‘tidak mau tahu’ terhadap kebutuhan PDBK. Hal ini disampaikan oleh Ibu Seni sebagaimana berikut:

“Terkadang kendala kita yaitu ada orang tua yang beberapa sih, tidak banyak, misalnya kurang komunikasi hari ini dilaporkan, “Ananda di sekolah tantrum, di rumah seperti apa Mama sehingga kok berimbas ke sekolah,” dijawabnya, “enggak ada apa-apa kok, biasa

⁹⁹ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

¹⁰⁰ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

aja kok,” misalnya seperti itu. Nah yang seperti itu kita evaluasi kembali.”¹⁰¹

Dengan adanya kasus tersebut, muncullah masalah baru, di mana orang tua atau wali PDBK sulit untuk bekerja sama dengan sekolah terkait komunikasi, terlebih disiplin melakukan *treatment*, terapi dan rekomendasi belajar yang diberikan oleh sekolah.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Heni sebagaimana berikut:

“Karena ini hal yang sangat sensitif, tidak semua orang tua itu kan menerima kondisi Ananda, sehingga ketika kita kasih tahu kita memberitahu bahwa bunda harapannya didukung di bidang ini Bunda nih. dan rata-rata di kami karena memang Ayah Bundanya atau mama papanya itu orang-orang karir, sehingga diserahkan ke orang lain kan terputusnya begitu. makanya sudah Komunikasi itu kan enggak mungkin ya karena ini anaknya Bunda kenapa kami komunikasinya ke Mbak misalkan atau ke Bibi kan enggak mungkin pasti ke orang tua. sementara nanti mungkin untuk orang tua ke mbaknya atau yang biasa mendampingi anda itu berbeda lagi gitu terapi atau mungkin penanganannya.”¹⁰²

Oleh karena itu, SD-AS menanggapi tantangan tersebut dengan melakukan tindak lanjut berupa mengundang orang tua ke sekolah atau visitasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Heni:

“Untuk evaluasi kita ada komunikasi langsung mengundang atau tamu visit. Misalnya ada yang memang orang tua yang kerjanya itu kadang tidak setiap hari pulang, Maka kita mengundang kira-kira ada kesempatan kapan nih mah ayah bisa datang nih kita mau *sharing* terkait perkembangan Ananda. Kalau memang memungkinkan kita boleh ya berkunjung ke rumah dengan GPK-nya nih untuk kita datang ke rumah itu juga *base on report data* gitu. Yang pasti kan kita ada dialog ya atau komunikasi kedua arah tapi tidak asal mengundang atau tidak asal kita datang pasti harus ada

¹⁰¹ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana, 22 Juli 2024.*

¹⁰² Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum, 22 Juli 2024.*

data dulu terkumpul tadinya gitu kan kadang ada laporan begini mungkin tidak langsung kita reaktif langsung gitu enggak. tapi pasti kita gali data dulu kita analisis dulu kita konfirmasi dengan satu dua orang sebagai data yang valid gitu baru kita bisa mengambil Keputusan, Apakah kita mau mengundang orang tua atau kita membina dari dalam dulu tenaganya dulu. Kita panggil satu-satu dialog kenapa kesulitannya apa kita cari lebih *sharing* dan *caring* baru kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk lanjut (dievaluasi).”¹⁰³

Sedangkan dalam aspek Sumber Daya, SD-AS menghadapi tantangan berupa variasi kemampuan di antara para pendidik menjadi kendala yang signifikan. Tidak semua guru memiliki pengalaman atau pelatihan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan belajar PDBK. Sebagaimana pernyataan Bapak Andre:

“Banyak sekali kalau itu, terutama SDM ya. Tidak semua SDM memiliki kemampuan yang seragam, atau kemampuan yang sama dengan SDM yang lainnya. Ada mungkin SDM yang dia sudah punya pengalaman di bidang terapi, tapi ada juga yang memang sama sekali belum punya. Nah itu tantangan awalnya ada di sana. Sedangkan kebutuhan anak-anak kita juga sangat beragam sekali gitu. maka penentuan SDM memegang siapa, ini pegang siapa, itu memang akhirnya menjadi konsen kami di awal tahun ajaran baru.”¹⁰⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan kompetensi SDM menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan yang relevan. Selain itu, penempatan SDM yang tepat

¹⁰³ Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum, 22 Juli 2024.*

¹⁰⁴ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

sesuai dengan kompetensinya juga menjadi kunci keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan belajar PDBK. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Andre:

“Nah tantangan itu lah yang memotivasi kami untuk terus belajar. Karena mau nggak mau setiap GPK ini memang harusnya dibekali dengan minimal mereka harus bisa satu terapi yang mendasar lah seperti motorik halus, motorik kasar, okupasi, atau mungkin bina diri. Nah itu memang harus mereka miliki lah minimal itu yang paling dasar.”¹⁰⁵

Di samping variasi kemampuan SDM, Ibu Heni menyampaikan bahwa tantangan sumber daya selanjutnya adalah banyaknya GPK yang keluar masuk, sebagaimana berikut:

“Banyak yang punya ilmu tapi ternyata ya itu tadi ya kemauannya tidak begitu maksimal sehingga tahun ini kita benar-benar banyak nih menerima tahun ini GPK karena kan yang kemarin intinya banyak beliaunya enggak mampu dan sudah menyerah ya. Enggak apa-apa kita enggak berani memaksa karena daripada ada keterpaksaan malah hasilnya enggak maksimal kan. Ya kita mencoba untuk mencari yang benar-benar memang mau seperti itu. Yang kedua terkadang di tengah perjalanan mereka harus eh melanjutkan pendidikan. Nah itu kan kita juga enggak mungkin ya melarang orang untuk berusaha berkembang namun ketika mereka tidak bisa membagi waktu dengan anak-anak yang justru butuh perhatian khusus, ya kami minta lebih baik memilih salah satu. Akhirnya ketika dia memilih untuk pendidikannya maka kita meng-hire yang baru seperti itu.”¹⁰⁶

Hasil wawancara tersebut menyoroti pentingnya menjaga stabilitas tenaga pendidik dalam kelas inklusif. Sekolah perlu memiliki strategi untuk mempertahankan guru yang berkomitmen dan memberikan peluang

¹⁰⁵ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

¹⁰⁶ Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum, 22 Juli 2024.*

pengembangan profesional yang berkelanjutan. Selain itu, sekolah juga perlu mempersiapkan rencana kontijensi jika terjadi pergantian guru, agar tidak mengganggu proses pembelajaran siswa.

Sedangkan dari aspek Disposisi dan Struktur Birokrasi, belum ditemukan tantangan yang berarti. Namun, untuk mengantisipasinya, SD-AS tetap meninjau dan mengawasi kinerja seluruh SDM-nya melalui beberapa cara, di antaranya disampaikan oleh Bapak Andre:

“Nah di kami ada yang namanya penilaian kinerja yang kami lakukan satu semester satu kali itu ada namanya observasi. Kalau dulu ada aplikasinya tapi kalau sekarang sudah menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi dari sana itu sudah ada evaluasi mulai dari pelaksanaan pembelajaran, observasi pas pada saat pelaksanaan pembelajaran, observasi pada tingkah lakunya, sampai ke observasi pada pelaksanaan tataran asesment-nya. Jadi pemantauannya sebenarnya lebih mudah sekarang karena memang sudah difasilitasi aplikasi namanya PMM itu yang di sana ada salah satu menu namanya *e-kinerja*. Kami juga punya aplikasi namanya ASSA (*Anak Saleh Smart App*) yang itu membantu kita untuk memberikan penilaian di bidang kedisiplinan. Misalkan ada yang enggak masuk atau yang sering pulang belum tepat waktu atau mungkin ada yang menghilang pada jam-jam tertentu. Selain dua hal itu yang kami lakukan, menurut saya ini yang paling valid gitu ya, yaitu dengan observasi langsung di lapangan dan bertanya pada narasumber yang berbeda.”¹⁰⁷

Sedangkan Bu Sani menjelaskan bahwa:

“Nah ketika di tengah jalan itu kami tetap ada namanya pembinaan guru, *upgrading*. Bagaimana tentang ke-SD Anak Saleh-an, bagaimana cara berpakaian, bertutur kata, kita juga punya motto ‘*Child Friendly*’, gimana seorang guru itu harus ramah, bahkan guru itu harus bisa jadi teman, kita sampaikan. Ada pembinaannya. Misalnya guru kita ini kok nggak semangat untuk pembelajaran gitu, perlu kita adakan *workshop*, pelatihan, kita mengundang

¹⁰⁷ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

narasumber yang sekiranya bisa memotivasi kembali. Dan itu berkelanjutan, tidak menunggu ada masalah juga *dong*. Pastinya juga ada pembinaan secara individu, dimana guru-guru yang kurang dalam kinerjanya, kita panggil selaku SDM, kita ajak ngobrol, terus ditanya gimana, apa masalahnya, sejauh mana, bagaimana, dan seperti apa.”¹⁰⁸

Sehingga untuk mengevaluasi kinerja SDM-nya, peneliti menyimpulkan bahwa SD-AS melakukan beberapa hal, yakni observasi melalui online (PMM dan ASSA), observasi langsung di lapangan, dan bertanya dengan rekan kerja. Sedangkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja SDM, SD-AS melakukan *upgrading* dan pembinaan inividu secara berkala tanpa menunggu adanya masalah tertentu.

Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.15 Bagan Evaluasi SD-AS

¹⁰⁸ Binti Saniatul M, Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana, 22 Juli 2024.

3. Hasil Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran

Adapun proses hasil implementasi kebijakan akomodasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Anak Saleh Kota Malang dapat ditinjau melalui hasil perubahan atau peningkatan mutu pembelajaran yang dialami PDBK. Mutu pembelajaran tersebut merujuk kepada 2 aspek yang dirincikan sebagai berikut:

a. *Output*

Output merupakan mutu pembelajaran yang hasilnya nampak dan dapat diukur dari suatu proses pembelajaran setelah diimplementasikannya kebijakan akomodasi PDBK di SD-AS. *Output* umumnya dapat dilihat dari nilai akademik, keterampilan, ataupun produk hasil *project* dari suatu pembelajaran. Namun bagi PDBK, *output* dari keberhasilan suatu pembelajaran tidak dapat diukur dari nilai akademiknya, karena memang pembelajaran bagi PDBK sudah mengalami proses penyederhanaan dan penyesuaian berdasarkan kemampuan dan ketunaannya (disabilitasnya). Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Sani dalam wawancaranya, yakni:

“Kita *outputnya* jelas ya jadi bersifat individu, setiap anak punya kelebihan sendiri punya skill sendiri. Dimana untuk tujuan akhirnya juga berbeda-beda, ada yang anaknya anti sosial nih ya tujuan akhirnya dia bisa bersosialisasi, itu kita anggap sudah goalnya; misalnya anak-anak bisa melanjutkan ke SMP yang mereka inginkan, ya itu goalnya; misalnya anak itu secara komunikasi kurang bisa komunikasi, yang mungkin goalnya nanti mereka bisa berkomunikasi. Jadi disesuaikan setiap anak

itu disesuaikan kebutuhan mereka masing-masing sih, jadi tidak bisa disamakan, harus NEM-nya sekian gitu ya tidak. Kami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak itu.

Misalnya selama di kelas 1, ini dia enggak bisa *toilet training* nih, kelas 2 goal-nya yang mungkin cuma training, kelas 3 kemandirian dia *toilet training*, dan seterusnya, karena permasalahan dia di toilet training aja. Misalnya ada yang anti sosial di kelas 1-nya, kelas 2 ya belajar lagi tentang sosial. Karena kita fokus ke kebutuhan anak itu apa gitu, bukan semata-mata bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah tergambar, karena kan anaknya berkebutuhan khusus, maka berbeda tujuannya jadi sesuaikan individu tersebut.”¹⁰⁹

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Andre, yang mana mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya begini kalau untuk secara akademik memang kami tidak punya target khusus untuk anak-anak kita ini juga saya sampaikan pada GPK ya. Artinya bahwa tidak ada target khusus untuk anak-anak ini harus paham ABCD dan lain sebagainya. Contoh nih ada anak kelas 5 tapi dia masih berkemampuan seperti anak kelas 1, mau dipaksakan apapun ya jadi nggak bisa yang kemampuannya hanya sampai di situ. Tapi ada anak yang memang dia bisa di berikan *treatment-treatment* khusus untuk bisa naik ke level selanjutnya, maksudnya bukan naik kelas bukan. Tapi misalkan dia membantunya baru 1 sampai 10 Oh tapi bisa kok ini misalkan dikasih treatment dia bisa naik ke 20 sampai 50 misalnya begitu. Jadi itu yang kami lakukan nah yang kami tekankan ada dua hal kepada mereka, yang pertama adalah kemandiriannya, yang kedua adalah sosialnya itu. Jadi lebih ke sana kalau akademik kami ngikut aja. Menurut kami walaupun kita sudah menerapkan akomodasi komunikasi yang berbagai macam cara pun ya, dengan bagian segala cara pun, tetap akademik itu bukan menjadi target kepada mereka. Tapi justru di kemandirian dan sosialnya itu malah kita punya target gitu loh. Supaya mereka bisa minimal bisa bantu diri dan mereka minimal bisa membela diri, karena nanti dia akan lanjut di supaya bisa survive di sekolah lanjutannya. Karena kan kita enggak tahu juga ya nanti Apakah tanya juga dia akan sekolah di sekolah yang inklusif juga, kan kita enggak bisa jamin. Maka yang kami buat lebih untuk kemandirian

¹⁰⁹ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana, 22 Juli 2024.*

kemudian sosial akademiknya mengikuti ketunaannya masing-masing.”¹¹⁰

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Heni:

“Nah untuk anak-anak PDBK kalau memang tidak memahami sama sekali dan memang untuk memahami apa bentuk angka dan lain sebagainya dia belum ya. Mereka hanya menggaris, menebali, garis-garis. Kemudian bagaimana *soft skill*-nya mereka, juga motoriknya ya motorik halus motorik kasar itu ya itu yang kita tekankan. Jadi di kami khusus di SD Anak Saleh dari kelas 1 sampai kelas 6 fokus PDBK lebih pada bagaimana dia membina dirinya, menjaga dirinya, dan kemandiriannya dan di dalam kelas itu lebih pada bagaimana melatih interaksi sosial mereka sehingga ketika di masyarakat dia tidak ketergantungan dengan satu dua orang, tapi dia juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Yang kedua selain untuk dirinya sendiri yang kedua adalah bagaimana memberikan kesempatan si anak tadi PDBK belajar (beradaptasi), pun demikian dengan anak-anak yang regular, sehingga sama-sama saling belajar belajar melihat menerima dan bagaimana mengambil keputusan yang bijak. Sehingga kita benar-benar mengurangi yang namanya *bullying* dan lain sebagainya ya. Sehingga fokus kami memang lebih pada diri mereka, karakter mereka kemandiriannya, kemudian *self defense*-nya, pembelaan diri, itu yang kita tekankan pada anak-anak PDBK.”¹¹¹

Secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa *output* yang diharapkan dari pembelajaran PDBK adalah *softskill*-nya, yakni meningkatnya taraf kemandirian dan kemampuan sosialnya, termasuk kemampuan beradaptasi; di mana kedua kemampuan tersebut akan menunjang pendidikan dan kehidupan PDBK selanjutnya, salah satunya adalah dapat berpartisipasi mandiri dan memahami

¹¹⁰ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

¹¹¹ Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum, 22 Juli 2024.*

pembelajaran di kelas sebagaimana teman-temannya. Adapun *output* yang terukur yang dapat dilihat dari perkembangan PDBK adalah kemampuan mengikuti instruksi, kemampuan calistung (membaca, menulis, dan berhitung), motorik kasar, dan motorik halus. Adapun *output* juga disesuaikan dengan terapi yang dilakukan oleh masing-masing PDBK; bagi PDBK yang menjalani terapi wicara, maka *outputnya* adalah PDBK dapat mengucapkan kata-kata dengan jelas; bagi PDBK yang menjalani terapi okupasi adalah PDBK dapat terampil mengerjakan aktivitas harian seperti makan, berpakaian, dan bermain; dan lain sebagainya.

b. *Outcome*

Outcome merupakan mutu pembelajaran yang dampaknya bersifat jangka panjang atau perubahan yang lebih mendalam sebagai akibat dari proses pembelajaran. *Outcome* lebih bersifat kualitatif dan sulit diukur secara langsung dari suatu proses pembelajaran setelah diimplementasikannya kebijakan akomodasi PDBK di SD-AS.

Setelah terbentuknya taraf kemandirian dan kemampuan bersosialisasi dengan sekitarnya, besar harapannya akan terbentuk suatu *Outcome* pada diri PDBK, salah satunya adalah munculnya potensi dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing PDBK. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Heni, yakni:

“Jadi kami punya Ananda yang namanya Mas Raka. Dia itu kayak down syndrome, nah dia punya kecenderungan di fotografi. Sehingga kami memberikan dia kesempatan, dengan

pendampingan secara individu. Kami mencoba untuk memberikan dia tidak mengikuti ekstra kami, tapi dia ikut ekstra di podcast dan dia di bagian yang mendokumentasikan. Kita pun juga mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Di akhir kelasnya di kelas 6 kita bahkan memberikan kesempatan untuk menggelar pameran solo hasil foto-foto dia.

Kemudian yang Mbak Vivi, Mbak Vivi Ini kesulitan belajar, *slow learner*, tapi dia sangat sensitif dengan dirinya. Sekarang dia jadi model karena dia fokus di make up-nya, modifikasi antar baju dan lain sebagainya. Ada juga mas Rafli, dia ini bahkan sempat meng-*hack* komputer sekolah. Kita satu minggu nggak bisa bekerja karena ananda Rafli. Nah Rafli ini termasuk kategori superior ya di IT. Alhamdulillah Mas Rafli ini akhirnya jadi partner kami dalam IT sampai dia lulus.

Nah sementara mas Zidan sendiri yang dia itu lebih fokus di keislaman jadi dia tahfidznya dan sebagainya. Jadi dia anak inklusi yang diterima di sekolah reguler kebetulan Di MTsN karena tahfidznya gitu. Nah akhirnya dia jadi Dai ya kita undang untuk tausiyah yang di sekolah. Padahal dulu dia orangnya itu kadang harus kita tatap kadang kita sentuh dulu pipinya, “Mas lihat Ustazah ayo sudah siap belajar”, tapi setelah lulus dia menjadi Dai, kan luar biasa.

Jadi ternyata anak-anak ini punya loh keunikan dan keunggulan mereka masing-masing dan *just how we can find it*. Bagaimana kita temukan saja dan berikan kesempatannya gitu kan. Alhamdulillah orang tuanya paham terkait itu, dia benar-benar dibekali dengan IT, di rumah difasilitasi, jadi tersalurkan ide kreatifnya di rumah.”¹¹²

Pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Sani, sebagaimana berikut:

“Yang kebetulan saya ikutin itu Varo. Saya belajarnya dari alumni, ya, Mbak, ya. Kalau saya lihat dari beberapa alumni itu juga bisa mereka bisa bersanding dengan anak reguler, bahkan disesuaikan dengan kebutuhan mereka berarti dari sekolah-sekolah lanjutannya mereka juga kayaknya bertumbuh gitu. Contoh Vivi itu dia dulu ADHD juga gitu, sekarang dia juga sudah menjadi anak yang percaya diri menjadi model. Dengan

¹¹² Heni Hidayah, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kurikulum, 22 Juli 2024.*

itu mereka banyak yang berhasil gitu loh, tidak semua sembuh ya, tapi berkurang inklusinya, atau selesai masa-masa menyandanginya itu.”¹¹³

Adapun *Outcome* jangka panjang dan lebih mendalam yang diharapkan adalah sembuhnya disabilitas yang disandang oleh PDBK tersebut. Atau lebih tepatnya adalah mencapai kemandirian fungsional dan mencapai potensi maksimum sehingga berhasil beradaptasi dan mengatasi disabilitas yang disandanginya. Bahkan dengan mencapai kondisi tersebut, beberapa PDBK dapat dinyatakan terbebas dari label disabilitasnya. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil wawancara dengan Ibu Sani yang menyatakan bahwa:

“Kita sudah pernah mencapai goal kita, ada anak ADHD keluarnya dia mendapatkan sertifikatnya atau ijazahnya itu anak reguler. Istilahnya penyandanginya itu sudah tidak ada. Intinya sudah selesai masa disabilitasnya atau kebutuhan khususnya. Dia keluar mendapatkan ijazah reguler dan diterima di Sabilillah. Jadi bukan nilai poin utamanya tapi poin utama kita adalah mentransmisikan anak berkebutuhan khusus menjadi anak reguler dan dia mampu mandiri, mampu bersosialisasi, karena ternyata awalnya dia tidak bisa bersosialisasi sehingga untuk pembelajaran dia juga kurang memahami gitu.”¹¹⁴

Secara implisit, pernyataan ini juga didukung oleh hasil wawancara bersama Bapak Andre, sebagaimana berikut:

“Prestasi anak-anak kita ini memang kalau di PDBK ya itu memang belum bisa dilihat kalau masih di tataran Sekolah Dasar. Kalau menurut saya itu mereka hanya ada gangguan saja yang akan selesai pada waktunya asalkan treatment-nya benar gitu. nah Kami punya sudah punya banyak bukti itu ya karena anak-anak yang sudah lulus dari SD mereka itu ketika SMP

¹¹³ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana*, 22 Juli 2024.

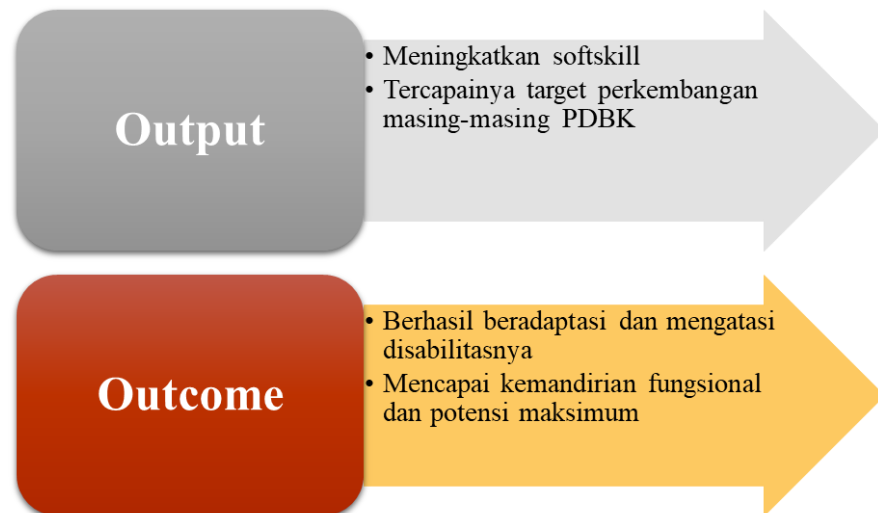
¹¹⁴ Binti Saniatul M, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang Bidang Kesiswaan, Humas, dan Sarana-prasarana*, 22 Juli 2024.

SMA ada yang ketika kuliah, itu mereka sudah pada anak seperti pada umumnya gitu loh artinya mereka gangguan itu sudah selesai gitu loh mereka sudah wajar seperti anak pada umumnya. Nah mereka punya prestasi-prestasi yang di bidangnya masing-masing, ada yang anak suka komputer nah dia sekarang dia kuliah di *computer science*, ada anak yang dari kecil itu dia waktu itu dia beda-beda spektrum autis dia sukanya nyanyi aja nah dia sekarang juga menggeluti di bidang itu. Nah prestasi itu terjadinya tidak di sini, di tapi next levelnya dia gitu. Tapi di sekolah tetap kami support dan kami kasih kesempatan. Jadi haknya anak PDBK itu sama sebenarnya sama anak reguler jadi tidak ada perbedaan. Sehingga untuk urusan prestasi memang belum bisa ditampilkan yang secara implisit di lingkungan SD tapi kami sudah sering mendapat report justru mereka ketika SMA ketika sudah kuliah itu mereka muncul lah gitu loh prestasi mereka.”¹¹⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan dukungan yang konsisten dan terpadu dari keluarga, sekolah, dan tenaga profesional, PDBK memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan evaluasi yang berkelanjutan. Meskipun tidak semua disabilitas dapat disembuhkan, intervensi yang tepat dapat membantu PDBK untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan mencapai potensi maksimum mereka.

¹¹⁵ Andreas Setiyono, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Anak Saleh Kota Malang, 13 Agustus 2024.*

Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.16 Hasil Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK SD-AS

C. Paparan Data Sekolah Dasar Islamic Global School Kota Malang

Paparan data hasil penelitian SD-IGS diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 narasumber utama, yakni Ibu Lailatus Syifak, S.Pd., atau Ibu Syifak selaku Kepala SD-IGS; Bapak Akhmad Susanto, S.S., atau Bapak Santo selaku Wakil Kepala SD-IGS bidang Kesiswaan; dan Ibu Anugrah Try Nastiti M.Pd., atau Ms. Tite selaku Koordinator Guru Pembimbing Khusus SD-IGS. Selain itu peneliti juga berupaya mengumpulkan data penelitian melalui hasil observasi dan dokumentasi.

1. Proses Perencanaan Dan Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK

Pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berfokus pada rumusan masalah pertama, yakni proses perencanaan dan implementasi kebijakan akomodasi PDBK yang terdiri dari tahap interpretasi melalui faktor komunikasi; tahap organisasi melalui faktor sumber daya dan faktor struktur birokrasi; serta tahap aplikasi melalui faktordisposisi yang terjadi di SD Islamic Global School Kota Malang.

a. Komunikasi

Dalam tahap interpretasi terkait kebijakan akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SD-IGS pada faktor komunikasi ditandai dengan adanya rapat kerja para pelaksana sekolah sebelum sekolah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang mana komunikasi awal yang dilakukan ke pihak

internal SD-IGS, yakni *stakeholder* sekolah, termasuk tim Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang terdiri 3 orang guru. Informasi dan regulasi yang disepakati bersama oleh sekolah adalah SD-IGS hanya menerima 1 PDBK untuk per kelas. Dikarenakan 1 rombongan belajar terdiri dari 4 kelas, maka setiap pembukaan PPDB SD-IGS akan menerima 4 PDBK di setiap tahun ajaran baru.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Syifak, yang mana berbunyi:

“Regulasinya dari interm sendiri kita menerima satu kelas itu 1, itupun kalau bisa bergabung dengan anak-anak yang reguler kalau tidak bisa ya di kelas sumber atau kalau memang dia butuh terapi ya kami ada komunikasi dengan orang tua untuk dipenuhi terapinya dulu soalnya masuk sini. Jadi kita sebelum itu diskusi dulu dengan tim, kebetulan di inklusi itu ada 3 guru, yang 2 dari psikologi, yang ketiga dari pendidikan luar biasa.”¹¹⁶

Informasi tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Santo, yang sebagaimana berikut:

“Tetapi tetap dengan kebijakan inklusi, kita hanya menerima 4 siswa yang akan kita sebar 1 anak dalam 1 kelas. Kalau sudah terpenuhi kuota 4, berarti sudah (pendaftaran) kita stop. Selanjutnya kita serahkan untuk diobservasi oleh tim inklusi, dan Tim Inklusi yang nanti akan membuat programnya seperti apa.”¹¹⁷

¹¹⁶ Lailatus Syifak, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang, 3 Juni 2024.*

¹¹⁷ Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan, 6 Juni 2024.*



Gambar 4.17 Kelas III C dengan 1 PDBK

Dilihat dari dokumentasi tersebut, PDBK duduk di kelas bersama teman reguler lainnya dan mengikuti pembelajaran reguler. Dalam proses belajarnya di kelas, PDBK dibantu oleh 1 asisten wali kelas, sehingga pembelajaran PDBK dapat berjalan dengan lancar.

Kemudian, proses komunikasi terus dilanjutkan pada saat masa PPDB, di mana calon PDBK diobservasi dan orang tua akan dimintai keterangan terkait riwayat kesehatan PDBK. Komunikasi ini dilakukan dengan harapan dapat memudahkan sekolah mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan apa yang perlu diberikan kepada PDBK selama belajar di SD-IGS. Bapak Santo dalam wawancaranya menjelaskan sebagaimana berikut:

“Dimulai anak itu diterima, memang ketika pendaftaran kita selalu tanyakan, tapi kita tanyanya halus ya, Mbak. Jadi pas kita pertama masuk, kita cek anak-anak, dengan cara kita lihat

kemampuan dasarnya. Pertama untuk memudahkan kita membagi kelas, yang anak itu rata, kedua untuk kita bisa melihat anak ini beda atau tidak. Nah, biasanya kalau sudah diajak ngomong sulit, diajak ngomong ternyata dia kesana kemari, ditanya apa jawabnya apa, nah ini kita tandai dulu anaknya, kemudian kita secara langsung ke orang tuanya. Kalau memang iya (berkebutuhan khusus), maka akan kita panggilkan tim kami, kita, kan punya tim inklusi, kita observasi awal, kira-kira anak ini inklusi atau tidak. Jadi pas awal kemudian setelah itu kita tanya orang tuanya sebagai komunikasi awal, anaknya inklusi atau tidak. Kalau memang inklusi biasanya kita minta sertakan pernah ke psikolog tidak?”¹¹⁸

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Tite, yang sebagaimana berikut:

“Dari awal di sini bentuk komunikasinya awal itu pasti ketemu orang tuanya dulu maksudnya anak masuk ke sini dari daftar awal anaknya daftar di SD IGS ini, pasti ketemunya itu dengan staff di depan dan diarahkannya langsung ke kami itu untuk melakukan observasi identifikasi awal anaknya Seperti apa. Nah yang memang terindikasi dari orang tuanya awalnya memang berkebutuhan gitu, jadi di depan sudah ditanyakan Apakah anak ini terindikasi PDBK atau tidak. Setelah diketahui dikomunikasikan lah dari pihak staff depan jika kami sebagai guru pembimbing khusus. Setelah itu kita melakukan observasi dan identifikasi awal ke anaknya dan orang tuanya dari situ kita menjalin komunikasi dengan orang tua antara GPK dan orang tua lagi terkait tentang riwayat anaknya selama kehamilan, selama pembelajaran di TK, terus proses tumbuhnya.”¹¹⁹

Setelah hasil observasi muncul dan tim GPK berhasil mengetahui kebutuhan GPK, maka GPK akan melakukan komunikasi lebih lanjut kepada Kepala Sekolah dan wali kelas terkait *placement* PDBK di tiap-tiap kelasnya dan program apa saja yang dibutuhkan selama pembelajaran. Setelah komunikasi secara intern, kemudian

¹¹⁸ Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan, 6 Juni 2024.*

¹¹⁹ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

pihak sekolah akan mengundang orang tua untuk membentuk paguyuban wali PDBK untuk rencana realisasi program yang telah dirumuskan untuk PDBK sesuai kebutuhannya masing-masing.

Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Ibu Tite, yakni:

“Ketika anaknya sudah diterima di sini eh pasti kan sudah diplotkan sama sekolah anak ini masuknya kelas mana mana itu kami mengkomunikasikannya secara langsung baik kepala sekolah dengan kami beserta dengan wali kelas. Jadi ada komunikasi lagi di situ antara kepala sekolah segitiga dengan wali kelas. Selain itu setiap tahun ajaran baru kami juga ada pertemuan paguyuban, maksudnya semua orang tua anak-anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi. Nah untuk mengkomunikasikan apa saja program kami selama satu tahun ke depan terus pembentukan paguyuban mungkin seperti itu. Nah itu dihadiri oleh pihak sekolah yang diwakili biasanya oleh kepala sekolah, penjamin mutu, GPK dan orang tua gitu kan sudah terjalin komunikasi gitu.”¹²⁰

¹²⁰ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

Hasil observasi PDBK dan penyusunan rencana pembelajaran tersebut dituangkan dalam Program Pembelajaran Individu (PPI) oleh GPK, kemudian disetujui oleh Kepala Sekolah, orang tua, dan GPK.

<u>PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL</u>							
Nama (Inisial) : ADS Kelas/Semester : IIIB / GANJIL Tanggal Lahir : Malang, 12 April 2014 Tahun Ajaran : 2023/2024 Jenis Kebutuhan Khusus : - Orang Tua/Wali : -							
Kompetensi	Indikator	Deskripsi (Kondisi saat ini)	Tujuan		Materi	Media	Evaluasi
			Jangka Panjang	Jangka Pendek			
3.1 Menghafalkan dan menulis huruf A	Menentukan, menghafalkan dan menuliskan bentuk huruf A.	belum bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan teman seusianya.	Mampu menentukan bentuk huruf A.	mampu memahami dan menuliskan bentuk huruf A secara mandiri.	Abjad	Flash card abjad dan LK	Ananda belum mampu menulis huruf A
Strategi: memberikan materi secara berulang-ulang setiap harinya sambil menambahkan materi yang lain dikit demi sedikit agar materi yang telah diberikan dapat diingat oleh anak, dan menggunakan media pembelajaran yang konkrit.							
Telah menyetujui dan menerima Program Pembelajaran Individual ini :							
Kepala Sekolah : _____							
Orangtua Murid : _____							
Guru : _____							

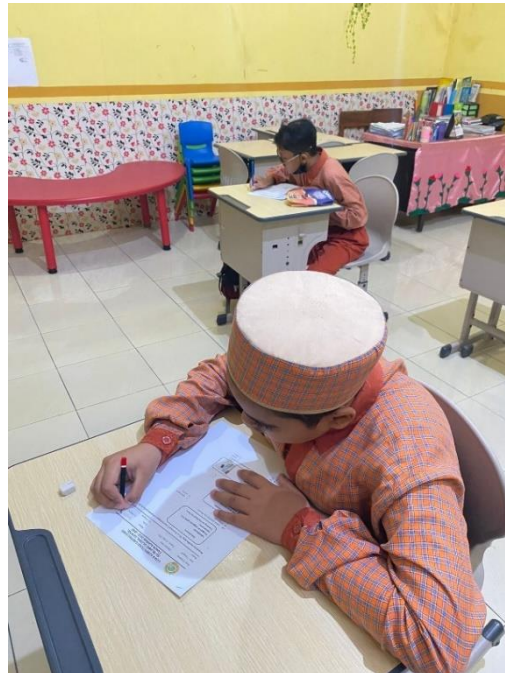
Gambar 4.18 PPI yang disusun oleh GPK SD-IGS untuk PDBK

PPI ini kemudian yang akan menjadi patokan atau pedoman pembelajaran yang struktural dan bertahap untuk PDBK. Komunikasi melalui PPI ini dilakukan untuk menunjang keselarasan informasi terkait kebutuhan PDBK, sehingga semua pihak yang terkait dapat bekerja sama mendukung pembelajaran PDBK. Wali kelas perlu mengetahui ketunaan dan kebutuhan PDBK karena PDBK ini akan

diplotkan di setiap kelas. Dan di setiap minggunya PDBK akan diberi *treatment* atau terapi bersama GPK di Kelas Sumber.

Sistem pembagian kelas ini disimpulkan dari hasil wawancara bersama Bapak Santo, sebagaimana berikut:

“Jadi anak-anak itu walaupun inklusi, kita tetap taruh di kelas reguler, karena mereka butuh sosialisasi, butuh teman normal, butuh teman main. Jadi kita tetap taruh di kelas (reguler), secara absen pun mereka tetap ada absen kelas. Cuma setiap 1 hari pasti ada beberapa jam mereka ke kelas sumber, bertemu dengan teman-teman inklusinya.”¹²¹



Gambar 4.19 Pembelajaran di Kelas Sumber

Pembelajaran di kelas sumber ini memungkinkan PDBK untuk mendapatkan terapi dan latihan mandiri terkait target pembelajaran individunya secara intensif.

¹²¹ Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan, 6 Juni 2024.*

Informasi tersebut selaras dengan penjelasan dari Ibu Syifak yang sebagaimana berikut:

“Siswa yang kita terima adalah siswa yang nanti bisa kita kembangkan sosialisasinya dengan anak reguler. Jadi di kelas inklusi itu misalnya 1 minggu di kelas 3 hari atau 2 hari selebihnya beliau di kelas reguler bersama teman-temannya.”¹²²

Melalui regulasi pembagian jadwal kelas tersebut, secara otomatis GPK dan wali kelas membutuhkan intensitas komunikasi dua arah yang lebih banyak terkait perkembangan PDBK, pun kepada orang tua. Untuk memudahkan komunikasi sehari-hari tersebut GPK menggunakan sarana Grup WhatsApp. Hal ini disebutkan oleh Ibu Tite dalam wawancaranya:

“Jadi kalau ada informasi terkait program apa terus terkait jadwal untuk kami pasti melalui grup paguyuban itu tadi. Kalau misalnya kalau untuk sehari-harinya kita lebih seringnya lewat WA misalkan ada sesuatu yang harus disampaikan entah progressnya anak itu kami chat masing-masing per orang tua yang bersangkutan.”¹²³

Selain itu GPK juga akan melaporkan perkembangan PDBK secara berkala melalui raport perkembangan, baik kepada wali PDBK ataupun Kepala Sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Tite, sebagaimana berikut:

“Kalau untuk laporan tertulis Kami lebih ke raport itu tadi akhir semester itu. kami membuat raport sendiri namanya raport perkembangan jadi anak-anak PDBK ini mendapat 2 raport, raport

¹²² Lailatus Syifak, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang, 3 Juni 2024.*

¹²³ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

reguler dan rapat dari kami. Kalau raport dari kami ini detail perkembangannya seperti apa.”¹²⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi SD-IGS terkait implementasi kebijakan akomodasi untuk PDBK terdiri dari beberapa interaksi:

- 1) Komunikasi Internal, yakni komunikasi yang dilakukan antar pihak sekolah, yakni antara GPK, Kepala Sekolah dan wali kelas.
- 2) Komunikasi Eksternal, yakni komunikasi yang dilakukan antara pihak sekolah dengan pihak eksternal, baik wali PDBK maupun Masyarakat luas.

Adapun untuk menjaga efektivitas dan keselarasan interpretasi komunikasi, pihak SD-IGS menerapkan 2 jenis komunikasi pula, yakni:

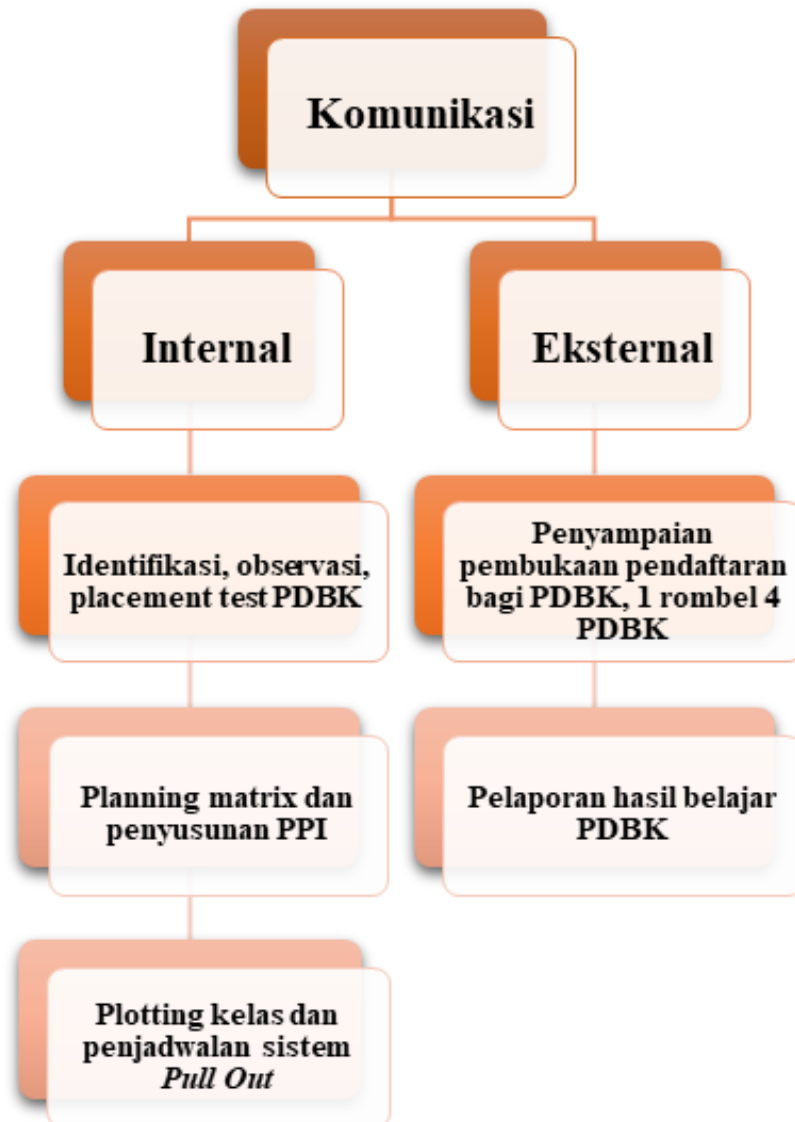
- 1) Komunikasi langsung (*direct communication*), yakni komunikasi yang dilakukan secara langsung, seperti tatap muka.
- 2) Komunikasi tidak langsung (*indirect communication*), yakni komunikasi yang dilakukan melalui perantara, baik

¹²⁴ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

secara administrasi, yakni raport, maupun media sosial (via WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya).

Kedua jenis komunikasi ini diharapkan mampu meminimalisir *miss communication* antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK, bagi pejabat sekolah, wali kelas, GPK, dan wali PDBK. Sehingga dengan komunikasi ini, sekolah dapat berhasil mendorong terjadinya transmisi komunikasi efektif, dan interpretasi yang selaras serta transparan.

Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.20 Bagan Komunikasi SD-IGS

b. Sumber Daya

Dalam tahap organisasi, terkait sumber daya, SD-IGS menyediakan SDM yang kompeten dan kapabel, serta berbagai fasilitas sesuai dengan kebutuhan PDBK. Salah satunya adalah pembentukan Tim Inklusi.



Gambar 4.21 Tim Inklusi yang terdiri dari Guru Pendamping Khusus (berbaju biru)

Tim Inklusi SD-IGS terdiri dari 3 orang GPK dan Ms. Tite sebagai koordinator. Tugas dari GPK adalah merencanakan pembelajaran bagi PDBK, menyusun PPI bersama pihak lain yang terkait, serta kebersama PDBK dalam proses belajarnya.

Selaras dengan hasil wawancara Bapak Santo menjelaskan bahwa:

“Yang pertama pengajarnya, harus dari orang-orang yang pada paktanya, jadi yang kita terima untuk orang-orang yang ada di sana itu yang pertama psikologi pasti, dan guru-guru yang memang PLB (Pendidikan Luar Biasa), kalau selain itu tidak kita terima. Yang kedua kita buat kelas sumber sesuai dengan kebutuhan mereka karena kebutuhan mereka kan beda dari kita. Dan setiap tahun teman-teman inklusi selalu mengajukan anggaran, mengajukan rencana anggaran belanja, dan tentu sebisa mungkin kita lengkapi khusus inklusi. Dan yang jelas, setiap satu tahun sekali kita adakan raker, dan dalam raker itu pasti ada 1 sesi full membahas inklusi. Ditambah lagi ketika dinas mengadakan pelatihan pasti kita kirimkan orang. Atau juga seringnya kita datangkan orang untuk mengisi pelatihan inklusi di sekolah.”¹²⁵

Selain itu Ibu Syifak juga menjelaskan bahwa:

“Kalau di fasilitas ya disesuaikan dengan kebutuhan anaknya, tentunya meja kursi ada kemudian alat peraga juga ada di situ setiap tahun ajaran baru itu biasanya ada apa kayak pengajuan program apa-apa gitu ya. Selama ini kita kan swasta, mandiri. Jadi kita usahakan sendiri dari manapun. Beda kalau negeri kan sudah ada regulasinya sendiri dari dinas aturannya, belanjanya apa saja.”¹²⁶

Pernyataan tersebut juga selaras dengan hasil wawancara Ibu

Tite:

“Jadi setiap awal tahun ajaran baru kita mengajukan rincian biaya maksudnya rincian biaya untuk keperluan anak-anak di sini. biasanya kami rinci itu kayak buku cerita pasti kami anggarkan terus media-media yang di sana itu kami anggarkan sendiri jadi ada rincian pengajuan dana itu. Nah pengajuan tadi

¹²⁵ Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan, 6 Juni 2024.*

¹²⁶ Lailatus Syifak, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang, 3 Juni 2024.*

dialokasikan untuk keperluan kelas kebutuhan apa saja yang kita butuhkan.”¹²⁷

Melalui teknik dokumentasi, peneliti menjabarkan sumber daya fasilitas yang menunjang pembelajaran PDBK, sebagaimana berikut:



Gambar 4.22 Kelas Sumber

¹²⁷ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*



Gambar 4.23 Kumpulan media dan alat peraga pembelajaran



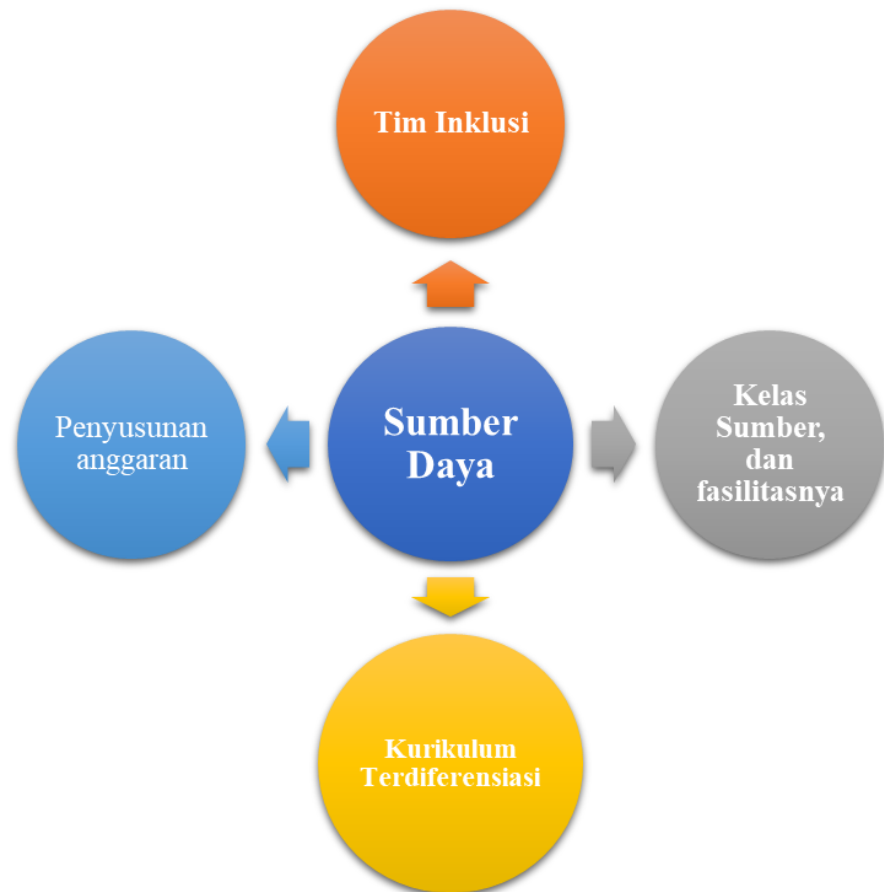
Gambar 4.24 Kumpulan buku cerita dan Pojok Baca

Di kelas sumber ini lah PDBK melaksanakan pembelajaran, terapi, dan latihan pembiasaan bersama Tim Inklusi. Fasilitas dan media pembelajaran yang di dalamnya juga disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan PDBK.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang disediakan oleh SD-IGS untuk PDBK adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia yang kompeten dan kapabel, yakni Tim Inklusi yang terdiri dari GPK yang merupakan lulusan Psikologi dan Pendidikan Luar Biasa (PLB). Selain itu, sekolah juga menunjang kompetensi guru-guru lainnya melalui pelatihan dan workshop.
- 2) Ruang Sumber yang dapat digunakan sebagai ruang penunjang perkembangan PDBK dengan jadwal yang telah disusun sedemikian rupa.
- 3) Program pembelajaran sesuai kondisi dan kebutuhan PDBK
- 4) Anggaran sekolah yang diprioritaskan untuk program inklusi.

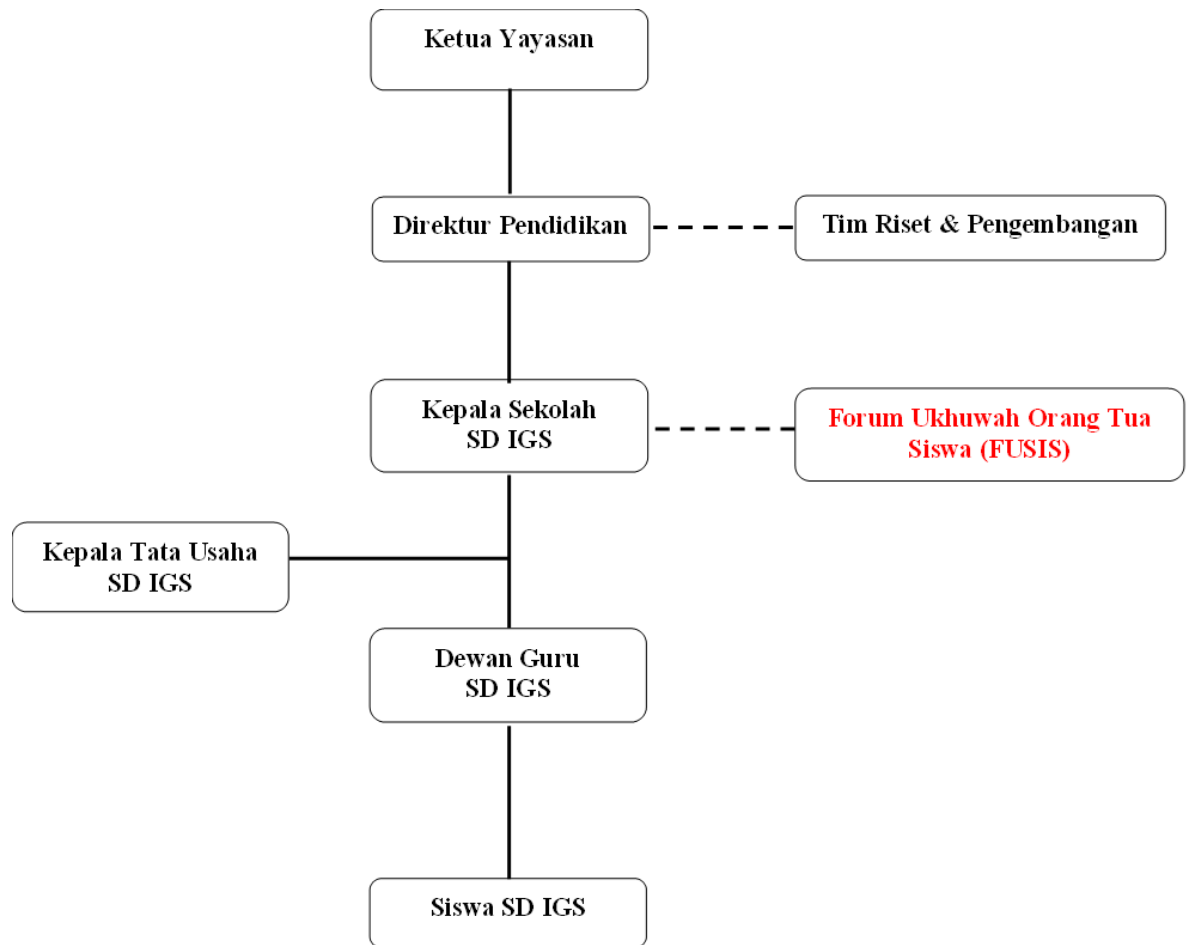
Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.25 Bagan Sumber Daya SD-IGS

c. Struktur Birokrasi

Pada tahap organisasi, implementasi kebijakan juga perlu diperhatikan struktur birokrasinya, mencakup pembagian peran dan tanggung jawab (fragmentasi). Keberhasilan pelaksanaan kebijakan akomodasi bagi siswa dengan disabilitas bergantung pada struktur birokrasi sekolah yang baik. Struktur ini akan memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta memastikan bahwa semua bagian sekolah bekerja sama dengan baik. Adapun berikut adalah struktur organisasai SD Islamic Global School yang diterapkan pada tahun pelajaran 2024/2025:



Gambar 4.26 Struktur Organisasi SD-IGS 2024/2025

Dalam pelaksanaannya, struktur organisasi tersebut telah memiliki fragmentasi atau pembagian peran yang jelas dan terstruktur.¹²⁸ Adapun yang memiliki tanggung jawab secara langsung untuk melayani pembelajaran PDBK adalah Tim Inklusi. Tim ini memiliki tugas utama untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus setiap PDBK, merancang program pembelajaran yang individual, serta memantau perkembangan mereka secara berkala. Dengan adanya Tim Inklusi, PDBK dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses

¹²⁸ Terlampir.

pembelajaran dan mencapai potensi terbaiknya. Ibu Syifak menjelaskan dalam proses wawancaranya sebagai berikut:

“Seperti yang saya sampaikan di awal kan ada gurunya tiga sama seperti kelas-kelas yang lain ketika ada kelas 1 gitu ya ada 1 koordinator. Koordinator itu yang ketika ada komunikasi dengan kepala sekolah kemudian yang nanti meneruskan ke teman-temannya. Ketika kita ngumpul apa program apa itu ya dengan koordinator. meskipun di raker awal semua tahu, sudah disampaikan bersama-sama. Tapi untuk rapat intern di kelas itu, misalnya dengan koordinator itu tadi. Dan tim inklusi ini kan ada 3 orang, satu koordinator, dan yang dua ini anggotanya. Sama dengan sistem desentralisasi. Tapi jika untuk semua, ya itu tadi, anak inklusi ini bukan hanya anak dari tim inklusi atau wali kelasnya, walaupun kita juga berusaha untuk menyamakan bahwa mereka adalah siswa kita, yang butuh kita semua, ketika mereka di tempat makan, di tempat sholat, dan lain sebagainya. Jadi tidak terlabel sebagai siswa dari guru tertentu saja.”¹²⁹

Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti, di mana PDBK merupakan tanggung jawab seluruh *stakeholder*. Sehingga dalam pelaksanaan sekolah, semua turut andil untuk melayani dan menghadapi PDBK. Dalam implementasinya, SD-IGS menerapkan sistem *pull-out* (model ini bertujuan agar siswa ABK dapat belajar secara klasikal dan di kelas inklusi.) yang memungkinkan PDBK mendapatkan perhatian khusus, namun keberlanjutan pembelajaran dan dukungan bagi PDBK di kelas reguler masih perlu diperhatikan agar berjalan efektif.

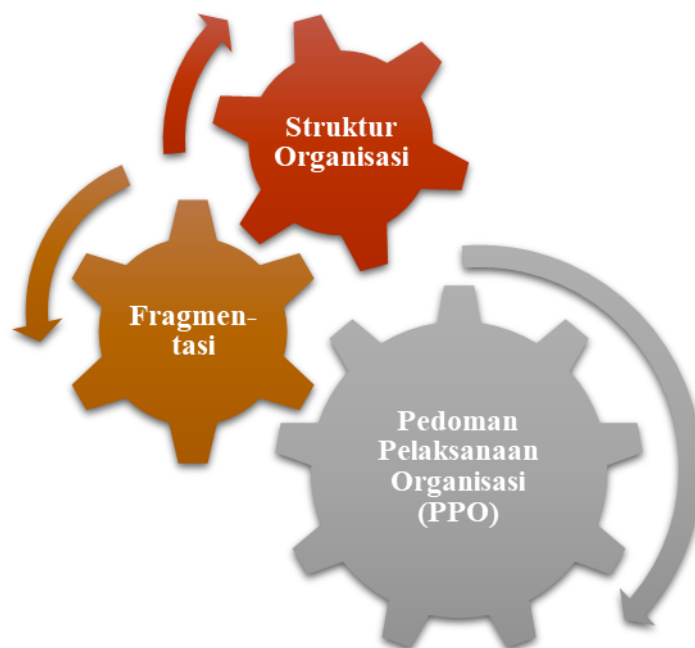
Sehingga dari paparan data tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian peran dan tugas di SD-IGS telah

¹²⁹ Lailatus Syifak, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang, 3 Juni 2024.*

terstruktur dengan baik, namun masih terdapat potensi peningkatan dalam hal kerjasama dan kolaborasi antar tenaga pendidik.

Selain itu, secara umum, proses perencanaan dan implementasi seluruh kebijakan di SD-IGS merujuk kepada *Standart Operational Procedure* SD ISLAMIC GLOBAL SCHOOL (IGS) atau Prosedur Pelaksanaan Organisasi (PPO) SD-IGS yang berisi tentang struktur organisasi SD-IGS, lingkup kewenangan organisasi, kualifikasi SDM organisasi, prosedur pengambilan keputusan, prosedur komunikasi, dan prosedur hubungan masyarakat (humas).¹³⁰

Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.27 Bagan Struktur Birokrasi SD-IGS

¹³⁰ terlampir

d. Disposisi pelaksana

Sebagai sekolah yang berkomitmen untuk menjalankan program inklusi, sikap dan kecenderungan pendidik dalam menerapkan kebijakan akomodasi PDBK perlu menjadi perhatian pelaksana sekolah. Menurut hasil dokumentasi, secara umum seluruh SDM di SD-IGS dikehendaki untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana berikut:

KUALIFIKASI SDM ORGANISASI

Kualifikasi umum atas struktur organisasi di atas yang dikehendaki adalah:

1. Mencintai dan menjiwai dunia pendidikan, utamanya pendidikan dasar.
2. Memiliki komitmen ke-Islaman dan kepedulian terhadap kemajuan umat.
3. Memahami konsep dan operasionalisasi metode belajar *Joy Learning* dan metode belajar mutakhir lainnya.

Gambar 4.28 Kualifikasi Calon SDM SD IGS Kota Malang

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, SD-IGS telah mengatur disposisi SDM dalam Prosedur Pelaksanaan Organisasi (PPO)-nya yang tercakup dalam poin nomor 2-4, sebagaimana berikut:

PROSEDUR PELAKSANAAN ORGANISASI

1. ...
2. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap komponen organisasi di lingkungan SD ISLAMIC GLOBAL SCHOOL wajib menerapkan prinsip saling memahami, membantu dan bertanggung jawab baik di lingkungan masing-masing maupun antara komponen organisasi lainnya di lingkungan SD ISLAMIC GLOBAL SCHOOL serta dengan instansi lain di luar SD ISLAMIC GLOBAL SCHOOL sesuai dengan tugas masing-masing.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SD ISLAMIC GLOBAL SCHOOL bertanggung jawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan staf masing-masing, memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi staf masing-masing, dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan kewenangannya.
5. ...

Gambar 4.29 Prosedur Pelaksanaan Organisasi SD-IGS

Spesifik merujuk kepada pelayanan pendidikan bagi PDBK, pelaksana SD-IGS berkomitmen untuk menyeragamkan seluruh *stakeholder* untuk bekerja sama dalam melayani dan menghadapi PDBK. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan oleh Bapak Santo:

“Kalau (komitmen) secara tertulis tidak ada, cuman kita kan sebar anak inklusi di setiap kelas. Jadi ya mau tidak mau setiap guru harus memahami bagaimana cara mengatasi anak inklusi. Cuma sebatas saya bilang 50% karena kita kerja sama, saling membantu menangani mereka. Jadi setiap hari ketika ada anak inklusi bermasalah, langsung laporan ke Tim Inklusi, lalu dikonsultasikan bagaimana cara menanganinya, sehingga guru tadi akan memahami cara menangani masalah tersebut. Karena pernah saya mengikuti seminar, yang menjadi penanggung jawab ABK itu bukan hanya inklusi, semua orang juga harus menjadi penanggung jawabnya. Bahkan termasuk petugas kebersihannya, karena pasti bersinggungan. Entah juga tim dapur, satpam, dan lain sebagainya. Sehingga selalu kita sampaikan ke orang-orang bahwa ABK juga termasuk anak kita. Tapi secara peraturan inklusifnya, berjalan secara normatif.”¹³¹

Selain itu juga Ibu Syifak menjelaskan sebagaimana berikut:

“Kalau seminar-seminar bersama atau Raker itu kan juga sering disinggung ya bahwa anak inklusi ini bukan hanya anak 3 guru ini tadi atau anak wali kelas tersebut anak inklusi ini ya anak semua, semua harus peduli, semua harus mempunyai perlakuan yang sama tidak ada intimidasi.”¹³²

Selain kepada stakeholder, SD-IGS juga berusaha untuk membiasakan budaya inklusi kepada siswa-siswinya. Kepala SD-IGS, Ibu Syifak menyampaikan dalam wawancaranya sebagaimana berikut:

“Yang jelas di reguler itu anak dipahamkan betul bahwa temanmu ini istimewa temanmu juga pengen seperti kamu yang apa perkembangannya sama gitu. makanya tolong dibantu bersama-sama biar temen ini juga bisa seperti kamu. Nah itu terus kita tanamkan karena kita kan juga ada program sehat, jadi anak-anak sudah terbiasa dengan disiplin positif yang ada itu

¹³¹ Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan, 6 Juni 2024.*

¹³² Lailatus Syifak, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang, 3 Juni 2024.*

berbagi, ngemong, itu muncul karena kebiasaan yang dibangun oleh *stakeholder* dan guru-guru, jadi mengalir.”¹³³



Gambar 4.30 Siswa regular membantu PDBK dalam belajar

Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.31 Bagan Disposisi SD-IGS

¹³³ Lailatus Syifak, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang, 3 Juni 2024.*

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK

Pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan akomodasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) telah diimplementasikan di SD Islamic Global School Kota Malang. Evaluasi ini akan mengungkap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif.

Untuk aspek komunikasi, salah satu tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif adalah membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perbedaan persepsi antara sekolah dan orang tua mengenai kebutuhan PDBK seringkali menjadi kendala. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Santo dalam wawancaranya yakni:

“Kalau antar kita (pihak sekolah) insyaAllah tidak ada, sih, Mbak. yang biasanya jadi masalah itu (komunikasi) dengan orang tua. Kadang kan ada orang tua itu yang ‘oh iya anak saya memang beda’, mengakui begitu. Kadang ada yang memang setengah mengakui, artinya ‘tidak seperti itu anak saya pak’. Jadi maunya itu pas di sekolah itu sama dengan yang lainnya, pelajarannya harus sama, pencapaiannya harus sama, secara sosial juga harus sama. Tetapi pada faktanya anak ini agak berbeda. Nah karena kita menemui wali murid yang seperti itu, yang kasihan wali kelasnya kadang ditabrakin.”¹³⁴

¹³⁴ Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan, 6 Juni 2024.*

Selain itu, dengan inti yang sama, Ibu Tite selaku GPK menyampaikan bahwa:

“Komunikasi kita dengan orang tua kenapa terbatas karena mereka kebanyakan orang tua (wali murid) di sini tuh bekerja, dan bekerjanya bisa sehari penuh misal hari ini ada problem kita kita sharing dengan orang tua seperti ini. nah belum tentu orang tua itu langsung menanggapi gitu lo. buat kita jadi harus seminggu beberapa hari. terus kita kan juga kalau ada apa-apa pasti harus orang tua karena sebenarnya ini kan sensitif ya.”¹³⁵

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan komunikasi pertama adalah transmisi informasi dengan orang tua selaku wali PDBK. Hal ini menunjukkan perbedaan persepsi antara sekolah dan orang tua mengenai kebutuhan PDBK seringkali menjadi hambatan dalam membangun kerjasama yang efektif.

Di samping itu terdapat tantangan lainnya, sebagaimana yang disampaikan Ibu Tite:

“Kedua, dengan wali kelas. jadi dia itu kendalanya itu masalah jadwalnya misalkan anaknya hari ini hari Senin ada di kami gitu. sudah kami beritahukan mungkin karena wali kelas sibuk, banyak-banyak tugas secara administrasi, banyak tanggung jawabnya sehingga mereka lupa untuk memberitahukan bahwa anak-anak loh sekarang di kelas inklusi. Endingnya mereka molor datengnya. Seperti jam 8 itu baru datang ke sini dan itu kan memotong waktu pembelajarannya gitu.”¹³⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara guru kelas dan GPK seringkali menyebabkan siswa datang terlambat ke

¹³⁵ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

¹³⁶ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

Kelas Sumber. Keterlambatan siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran, terutama bagi perkembangannya. Oleh karena itu, peneliti berasumsi SD-IGS membutuhkan mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa semua pihak terkait mendapatkan informasi yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.

Sedangkan dalam aspek Sumber Daya, SD-IGS menghadapi tantangan belum lengkapnya fasilitas dan media belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar PDBK. Sebagaimana pernyataan Ibu Tite dalam wawncaranya:

“Belum terpenuhinya semua kebutuhan atau fasilitas. ketika kita mengajukan rincian kebutuhan itu belum semuanya ter-cover. jadi itu masih ada yang belum terpenuhi sampai sekarang jadi tetap kami ajukan terus. Untuk mayoritas yang belum terpenuhi itu terkait media, tapi kalau media akademik mungkin hanya peta modul apa itu ya itu sudah tercover. Sedangkan cuma untuk motoriknya kita juga buat motor anak-anak kita butuh untuk media motorik anaknya, kayak trampolin, pilates, kita butuh seperti itu, tapi kita belum mendapatkannya. Iya jadi masih sebatas media kognitif. Untuk yang lain masih belum tercover tapi tetap kami ajukan tiap tahun.”¹³⁷

Namun menurut penjelasan dari Bapak Santo selaku Waka Kesiswaan, ketidaklengkapan fasilitas PDBK disebabkan banyaknya kebutuhan sekolah lain, sebagaimana dalam wawncaranya:

“Kalau masalah itu tergantung anggarannya yang kita punya sih Mbak. Tapi pasti akan selalu kita prioritaskan. Di awal tahun, pas pembentukan RAB sudah kami minta semuanya tidak hanya inklusi, wali kelas, kebersihan, dsb, kita minta acuannya selama satu tahun. Dan ini kan sudah berjalan lama, misal dalam 5 tahun, tahun pertama

¹³⁷ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

butuh apa, tahun kedua butuh apa, dan sekarang sudah mendekati lengkap. Walaupun dengan kelas sumber yang sementara seadanya.”¹³⁸

Oleh karena itu, pengadaan anggaran dan penyediaan fasilitas memang menjadi ‘PR’ bagi sekolah, sehingga sekolah perlu melakukan upaya yang lebih seperti melakukan advokasi kepada pihak sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyuarakan pentingnya memenuhi kebutuhan PDBK. Selain itu, sekolah juga bisa melakukan pengoptimalan sumber daya yang sudah ada dan mencari donator apabila memungkinkan.

Sedangkan dari aspek Disposisi dan Struktur Birokrasi, SD-IGS menghadapi tantangan yang saling berkaitan, yakni adanya kecenderungan beberapa guru yang belum mampu dan belum mau melayani PDBK, seperti yang disampaikan oleh Ibu Tite:

“Ada yang kami rasa sudah ada yang belum, karena memang seharusnya untuk menangani anak-anak ini kan itu kerja sama semua *stakeholder* untuk mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, evaluasinya seharusnya kan memang melibatkan banyak pihak, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Karena mereka teman-teman sekolah mungkin berpikir bahwa hanya kami yang mampu menangani anak-anak ini padahal tidak. Padahal seharusnya di kelas pun ketika mereka ada di kelas mereka mendapatkan pelayanan yang sama dalam sains secara akademik, bukan hanya ikut ‘pupuk bawang’. Jadi kami yang harus berjalan itu masih kami saja. Pun di lingkungan pun kalau misalkan ada anak yg bermasalah nih, katakanlah anak PDBK, itu diserahkan ke kami. Padahal anak-anak ini juga bagian dari kita semua gitu kenapa harus kami yang maju padahal disitu juga ada orang lain. Kenapa harus lapor dulu ke kami, gak langsung diganti sendiri, kan bisa namanya gitu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kami lebih suka seperti itu. Kan

¹³⁸ Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan, 6 Juni 2024.*

berarti beliau mau berusaha tidak harus yang Miss ini loh. Itu maka kita pusing, makanya kita sukanya sharing. Tapi belum semuanya memang mungkin proses sambil berjalan kali ya.”¹³⁹

Dari hasil wawancara tersebut Ibu Tite merasa bahwa pembagian tugas untuk melayani dan mengayomi PDBK lebih berat hanya kepada GPK saja. Apabila terjadi masalah dengan PDBK di luar kelas, guru yang lain selalu melimpahkan kepada GPK untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, SD-IGS perlu meningkatkan kesadaran dan kompetensi seluruh tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada aspek pedagogik, tetapi juga pada pemahaman tentang kebutuhan khusus PDBK, esensi mengajar PDBK, serta evaluasi individu secara berkala. Dengan demikian, semua guru dapat berperan aktif dalam melayani PDBK, sehingga beban tidak hanya terpusat pada GPK.

Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara GPK dan guru kelas reguler menyebabkan beban kerja GPK menjadi sangat berat dan berpotensi menghambat perkembangan optimal PDBK. Hal ini tentu bukan merupakan fungsi dan esensi struktur birokrasi yang ideal bagi sekolah inklusi. Sehingga Ibu Syifak sebagai Kepala Sekolah menjelaskan bahwa, sekolah sering kali mengadakan seminar, dan bahkan pada Rapat Kerja (raker) disampaikan bahwa melayani PDBK adalah tanggung jawab bersama, sebagaimana berikut:

¹³⁹ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

“Kalau seminar-seminar bersama atau raker itu kan juga sering disinggung ya bahwa anak inklusi ini bukan hanya anak 3 guru ini tadi atau anak wali kelas tersebut anak inklusi ini ya anak semua, semua harus peduli, semua harus mempunyai perlakuan yang sama tidak ada intimidasi. Jadi ketika misalnya tiba-tiba mereka ke kamar mandi ndak kembali atau ke kantin lama itu semuanya sudah paham bahwa anak ini khusus, perlu pendampingan khusus seperti itu bahkan ketika salat pun itu kan kadang bikin ulah yang usek atau apa dan apa dari guru-guru semua dipahamkan seperti itu. Pernah juga panggil tim narasumber ahli juga terus pelatihan-pelatihan juga ikut guru-gurunya kan juga sudah sering mengikuti. Nah itu terus kita tanamkan karena kita kan juga ada program sehat, jadi anak-anak sudah terbiasa dengan disiplin positif yang ada itu berbagi, ngemong, itu muncul karena kebiasaan yang dibangun oleh *stakeholder* dan guru-guru, jadi mengalir.”¹⁴⁰

Dilanjutkan oleh Bapak Santo menjelaskan bahwa, sebagaimana berikut:

“Kalau dengan teman-teman (pihak sekolah) karena memang setiap semester kita adakan Bimtek, khusus untuk kita sendiri, biasanya teman-teman tim inklusi yang *ngasih* materi, atau kita kirimkan beberapa orang, terutama wali kelas, jika pas ada kesempatan dibina di dinas, kemudian ilmu disana disebar ke teman-teman yang lain. Dari dinas sendiri kita mendapat perhatian khusus karena kita sudah mendaftarkan diri sebagai sekolah inklusi. Kebetulan juga pengawas sekolah kita memang dari orang (lulusan pendidikan) inklusi.

Hal lain yang kita lakukan adalah setiap kali istirahat kita selalu minta ke teman-teman itu menyebar di semua tempat. Minimal anak-anak ini akan terawasi, sehingga sifatnya partisipatif. Karena pernah saya mengikuti seminar, yang menjadi penanggung jawab ABK itu bukan hanya inklusi, semua orang juga harus menjadi penanggung jawabnya. Bahkan termasuk petugas kebersihannya, karena pasti bersinggungan. Entah juga tim dapur, satpam, dan lain sebagainya. Sehingga selalu kita sampaikan ke orang-orang bahwa ABK juga termasuk anak kita. Tapi secara peraturan inklusifnya, berjalan secara normatif.”¹⁴¹

¹⁴⁰ Lailatus Syifak, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang, 3 Juni 2024.*

¹⁴¹ Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan, 6 Juni 2024.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah dan GPK memiliki kemauan dan tujuan yang sama, yakni semua pelaksana sekolah berkemampuan dan berkemauan yang sama dalam melayani PDBK, dan tidak hanya berpusat kepada GPK. Oleh karena itu perlu diadakannya evaluasi bersama yang lebih lanjut. Meskipun setiap tenaga pendidik telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, namun kerjasama yang lebih erat di antara mereka sangat diperlukan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih efektif dan mencakup seluruh aspek bagi PDBK, baik *treatment* dan perhatian di kelas. Oleh karena itu, disarankan agar SD-IGS dapat memperkuat kerjasama dan kolaborasi antar tenaga pendidik melalui pembentukan tim kolaboratif, penyelenggaraan kegiatan pengembangan profesional bersama, atau pengembangan sistem komunikasi yang lebih efektif. Dengan demikian, kualitas pendidikan di SD-IGS dapat ditingkatkan secara signifikan.

Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.32 Evaluasi SD-IGS

3. Hasil Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran

Adapun proses hasil implementasi kebijakan akomodasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Islamic Global School Kota Malang dapat ditinjau melalui hasil perubahan atau peningkatan mutu pembelajaran yang dialami PDBK. Mutu pembelajaran tersebut merujuk kepada 2 aspek yang dirincikan sebagai berikut:

a. *Output*

Setelah kebijakan akomodasi PDBK diterapkan di SD-IGS, *output* dapat dilihat dan dapat diukur dari proses pembelajaran. *Output* biasanya dapat diukur dari nilai akademik, keterampilan, atau produk proyek dari pembelajaran. Namun, bagu PDBK, *output* keberhasilan pembelajaran tidak dapat diukur dari nilai akademik, melainkan dari kemandiriannya, kemampuan membaca, motoric halus dan kasar, dan kemampuan lainnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Santo dalam wawancaranya, yakni:

“Untuk prestasi belajar yang disamakan dengan siswa reguler, tidak bisa kita bandingkan mbak. Sejauh ini memang kita belum menemukan yang hampir seimbang dengan siswa reguler. Minimal pencapaiannya mereka bisa membaca, yang penting mereka punya KKM untuk dia sendiri, yang penting selalu ada kenaikan dari kelas 1 seperti apa, kelas 2 seperti apa, selalu ada progres jenjangnya. Jadi melihat anak-anak yang pola belajarnya yang beda, kemudian kita harus kasih soal yang sama dengan yang lain, saya kira itu menyiksa mbak. Ya untungnya dinas kita mengakomodasi itu, jadi tidak semua dipukul rata, tapi tetap ada jalur anak ini ikut ujian inklusi. Materinya sama, temanya sama, tapi soalnya dibuat beda, bisa dalam bentuk gambar, atau disederhanakan.”¹⁴²

Output masing-masing PDBK pun berbeda-beda, tidak dapat disamakan atau diselaraskan, kecuali memang PDBK memiliki karakteristik yang sama. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Tite, yakni:

“Untuk program perkembangan per anak kan beda jadi kami sesuaikan dengan kemampuannya. kecuali kalau misal program khusus untuk hari Jumat kan kita ada namanya program khusus

¹⁴² Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan, 6 Juni 2024.*

ya ini. Nah program khusus itu program non akademik, seperti pembiasaan. jadi itu general misalnya untuk niat berwudhu, niat sholat, terus kita wudhu yang benar, sikap sholat yang benar gitu. Karena kan anak-anak ini belum paham yang benar Seperti apa, Jadi itu kan pembiasaan juga. karena itu kan juga dibutuhkan untuk di luar ketika mereka di masjid shalat berjamaah itu kan mereka butuh Jadi kami programnya di situ program khususnya.”¹⁴³

Untuk secara riilnya, Ibu Tite juga menambahkan beberapa hasil pembelajaran dari 5 PDBK yang sudah terlihat *outputnya*:

“Ini kan per anak berbeda-beda ya mbak ya, dari yang saya pegang dulu contohnya 5 anak ini, *output* kami untuk hasil uji coba kami ini sebelumnya dari ada yang benar-benar dia nol, enggak bisa membaca, enggak tahu huruf, suka tantrum dari kelas 1; sekarang Dia kelas 5 itu dia sudah bisa membaca, dia nalarnya sudah main, itu kami luluskan. Ada juga yang jadi itu mereka itu kalau Lando ini ada satu yang dia tuh tantruman banget. Nah ketika di masuk sini emosinya mulai turun dia mudah tantrum lagi, tapi memang aslinya dia pintar hanya saja emosinya yang suka meledak-ledak. tapi ketika di sini dia sudah mencapai target bahwa ‘oke anak ini sudah tenang untuk full di reguler’ itu kami lepaskan. Ada lagi Umar, yang bener-bener 0, tidak tahu angka huruf dia tidak tahu, sekarang kelas 5 dia sudah bisa membaca mengikuti pembelajaran materi pembelajaran di kelas nalarnya juga sudah main itu kami lepaskan. Terus ada Angel, Alody, Ali. Nah itu 5 *output* yang mungkin bisa dilihat itu sebagai hasil dari proses belajar mereka selama ini bersama kami.”¹⁴⁴

Oleh karena itu, terkait *output* PDBK, Bapak Santo menambahkan juga sebagai berikut:

“Saya melihatnya sebagai waka kesiswaan, implementasi kebijakan akomodasi ini sudah cukup berhasil dari Tim Inklusi. Kalau kita mau menyamakan dengan pencapaian siswa reguler, saya kira terlalu kasihan menuntut anak inklusi untuk bisa

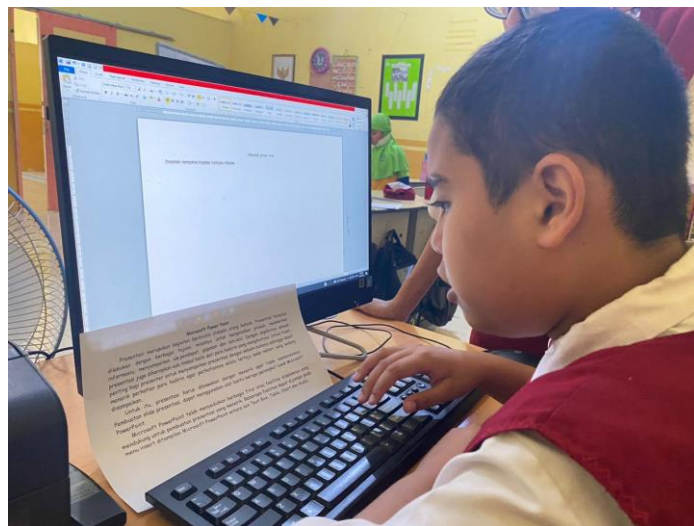
¹⁴³ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

¹⁴⁴ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

matematika, kan kasihan. Bagi kami, anak-anak ini minimal tahu anak in harus apa, mandiri, apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua, selalu kita cek anak ini kelebihannya di mana, karena anak ini pasti punya kelebihan dan selalu kita arahkan. Ternyata ada yang bisa nyanyi, ada yang pintar sholawatan, kita fokuskan di situ. Jadi selain anak ini bisa mandiri, kemudian tau kelebihan dia dimana, saya kira itu sudah berhasil sih, Mbak.”¹⁴⁵



Gambar 4.33 PDBK mampu maju ke depan kelas dengan percaya diri



Gambar 4.34 PDBK mampu mengoperasikan komputer seperti siswa regular lainnya

¹⁴⁵ Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan*, 6 Juni 2024.

Selain itu, *output* PDBK juga dapat dilihat dari partisipasinya dalam pembelajaran ataupun kegiatan sekolah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Santo dalam wawancara sebagai berikut:

“Partisipasi anak-anak selalu kita libatkan, dalam kegiatan apapun tidak pernah kita bedakan. Dan kalau bisa di beberapa kegiatan, mereka yang selalu kita tampilkan. Apapun kemampuan mereka. Kita konsultasikan dengan tim inklusi, anak ini bisa apa. Bahkan baru saja lulus tahun kemarin, dia vokalnya bagus, setiap event dia vokalnya. Bahkan ketika kita adakan IGS Got Talent, dia juaranya, Mbak, dan ini penilaiannya objektif karena jurinya kita ambil dari luar. Jadi memang selalu kita libatkan, walaupun dengan pengawasan yang ketat. Sampai sholat jama’ah pun itu tetap ikutkan, tapi guru inklusi kita beri tahu, (tolong) dampingi. Karena kadang pernah satu kali waktu, sudah khusyuk sholat ada yang teriak-teriak dari belakang.”¹⁴⁶

Secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa *output* yang diharapkan dari pembelajaran PDBK adalah *softskill*-nya, yakni meningkatnya taraf kemandirian dan kemampuan sosialnya, termasuk kemampuan beradaptasi; di mana kedua kemampuan tersebut akan menunjang pendidikan dan kehidupan PDBK selanjutnya, salah satunya adalah dapat berpartisipasi mandiri dan memahami pembelajaran di kelas sebagaimana teman-temannya. Adapun *output* yang terukur yang dapat dilihat dari perkembangan PDBK adalah kemampuan mengikuti instruksi, kemampuan calistung (membaca, menulis, dan berhitung), motorik kasar, dan motorik halus.

¹⁴⁶ Akhmad Susanto, *Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang Bidang Kesiswaan, 6 Juni 2024.*

b. *Outcome*

Outcome merupakan mutu pembelajaran yang dampaknya bersifat jangka panjang atau perubahan yang lebih mendalam sebagai akibat dari proses pembelajaran. *Outcome* lebih bersifat kualitatif dan sulit diukur secara langsung dari suatu proses pembelajaran setelah diimplementasikannya kebijakan akomodasi PDBK di SD-IGS.

Setelah terbentuknya taraf kemandirian dan kemampuan bersosialisasi dengan sekitarnya, besar harapannya akan terbentuk suatu *Outcome* pada diri PDBK, salah satunya adalah munculnya potensi dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing PDBK. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Syifak, yakni:

“Alhamdulillah sampai berjalannya IGS selama 14 tahun ini, kami tidak ada masalah, meskipun kami ada PDBK, tapi mereka juga ya bisa lulus dengan keahliannya masing-masing. Dari 620 an siswa disini ikut IGS Got Talent waktu itu, dengan pengunjukan bakat yang macem-macem dan ada jurinya sendiri-sendiri. Nah, yang menang itu dia, sholawat, padahal dia ABK itu juara 1. IGS Got Talent itu acara ulang tahun IGS, biasanya dari masing-masing kelas itu menampilkan perwakilan kelasnya yang terbaik. Dan itu digelar bersama, live, itu nanti yang terbaik siapa, dan itu terbawa sampai di SMP. Ketika di SMP tau kan punya rekam jejak dari kita, dan itu dilanjutkan untuk daftar jalur prestasi. Nah, dari situ setiap acara di SMP nya dia selalu dipake.

Nah selain itu ketika sudah dari alumni sini ya Mbak ya jadi Alhamdulillah salat itu kita itu udah nggak nyuruh malah mereka yang mengingatkan kita. Kadang dulu ada yang tantrum aja ya, sekarang tuh SMP ya Bisa itu bisa naik kendaraan sendiri, bisa masuk SMP negeri, kadang kalau nggak ada kesibukan ya mampir kesini mencari gurunya, salim sama guru-guru disini, ada yang hafal juz 30 padahal dia down syndrome, dan lain sebagainya. Dan (laporan) itu merupakan salah satu

bentuk kepuasan orang tua kepada kami, ya Alhamdulillah anaknya dapat pelayanan. Soalnya kan ndak mesti sekolah yang mau melayani. Kan soalnya kadang ada, anak yang pindah kesini karena dibully di sekolah yang lama, di sini anaknya ya nyaman, bahkan sampai lulus.”¹⁴⁷

Selain itu, terdapat beberapa PDBK yang berhasil mencapai beberapa indikator sehingga dinyatakan dapat mengikuti kelas regular tanpa pendampingan dari GPK lagi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Tite, sebagaimana berikut:

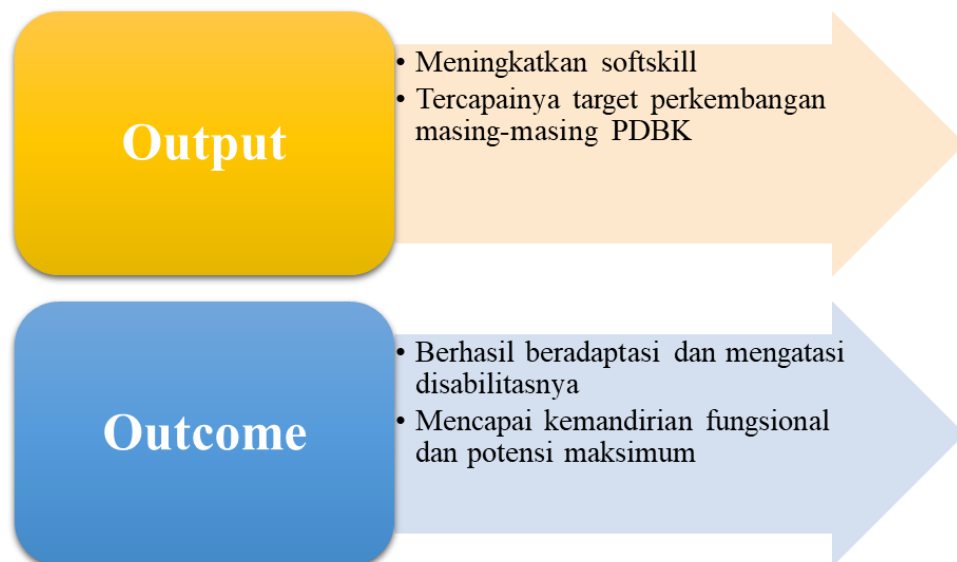
“Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Mbak. Semester ini ada 5 anak yang kita lepas di kelas regular. Untuk pemantauan di kelas itu kami crosscheck, kami pastikan dengan wali kelasnya. Katanya sudah oke aman, anaknya aman, anaknya sudah mampu. karena kan kami kami bilang bahwa 5 anak ini kami uji coba kualitasnya masing-masing. Nah kalau memang ada kendala dilaporkan ke Kami nanti kami akan mendapatkan tapi untuk selama ini aku masih oke. Jadi bisa dikatakan berhasil ya selama 2 bulan ini. Sebelumnya juga sudah ada yang pernah kita lepas ada tiap tahunnya.”¹⁴⁸

Adapun *Outcome* jangka panjang dan lebih mendalam yang diharapkan adalah sembuhnya disabilitas yang disandang oleh PDBK tersebut. Atau lebih tepatnya adalah mencapai kemandirian fungsional dan mencapai potensi maksimum sehingga berhasil beradaptasi dan mengatasi disabilitas yang disandangnya. Bahkan dengan mencapai kondisi tersebut, beberapa PDBK dapat dinyatakan terbebas dari label disabilitasnya.

¹⁴⁷ Lailatus Syifak, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Islamic Global School Kota Malang, 3 Juni 2024.*

¹⁴⁸ Anugrah Try Nastiti, *Hasil Wawancara Dengan Koordinator Tim Inklusi/GPK SD Islamic Global School Kota Malang, 9 Agustus 2024.*

Adapun jika digambarkan melalui bagan akan menjadi sebagaimana berikut:



Gambar 4.35 Bagan Hasil Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK SD-IGS

D. Temuan Penelitian

1. Proses Perencanaan Dan Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh SD-AS terkait tahap interpretasi implementasi kebijakan akomodasi untuk PDBK terdiri dari beberapa pendekatan:

- 1) *Bottom to top* atau *Bottom Up*,
- 2) *Top down*.

Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh SD-IGS terkait implementasi kebijakan akomodasi untuk PDBK terdiri dari beberapa interaksi: Komunikasi Internal, Komunikasi Eksternal.

Adapun untuk menjaga efektivitas dan keselarasan interpretasi komunikasi, pihak SD-AS dan SD-IGS keduanya menerapkan 2 jenis komunikasi, yakni:

- 1) Komunikasi langsung (*direct communication*),
- 2) Komunikasi tidak langsung (*indirect communication*).

Kedua jenis komunikasi ini mampu meminimalisir *miss communication* antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK, bagi pejabat sekolah, wali kelas, GPK, dan wali PDBK. Sehingga dengan komunikasi ini, sekolah dapat berhasil mendorong terjadinya transmisi komunikasi efektif, dan interpretasi yang selaras serta transparan.

b. Sumber Daya

Tahap organisasi implementasi kebijakan akomodasi PDBK terkait sumber daya, SD-AS menyediakan beberapa fasilitas di antaranya:

- 1) SDM yang berkualitas dan kompeten, salah satunya penyediaan 1 GPK untuk 1 PDBK sesuai kebutuhan dan ketunaannya.
- 2) Ruang inklusi yang berfungsi sebagai ruang pembelajaran tersendiri bagi PDBK yang bersifat fleksibel dapat digunakan sesuai kebutuhan

- 3) Kurikulum terdiferensiasi, yakni PPI, pembelajaran yang disederhanakan, bahkan kurikulum reguler (jika PDBK dirasa sudah mampu)
- 4) Anggaran sekolah yang diprioritaskan untuk program inklusi.

Sedangkan tahap organisasi implementasi kebijakan akomodasi PDBK terkait sumber daya, SD-IGS menyediakan beberapa fasilitas di antaranya:

- 1) Sumber Daya Manusia yang kompeten dan kapabel, yakni 3 orang GPK yang termasuk dalam tim inklusi, yang merupakan lulusan Psikologi dan Pendidikan Luar Biasa (PLB). Selain itu, sekolah juga menunjang kompetensi guru-guru lainnya melalui pelatihan dan *workshop*.
- 2) Ruang Sumber yang dapat digunakan sebagai ruang penunjang perkembangan PDBK dengan jadwal yang telah disusun sedemikian rupa.
- 3) Program pembelajaran sesuai kondisi dan kebutuhan PDBK
- 4) Anggaran sekolah yang diprioritaskan untuk program inklusi.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang diterapkan di SD-AS menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dan kolaborasi yang kuat antar berbagai komponen sekolah dalam mendukung implementasi kebijakan akomodasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator, guru

kelas, dan GPK, tidak terkecuali Guru Pendidikan Al Quran (GPQ), sekolah mampu memberikan layanan yang lebih terintegrasi dan efektif. SD-AS juga menggunakan prinsip fleksibilitas, adaptif, dan akuntabilitas untuk mengimplementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK, baik dari proses perencanaan, pengimplementasian, *controlling*, dan evaluasi.

Sedangkan pembagian peran dan tugas di SD-IGS telah terstruktur dengan baik, untuk mendukung pembelajaran dan mengakomodasi layanan bagi PDBK, SD-IGS membentuk Tim Inklusi yang berisi 3 orang GPK yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan khusus setiap PDBK, merancang program pembelajaran yang individual, serta memantau perkembangan mereka secara berkala. Selain itu, Tim Inklusi dan wali kelas bekerja sama untuk menerapkan sistem *pull out* dengan jadwal yang terstruktur setiap minggunya.

d. Disposisi pelaksana

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan akomodasi PDBK, pada masa rekrutmen, SD-AS melakukan 2 kali wawancara, yakni wawancara skill dan wawancara profesionalitas. Di mana kedua wawancara tersebut calon SDM SD-AS akan diberi pertanyaan studi kasus dan dinilai pandangannya dalam melaksanakan tugas sekolah sebagai pelaksana. Selain itu, warga sekolah dan *stakeholder* SD-AS bersama-sama berkomitmen dan memiliki motivasi yang tinggi, sehingga tumbuhlah budaya sekolah yang inklusif, termasuk dalam

kalangan siswa, di mana mereka juga terbiasa membantu dan mendukung pembelajaran PDBK. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya PDBK dalam kelas, termasuk pembelajaran, jadwal piket, pembagian kelompok, kegiatan outing, rutinan sholat di masjid, dan lain sebagainya.

Sedangkan warga sekolah dan *stakeholder* SD-IGS berusaha membentuk disposisi pelaksana/SDM dimulai proses rekrutmen, di mana mereka diharuskan memenuhi kualifikasi SDM Organisasi yang telah ditentukan. Selain itu SD-IGS juga memiliki Prosedur Pelaksanaan Organisasi (PPO) yang harus ditaati dan dilaksanakan seluruh warga sekolah, terutama dalam melayani akomodasi PDBK. Tidak hanya pelaksana sekolah, para siswa pun juga wajib terlibat dalam mendukung pembelajaran PDBK.

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK

Pada implementasi kebijakan akomodasi PDBK di masing-masing sekolah, terdapat evaluasi di tiap-tiap tahapnya. Pada tahap interpretasi, baik SD-AS maupun SD-IGS menghadapi tantangan terkait komunikasi eksternal dengan orang tua selaku wali PDBK ataupun masyarakat. Tantangan tersebut berupa orang tua yang kurang kooperatif, orang tua yang *denial* dengan kebutuhan dan ketunaan PDBK, dan stigma masyarakat yang memandang PDBK sebelah mata. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam internal sekolah adalah kurangnya koordinasi antara guru kelas dengan GPK. Sehingga untuk mencapai indikator komunikasi

yang efektif, jelas, dan konsisten sekolah membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membangun komunikasi yang efektif, jelas, dan konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun rencana komunikasi yang jelas, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan memberikan hasil yang optimal.

Adapun pada tahap organisasi, terdapat tantangan seperti kurangnya fasilitas dan sarana yang dibutuhkan, sering bergantinya GPK karena alasan pribadi atau bervariasinya kemampuan pelaksana sekolah dalam menghadapi PDBK, dan juga anggaran yang masih dirasa kurang. Oleh karena itu, untuk mencapai indikator sumber daya yang memadai, sekolah perlu melakukan upaya ganda, baik secara internal maupun eksternal. Di internal, sekolah perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan seluruh komponen sekolah dalam upaya memenuhi kebutuhan PDBK. Secara eksternal, sekolah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Sedangkan pada tahap aplikasi muncul tantangan adanya kecenderungan beberapa guru yang belum mampu dan belum mau melayani PDBK walaupun fragmentasi atau pembagian peran dalam prosedur organisasi telah dilaksanakan. Pelaksana sekolah sering kali memusatkan tanggung jawab hanya kepada GPK. Oleh karena itu, untuk mencapai indikator disposisi dan struktur birokrasi yang adaptif dan

akuntabel, diperlukan adanya evaluasi berkala, baik secara online melalui platform tertentu maupun secara observasi lapangan.

3. Hasil Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran

a. *Output*

Output yang berhasil muncul dari hasil implementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK dari kedua sekolah adalah perkembangan *softskill*-nya, yakni meningkatnya taraf kemandirian dan kemampuan sosialnya, termasuk kemampuan beradaptasi; di mana kedua kemampuan tersebut akan menunjang pendidikan dan kehidupan PDBK selanjutnya, salah satunya adalah dapat berpartisipasi mandiri dan memahami pembelajaran di kelas sebagaimana teman-temannya. Adapun *output* yang terukur yang dapat dilihat dari perkembangan PDBK adalah kemampuan mengikuti instruksi, kemampuan calistung (membaca, menulis, dan berhitung), motorik kasar, dan motorik halus.

Adapun *output* juga disesuaikan dengan terapi yang dilakukan oleh masing-masing PDBK; bagi PDBK yang menjalani terapi wicara, maka *output*nya adalah PDBK dapat mengucapkan kata-kata dengan jelas; bagi PDBK yang menjalani terapi okupasi adalah PDBK dapat terampil mengerjakan aktivitas harian seperti makan, berpakaian, dan bermain; dan lain sebagainya.

b. *Outcome*

Sedangkan *Outcome* yang berhasil muncul dari hasil implementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK adalah mencapai kemandirian fungsional dan mencapai potensi maksimum sehingga berhasil beradaptasi dan mengatasi disabilitas yang disandangnya. Bahkan dengan mencapai kondisi tersebut, beberapa PDBK dapat dinyatakan terbebas dari label disabilitasnya.

Outcome yang muncul dari PDBK SD-AS di antaranya adalah Mas Rafli yang mampu di bidang IT, Mbak Vivi yang berhasil di bidang Modelling dan Make Up, Mas Zidan yang berhasil di bidang Tahfidz dan Dai, Mas Raka yang berkembang di bidang fotografi, serta beberapa PDBK penyandang ADHD yang secara resmi dinyatakan sembuh dan dinilai mampu sekolah di sekolah reguler.

Sedangkan *Outcome* yang muncul dari PDBK SD-IGS di antaranya adalah alumni yang berhasil masuk ke SMP reguler, PDBK yang dapat mengembangkan potensinya di bakat non-akademiknya, dan PDBK yang mencapai indikator perkembangannya dan dinyatakan mampu dan layak belajar di kelas reguler bersama teman-teman lainnya.

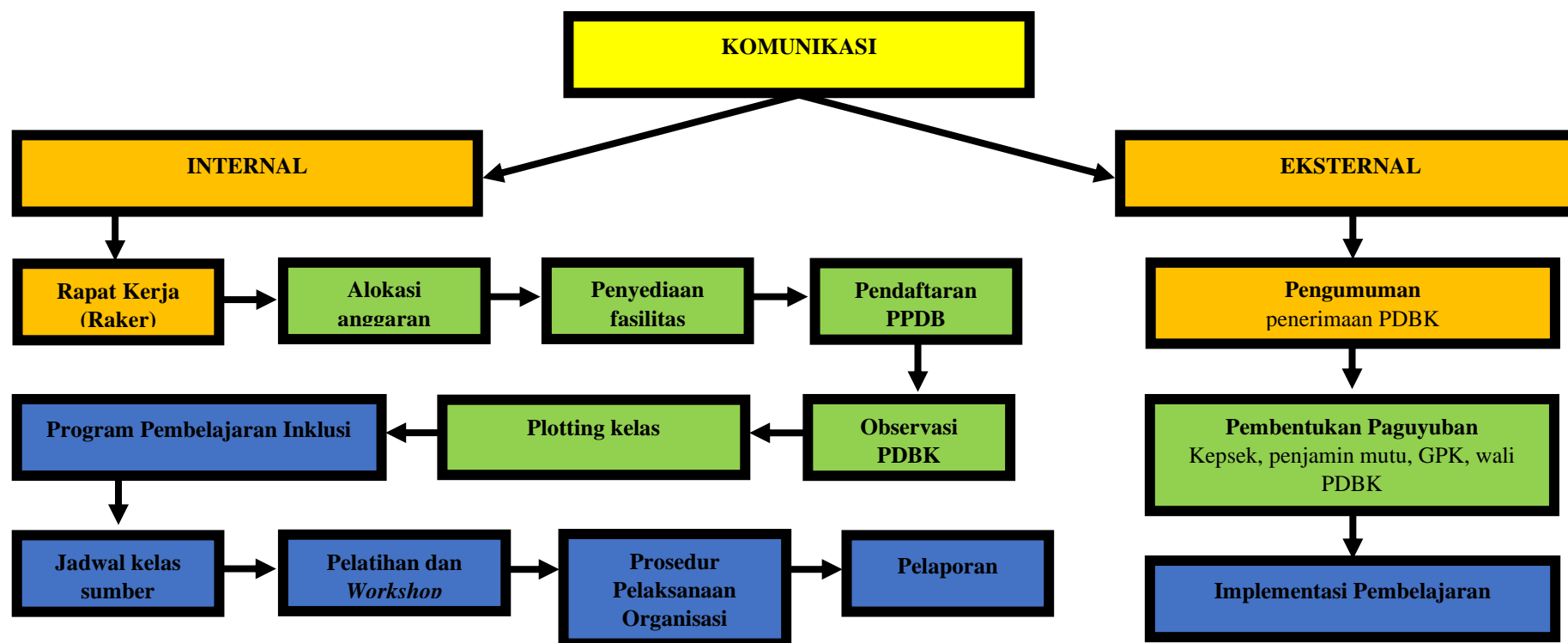
Untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam membaca serta memahami hasil penelitian di atas, maka hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk tabel. Adapun tabel hasil penelitian sebagai berikut:

No.	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian SD Anak Saleh	Temuan Penelitian SD Islamic Global School
1.	Proses Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK	<p>Tahap Interpretasi</p> <p>a. Komunikasi Komunikasi terjalin secara Bottom Up dan Top Down, serta terdapat 2 jenis komunikasi, yakni komunikasi langsung dan tidak langsung.</p> <p>Tahap Organisasi</p> <p>b. Sumber Daya Terdiri dari SDM 1 GPK untuk 1 PDBK, Ruang Inklusi yang fleksibel untuk digunakan, dan Kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan PDBK, serta anggaran yang diprioritaskan untuk program inklusi.</p> <p>c. Struktur Birokrasi Adanya struktur organisasi dan pembagian peran yang jelas dan kolaborasi yang kuat dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator, guru kelas, dan GPK, tidak terkecuali Guru Pendidikan Al Quran (GPQ).</p> <p>Tahap Aplikasi</p> <p>d. Disposisi Melakukan proses rekrutmen dengan 2 wawancara, serta warga sekolah dan stakeholder bersama-sama berkomitmen menerapkan budaya inklusi. Dalam implementasinya juga diterapkan pelatihan atau</p>	<p>Tahap Interpretasi</p> <p>a. Komunikasi Komunikasi terjalin dalam interaksi internal dan eksternal, serta terdapat 2 jenis komunikasi, yakni komunikasi langsung dan tidak langsung.</p> <p>Tahap Organisasi</p> <p>b. Sumber Daya Tim inklusi yang terdiri dari 3 GPK, Kelas Sumber yang terjadwal untuk digunakan, Program pembelajaran sesuai kondisi dan kebutuhan PDBK dan Anggaran sekolah yang diprioritaskan untuk program inklusi.</p> <p>c. Struktur Birokrasi Pembagian peran dan tugas di SD-IGS telah terstruktur dengan membentuk Tim Inklusi yang berisi 3 orang GPK. Selain itu SD-IGS juga memiliki Prosedur Pelaksanaan Organisasi (PPO).</p> <p>Tahap Aplikasi</p> <p>d. Disposisi Membentuk disposisi pelaksana/SDM dimulai proses rekrutmen, di mana mereka diharuskan memenuhi kualifikasi SDM Organisasi yang telah ditentukan. Dalam implementasinya juga diterapkan kolaborasi dalam</p>

		workshop bagi guru. Hal ini juga didorong dengan motto kerja “Menerima dengan ikhlas, dan bekerja dengan hati.”	melayani PDBK, pelatihan guru, dan budaya inklusi.
2.	Evaluasi Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretasi: orang tua kurang kooperatif, adanya stigma buruk tentang PDBK • Organisasi: Sumber daya manusia memiliki kompetensi yang bervariasi, dan sering berganti-ganti • Aplikasi: perlu dilakukan evaluasi kinerja secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretasi: kurangnya koordinasi antar pelaksana sekolah, serta orang tua denial dan kurang kooperatif • Organisasi: Sumber daya kurang memadai, baik SDM maupun fasilitas • Aplikasi: tanggung jawab berpusat pada Tim Inklusi
3.	Hasil Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran	<p>a. Output <i>Output</i> yang berhasil muncul dari adalah perkembangan <i>softskill</i>-nya, yakni meningkatnya taraf kemandirian dan kemampuan sosialnya, termasuk kemampuan beradaptasi. Adapun <i>output</i> juga disesuaikan dengan terapi yang dilakukan oleh masing-masing PDBK.</p> <p>b. Outcome <i>Outcome</i> yang berhasil muncul dari hasil implementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK adalah mencapai kemandirian fungsional dan mencapai potensi maksimum sehingga berhasil beradaptasi dan mengatasi disabilitas yang disandangnya.</p>	<p>a. Output <i>Output</i> yang berhasil muncul dari adalah perkembangan <i>softskill</i>-nya, yakni meningkatnya taraf kemandirian dan kemampuan sosialnya, termasuk kemampuan beradaptasi. Adapun <i>output</i> juga disesuaikan dengan terapi yang dilakukan oleh masing-masing PDBK.</p> <p>b. Outcome <i>Outcome</i> yang berhasil muncul dari hasil implementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK adalah mencapai kemandirian fungsional dan mencapai potensi maksimum sehingga berhasil beradaptasi dan mengatasi disabilitas yang disandangnya.</p>

Paparan penelitian ini apabila digambar melalui bagan, maka tergambar sebagai berikut:

ALUR IMPLMENTASI SD-IGS KOTA MALANG



4.2 Bagan Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK SD Islamic Global School Kota Malang

Keterangan:

Warna	Tahap
Yellow	Interpretasi
Green	Organisasi
Blue	Aplikasi

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Inklusi di Kota Malang

Kebijakan akomodasi PDBK adalah salah satu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim pada Agustus 2023 lalu sebelum purna jabatan. Kebijakan ini tertuang pada Permendikbud no. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak (AYL) bagi peserta didik penyandang disabilitas; yang merupakan penyempurnaan kebijakan sebelumnya, yakni Permendiknas no. 70 Tahun 2009. Permendikbud no. 48 Tahun 2023 ini mengatur tentang akomodasi minimal yang wajib disediakan oleh sekolah sampai pemerintah untuk mendukung pembelajaran bagi PDBK. Implementasi kebijakan ini telah mulai diterapkan, ditinjau dari adanya kebijakan pemerintah yang menghimbau semua sekolah agar tidak menolak proses pendaftaran calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan akomodasi PDBK tersebut, diperlukan perencanaan matang dan komprehensif, serta proses implementasi sistematis. Teori implementasi kebijakan George Edward III dapat menjadi kerangka analisis yang berguna untuk memahami proses perencanaan dan implementasi kebijakan akomodasi PDBK. Pada teori ini disebutkan bahwa untuk mengimplementasikan

kebijakan publik perlu memperhatikan 4 faktor, di mana 4 faktor itu apabila terlaksana dengan baik, maka proses implementasi akan berjalan dengan baik, dan hasil akhir hasil implementasi kebijakan tersebut adalah tercapainya tujuan kebijakan.

Di lain sisi, teori Charles O. Jones menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup 3 aktivitas penting, mencakup interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Dalam penelitian ini, hasil penelitian dapat disajikan dengan mengolaborasikan teori George C. Edward III dan teori Charles O. Jones untuk meninjau keberhasilan dan efektivitasnya. Sehingga akan didapatkan sebagaimana berikut: 1) tahap interpretasi dengan memperhatikan faktor komunikasi; 2) tahap organisasi memperhatikan faktor sumber daya dan faktor struktur birokrasi; 3) tahap aplikasi memperhatikan faktor disposisi.

1. Tahap Interpretasi Dengan Faktor Komunikasi

Kualitas komunikasi dalam tahap interpretasi sangat krusial. Pada tahap ini, pelaksana sekolah berusaha untuk menyampaikan maksud dan tujuan suatu kebijakan diterapkan. Komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya akan memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan kebijakan, peran masing-masing, serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Keberhasilan komunikasi tersebut ditentukan oleh tiga indikator penting,

penyaluran komunikasi (transmisi), kejelasan komunikasi (akurasi), dan konsistensi komunikasi.¹⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada 2 sekolah inklusi Kota Malang. Pertama, SD Anak Saleh (SD-AS), di mana peneliti memperoleh data bahwa untuk memenuhi indikator transmisi, maka pertama-tama sekolah perlu melakukan komunikasi secara *Bottom to top* (guru ke pimpinan sekolah), *top down* (pimpinan sekolah ke para guru). Kedua, SD Islamic Global School, di mana komunikasi yang dilakukan terdiri dari komunikasi internal, yakni antar pihak sekolah yang terlibat langsung; dan komunikasi eksternal, yakni dengan wali/orang tua PDBK atau masyarakat luas. Penyaluran komunikasi ini bertujuan agar semua pihak di sekolah dipastikan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai, serta peran masing-masing dalam pengimplementasian kebijakan akomodasi PDBK.

Menurut Muhammad Yasin, model komunikasi yang dilakukan kedua sekolah merupakan komunikasi organisasi, yang mana setelah semua pihak menerima informasi, diharapkan menghasilkan perubahan tingkah laku di dalam organisasi, baik antar pimpinan, guru-guru, dan wali PDBK yang terlibat dalam pemberian ataupun mentransfer komunikasi.¹⁵⁰ Komunikasi ini memungkinkan pertukaran ide bahkan terjalinnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat, sehingga implementasi

¹⁴⁹Widya Rhenata Sianturi et al., "Implementasi Kebijakan Program Jak-Lingko Transjakarta dalam Upaya Perbaikan Transportasi Publik di Pinang Ranti Jakarta Timur," *ANTASENA: Governance and Innovation Journal* X, no. X (2023), 27.

¹⁵⁰ Muhamad Yasin et al., "Menuju Pembelajaran Efektif Editor :," n.d., 55.

kebijakan akomodasi PDBK dapat berjalan secara berkelanjutan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Selanjutnya komunikasi ini juga perlu memenuhi indikator akurasi, di mana segala informasi harus disampaikan dengan jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi bias atau perbedaan interpretasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.¹⁵¹ Hal ini disebabkan para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi yang valid atau jelas agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai maksud kebijakan.¹⁵² Oleh karena itu baik SD-AS maupun SD-IGS melakukan komunikasi secara langsung, baik tatap muka dan visitasi apabila diperlukan. Sedangkan untuk memenuhi indikator konsistensi, kedua sekolah ini melakukan komunikasi secara tidak langsung, yakni dengan adanya komunikasi tertulis melalui administrasi, seperti PPI, jurnal harian, buku penghubung, dan raport perkembangan PDBK.

Menurut Ade Febriyanti, kedua pendekatan komunikasi tersebut termasuk dalam komunikasi interpersonal. Di mana komunikasi tersebut saling melengkapi, komunikasi langsung memungkinkan interaksi yang lebih personal dan responsif, sementara komunikasi tertulis memberikan dokumentasi yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Menurut Wood (2013) komunikasi interpersonal adalah suatu proses komunikasi yang berlangsung dua orang atau lebih secara tatap muka atau

¹⁵¹ Y. Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.", 31.

¹⁵² Sianturi et al., "Implementasi Kebijakan Program Jak-Lingko Transjakarta dalam Upaya Perbaikan Transportasi Publik di Pinang Ranti Jakarta Timur.", 27.

melibatkan media, dengan harapan adanya umpan balik langsung.¹⁵³ Dengan demikian, kombinasi dari kedua metode ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyampaian informasi dan konsistensi informasi yang diberikan.

Menurut penelitian sebelumnya di SD Negeri 33 Payakumbuh yang menerapkan program inklusi, komunikasi dalam implementasi kebijakan akomodasi PDBK perlu melibatkan psikolog, kepala sekolah, guru, dan wali murid. Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi secara bersama-sama terkait kebutuhan PDBK sesuai ketunaannya dalam belajar dan bersosialisasi sehingga diharapkan orang tua mampu mendorong kepercayaan diri anak.¹⁵⁴ Hal ini mendukung pernyataan peneliti, di mana komunikasi perlu dilakukan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal agar terjalin kolaborasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, sehingga kebijakan akomodasi untuk PDBK dapat berjalan secara maksimal.

2. Tahap Organisasi

a. Faktor Sumber Daya

Menurut George Edward III, walaupun komunikasi telah dilakukan secara jelas dan juga konsisten, tetapi jika para pelaksana kebijakan mengalami kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program dalam implementasi, maka implementasi

¹⁵³ Sukmawati Abdullah et al., *Pengantar Komunikasi Pendidikan*, 2024., 55.

¹⁵⁴ Tryas Wardani Nurwan, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 3, no. 2 (2019): 201, <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>.

kebijakan tersebut akan terkendala dan sulit dilakukan.¹⁵⁵ Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, terutama pada tahap organisasi. Adanya potensi sumber daya yang tinggi, maka akan bekerja selaras dengan hasilnya, yakni baiknya kualitas implementasinya, begitu juga sebaliknya.¹⁵⁶ Selaras dengan hukum yang berlaku di Indonesia, menurut Permendikbud No. 48 tahun 2023, Akomodasi Yang Layak (AYL) yang perlu diberikan kepada PDBK meliputi anggaran yang cukup, fasilitas yang memadai, SDM yang kompeten, dan ditambah dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan ketunaan PDBK.¹⁵⁷

Apabila ditinjau lebih lanjut, menurut Permendikbud No. 48 Tahun 2023 menjelaskan bahwa anggaran yang cukup dapat disediakan oleh pemerintah daerah atau satuan pendidikan dalam 3 bentuk: (1) biaya bantuan sesuai kebutuhan PDBK, (2) beasiswa, atau (3) dana untuk menyediakan sarana-prasarana.¹⁵⁸ Diketahui bahwa kedua sekolah mengakomodasi adanya penyediaan anggaran yang disusun setiap awal tahunnya, sehingga setiap tahun kedua sekolah, baik SD-AS maupun SD-IGS selalu menambah fasilitas, media, dan peraga pembelajaran sehingga

¹⁵⁵ Taufan Syahputra Hagabean Rambe, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kecamatan Sungkai Kanan kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara," *Institut Pendidikan Dalam Negeri*, no. July (2020), 6.

¹⁵⁶ Sasadara Wahyu Lukitasari, Bambang Suteng Sulasmono, dan Ade Iriani, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi," *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (2017), 123.

¹⁵⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 48 Tahun 2023 Pasal 5 ayat 1.

¹⁵⁸ Permendikbud No. 48 Tahun 2023 Pasal 6 poin a, b, dan c.

mendekati lengkap. Merujuk kepada hasil penelitian tersebut, diketahui SD-AS dan SD-IGS menyediakan anggaran dalam bentuk nomor (3).

Anggaran yang telah diakomodasi oleh sekolah, disalurkan untuk pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) yang dapat membantu proses pembelajaran PDBK. Menurut Permendikbud No. 48 Tahun 2023, sarpras yang dibutuhkan PDBK meliputi sarpras umum, sarpras khusus, dan atau sarpras yang menyediakan pembelajaran jarak jauh.¹⁵⁹ Diketahui bahwa PDBK di SD-AS dan SD-IGS mendapatkan fasilitas yang sama dengan siswa regular lainnya sebagai bentuk sarpras umum, namun dengan fasilitas tambahan sebagai bentuk sarpras khusus, yakni adanya Kelas Sumber atau Ruang Inklusi termasuk seluruh media dan peraga pembelajaran.

Kedua sekolah juga telah mengakomodasi SDM yang kompeten dan kapabel, meskipun intensitas SDM yang dimiliki berbeda, sesuai dengan konsep sekolah masing-masing. Misalnya adalah SD-AS menyediakan SDM sesuai dengan jumlah GPK, yakni 1 GPK 1 PDBK; sehingga pembelajaran PDBK dapat dibantu dan dimaksimalkan oleh masing-masing GPK. Sedangkan SD-IGS memiliki Tim Inklusi terdiri dari 3 orang GPK, yang secara terjadwal akan mendampingi masing-masing PDBK. Selain itu, semua guru dan tenaga kependidikan di kedua sekolah juga telah dibekali ilmu terkait program inklusi sehingga mampu mendampingi PDBK belajar di kelas ataupun melayani PDBK di lingkungan sekolah.

¹⁵⁹ Permendikbud No. 48 Tahun 2023 Pasal 7.

Bahkan sekolah juga mengakomodasi adanya layanan terapis dan psikolog apabila dibutuhkan. SDM yang dimiliki oleh SD-AS dan SD-IGS telah sesuai dengan Permendikbud No. 48 Tahun 2023, yang mana dijelaskan bahwa sekolah menyediakan pendidik yang terdiri dari (1) guru kelas atau guru mata pelajaran yang melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, dan (2) GPK berkompentensi khusus yang diperoleh dari pendidikan ataupun pelatihan.¹⁶⁰

Selain itu, SD-AS maupun SD-IGS telah menyusun kurikulum terdiferensiasi bagi masing-masing PDBK melalui Program Pembelajaran Individu (PPI) yang menyesuaikan kebutuhan dan ketunaan masing-masing PDBK. Merujuk kembali pada Permendikbud No. 48 Tahun 2023, pemerintah mengatur kurikulum yang diakomodasi sekolah PDBK dimodifikasi sesuai dengan ragam disabilitas PDBK.¹⁶¹ Menurut regulasi, bagi PDBK yang tidak mengalami hambatan intelektual, maka dilakukan modifikasi terhadap standar proses; atau dalam bahasa umumnya 'disederhanakan'. Sedangkan bagi PDBK yang mengalami hambatan intelektual, maka dilakukan modifikasi terhadap seluruh proses pembelajaran, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian; yang mana hal ini telah dilakukan sekolah melalui penyusunan PPI.

¹⁶⁰ Permendikbud No. 48 Tahun 2023 Pasal 9.

¹⁶¹ Permendikbud No. 48 Tahun 2023 Pasal 11.

Selaras dengan penelitian sebelumnya yang merujuk pada Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2020, menyebutkan bahwa mengakomodasi sumber daya yang memadai dan memenuhi kebutuhan PDBK dapat dilakukan dengan menyediakan lingkungan inklusif yang mendukung, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan PDBK, menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas yang dibutuhkan, dan menyediakan dukungan khusus seperti teknologi bantu, konseling, dan tenaga medis apabila diperlukan.¹⁶²

b. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi disebut sebagai faktor pendukung dalam tahap organisasi bertujuan menata dan membagi dengan jelas peran masing-masing pelaksana untuk berkontribusi dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang dimaksud adalah semua instrumen organisasi secara menyeluruh dan terstruktur.¹⁶³ Indikator tercapainya aspek struktur birokrasi adalah (1) adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) atau petunjuk operasional standar, di mana dalam implementasi kebijakan akomodasi PDBK ini yang menjadi SOP adalah kurikulum pembelajaran yang digunakan PDBK; dan (2) adanya fragmentasi, atau pembagian peran dan tanggung jawab kepada seluruh pelaksana sekolah.¹⁶⁴ Struktur

¹⁶² Ishartiwi, "Fungsi Unit Layanan Disabilitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif."

, 9.

¹⁶³ Lukitasari, Sulasmono, dan Iriani, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif.", 123.

¹⁶⁴ Syahputra Hagabea Rambe, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kecamatan Sungkai Kanan kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.", 7.

birokrasi yang jelas dan efektif akan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa SD-AS dan SD-IGS telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Organisasi (PPO) dan melaksanakan fragmentasi serta kerjasama antar pelaksana sekolah. Adanya PPO dan fragmentasi terkait mengimplementasi kebijakan akomodasi PDBK di SD-AS menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab dalam melayani PDBK meliputi seluruh pelaksana sekolah, dan ditambah dengan pembagian tugas kepada GPK untuk membantu PDBK dalam tugas-tugas akademik, mengembangkan keterampilan sosial, dan memberikan bimbingan emosional. Namun untuk yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pembelajaran PDBK adalah masing-masing GPK-nya. Adapun SD-IGS juga membentuk tim khusus, yakni Tim Inklusi yang terdiri dari 3 GPK untuk berperan dan bertanggung jawab lebih banyak untuk melayani PDBK.

Berkaitan erat dengan disposisi, struktur birokrasi yang baik seharusnya tidak terlalu memberatkan kepada satu fragmen saja agar peran dan rasa tanggung jawab untuk melayani PDBK dimiliki oleh seluruh pelaksana sekolah. Oleh karena itu fragmentasi harus dilakukan secara holistik. Karena hakikatnya pembagian tugas yang jelas, pelatihan berkelanjutan, pembinaan dan evaluasi secara berkala, dimaksudkan agar terjalinnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pelaksana sekolah. Sehingga makna yang tepat untuk mendefinisikan fragmentasi

yang dimaksud adalah pembagian peran sesuai porsinya yang kemudian bertujuan untuk memungkinkan terjadinya kolaborasi dan kerjasama, bukan fragmentasi yang berarti perpecahan. Apabila fragmentasi ini diimplementasikan sebagai pemecahan tanggung jawab, maka di lingkungan birokrasi pelaksana kebijakan akan terjadi permasalahan dan gangguan yang menghambat tujuan implementasi kebijakan.¹⁶⁵

Dalam penelitian sebelumnya disebutkan bahwa seluruh pelaksana sekolah harus saling berkolaborasi, misalnya guru harus bekerja sama dengan tim multidisiplin, seperti terapis, konselor, dan ahli pendidikan khusus, untuk menerapkan pendidikan inklusif. Tujuan kerja sama ini adalah untuk memberikan dukungan yang komprehensif dan terintegrasi kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Guru harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Untuk meningkatkan hasil belajar mereka, mereka harus mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan inklusif dan menerapkan metode terbaik yang relevan.¹⁶⁶

3. Tahap Aplikasi Dengan Faktor Disposisi Pelaksana

Pada tahap aplikasi, setelah segala perencanaan dari tahap sebelumnya dirancang dan disusun, maka keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh disposisi atau sikap para pihak yang terlibat. Disposisi

¹⁶⁵ Lukitasari, Sulasmono, dan Iriani, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif.", 123.

¹⁶⁶ Justin Niaga Siman Juntak et al., "Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia," *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 5, no. 2 (2023), 209.

berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan seperti kesediaan, antusias, dukungan, komitmen, dan kecakapan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya, mencakup para pemimpin sekolah, guru, dan pihak terkait.¹⁶⁷ Dalam konteks kebijakan akomodasi PDBK, sikap inklusif, kemauan untuk belajar dan dedikasi dari semua pihak sangat penting untuk keberlangsungan implementasi kebijakan,¹⁶⁸ terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif bagi semua siswa. Indikator keberhasilan disposisi dinilai dari (1) kemauan/motivasi dan (2) kemampuan/kompetensi pelaksana sekolah untuk mengimplementasikan kebijakan akomodasi bagi PDBK melalui pendidikan inklusif.

Hasil penelitian di SD-AS dan SD-IGS berupaya memenuhi indikator adanya motivasi pelaksana ditunjukkan dengan adanya siasat sekolah untuk menerapkan standarisasi kepribadian dan dedikasi terhadap calon SDM ketika proses rekrutmen. Rekrutmen ini memungkinkan setiap calon SDM melalui tahap wawancara profesionalisme, di mana salah satu pertanyaannya adalah studi kasus dalam melaksanakan tugas sekolah sebagai pelaksana, termasuk kemauannya untuk melayani semua siswa tanpa diskriminasi. Manfaatnya adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang pandangan-pandangan dari calon SDM terhadap suatu kebijakan

¹⁶⁷ Syahputra Hagabea Rambe, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kecamatan Sungkai Kanan kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.", 7.

¹⁶⁸ Lukitasari, Sulasmono, dan Iriani, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi.", 123.

maupun tugas tertentu.¹⁶⁹ Oleh karena itu, pada aspek sumber daya yang telah dibahas sebelumnya SD-AS maupun SD-IGS menitikberatkan proses rekrutmen untuk mendapatkan SDM yang kompeten dan kapabel dalam mengakomodasi pembelajaran siswa, termasuk PDBK. Apabila calon SDM bersedia, maka akan dilanjutkan pada tahap rekrutmen selanjutnya, jika tidak bersedia, maka proses rekrutmen tidak akan dilanjutkan.

Sedangkan untuk memenuhi indikator kompetensi pelaksana, setiap SDM yang direkrut akan diberikan pelatihan dan workshop secara berkala tentang cara melayani dan menghadapi PDBK, baik dengan memanfaatkan GPK sebagai narasumber, atau bahkan mengundang ahli dari eksternal sekolah. Adapun dalam pelaksanaannya, apabila terjadi ketidaksesuaian antara kemampuan guru dan standar kompetensi yang telah ditetapkan untuk melayani PDBK, atau adanya tuntutan pekerjaan dalam melayani PDBK yang semakin kompleks, maka diadakanlah *upgrading*. Selain itu, untuk mempertahankan motivasi dan kompetensi pelaksana sekolah, diterapkanlah motto kerja di antara SDM, seperti “Menerima dengan ikhlas, dan bekerja dengan hati,” atau juga memberi pemahaman kepada pelaksana bahwa “PDBK itu setara dengan siswa lainnya, mereka adalah Amanah dari Allah.”

Menurut penelitian sebelumnya di SDN Airlangga 1/198 Surabaya, salah satu bentuk strategi efektif sekolah untuk meningkatkan mutu

¹⁶⁹ Iqbal Taufikurrahman Akhmad Shuhanji, Ahmad Zain, “Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Dan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan Istitut PTIQ Jakarta , Istitut PTIQ Jakarta Mahasiswa Pscasarjana Istitut PTIQ Jakarta” I, no. 2 (2019), 271.

pembelajaran pendidikan inklusif adalah dengan meningkatkan kemampuan pelaksana sekolah, terutama GPK dan guru reguler adalah melalui berbagai sosialisasi maupun pelatihan agar tercipta suasana pembelajaran inklusif yang nyaman dan kondusif.¹⁷⁰ Dalam penelitian lainnya, menunjukkan pentingnya pelatihan dan workshop, yakni guru yang pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif memiliki sikap positif yang tinggi dibandingkan guru-guru yang tidak pernah mengikuti pelatihan.¹⁷¹ Oleh karena itu, untuk meningkatkan disposisi pelaksana sekolah lainnya, diperlukannya pelatihan dan peningkatan komitmen agar seluruh *stakeholder* sekolah sadar dan mampu untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada PDBK.

B. Evaluasi Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK Pada Sekolah Inklusi di Kota Malang

Evaluasi implementasi kebijakan akomodasi PDBK. Evaluasi proses implementasi kebijakan ini juga secara komprehensif dapat ditinjau dari 4 aspek yang telah diteliti, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, yang mana keempat aspek tersebut merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan serta dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

¹⁷⁰ Bagas Agustriawan dan Muhamad Sholeh, "Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Inklusif di SDN Airlangga 1/198 Surabaya," *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 11, no. 1 (2023), 6.

¹⁷¹ Ramadhana, "Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus.," 7.

1. **Interpretasi: *Miss Communication* akibat rendahnya kesadaran pelaksana**

Seperti halnya pada hambatan pertama terkait, komunikasi. Menurut hasil penelitian komunikasi sudah dilakukan dengan transmisi yang baik, di mana komunikasi dilakukan secara *Bottom Up* atau *Top Down* untuk informasi disalurkan dan diterima baik dari bawahan ataupun atasan. Selain itu komunikasi interpersonal juga dilakukan, baik secara langsung agar memenuhi indikator akurasi, dan tidak langsung melalui proses administrasi untuk memenuhi indikator konsisten.

Namun dari kedua implementasi tersebut, yang menjadi perhatian evaluasi adalah sekolah telah menerapkan komunikasi sedemikian rupa, namun masih terjadi *miss communication* baik secara internal maupun eksternal. *Miss communication* dalam lingkup internal terjadi dalam konteks kurangnya koordinasi dan kedisiplinan para pelaksana untuk menyampaikan informasi. Hal ini memungkinkan terjadinya keterlambatan penerimaan informasi dan menghambat proses pembelajaran PDBK. Adapun *miss communication* dalam lingkup eksternal terjadi dalam konteks kurang kooperatifnya orang tua dalam membina PDBK sesuai kebutuhan dan kemampuannya di rumah. Sering ditemui bahwa orang tua menitipkan PDBK kepada pengasuhnya di rumah, yang mana tidak berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah. Hal ini memperbesar peluang terjadinya kesalahpahaman, serta menghambat program yang telah disusun oleh sekolah.

Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa rendahnya kesadaran dan motivasi beberapa guru dan orang tua menyebabkan mereka kurang memperhatikan kebutuhan PDBK. Asumsi ini berdasarkan teori yang menyatakan bahwa masalah komunikasi bisa saja terjadi dikarenakan hambatan psikologis, di mana adanya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pihak sekolah sebagai pengirim informasi dan pelaksana atau orang tua sebagai penerima informasi. Disebut sebagai hambatan psikologis karena hambatan-hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Salah satu hambatan psikologis ini adalah perbedaan kepentingan atau *interest*. Kepentingan atau *interest* akan membuat seseorang selektif dalam menganggapi atau menghayati pesan. Orang hanya akan memperhatikan perangsang (stimulus) yang ada hubungannya dengan kepentingannya.¹⁷² Akibatnya, upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut menjadi tidak optimal, masing-masing pihak cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, sehingga kurangnya perhatian dan dukungan, potensi yang dimiliki oleh PDBK tidak dapat berkembang secara optimal.

Selaras dengan penelitian sebelumnya yang membahas terkait tantangan dalam pendidikan inklusi, disebutkan bahwa orang tua dan masyarakat berperan penting dalam menangani anak berkebutuhan khusus, terlebih pelaksana sekolah inklusi itu sendiri. Sikap menerima dan mendukung kekurangan PDBK dari pelaksana sekolah dan orang tua,

¹⁷² Yasin et al., "Menuju Pembelajaran Efektif Editor :'", 66.

serta masyarakat dapat mendorong anak lebih dalam mengembangkan potensinya. Jika lingkungan tidak menerima dan mendukung maka kemajuan PDBK akan semakin terhambat. PDBK akan cenderung malu dan cemas untuk memulai melakukan sesuatu.¹⁷³ Untuk mengatasi tantangan tersebut, orang tua dan masyarakat perlu diberikan wawasan tentang hak PDBK dalam belajar. Amka (2019) menyatakan bahwa sikap para orang tua berubah setelah mendapatkan sosialisasi dari pihak sekolah tentang pendidikan inklusif dan telah memahami prinsip keragaman kebutuhan belajar anak. Hal ini diharapkan dapat merubah pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang adil untuk anak berkebutuhan khusus.¹⁷⁴

Selain itu, salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah sekolah perlu memperbaiki dan meng-*upgrade* pola komunikasinya dengan cara mengecek umpan balik dari penerima informasi,¹⁷⁵ sehingga pengirim informasi dapat mengoreksi dan mengkonfirmasi bahwa interpretasi informasi tersampaikan dengan selaras. Bersinggungan dengan aspek disposisi, secara umum seluruh pelaksana sekolah dan pihak orang tua, serta masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dan motivasinya dalam memperhatikan kebutuhan PDBK secara keseluruhan, bukan hanya untuk menggugurkan tugas secara formalitas.

¹⁷³ Ramadhana, "Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus.", 6.

¹⁷⁴ Ibid. 8.

¹⁷⁵ Yasin et al., "Menuju Pembelajaran Efektif Editor :'", 69.

Sehingga diharapkan pelaksana dan orang tua lebih memperhatikan perkembangan PDBK dengan cara aktif bertanya, memahami kebutuhan PDBK di rumah, jujur dan terbuka kepada sekolah terkait kesulitan yang dialami, serta bertindak koordinatif. Dengan adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara sekolah dan orang tua, diharapkan kesalahpahaman dapat diminimalisir dan program akomodasi PDBK dapat berjalan dengan efektif.

2. Organisasi: Inkonsistensi akomodasi GPK

Memiliki GPK yang kompeten dan kapabel, serta jumlah GPK yang memadai adalah indikator yang terpenuhi dalam aspek sumber daya. Namun menurut hasil penelitian, masih terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi. Adapun yang menjadi titik evaluasi di SD-AS adalah bervariasinya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing GPK dan sering terjadinya pergantian GPK di tengah semester pembelajaran PDBK dikarenakan kepentingan pribadi. Hal ini tentu berdampak signifikan terhadap perkembangan PDBK, seperti terputusnya hubungan emosional, ketidakstabilan program pembelajaran, menurunnya motivasi PDBK, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekolah perlu melakukan kontrak kerja yang jelas, standarisasi kompetensi GPK, rotasi tugas berencana, komunikasi terbuka, koordinasi yang baik serta kepemimpinan kepala sekolah yang kuat.

Idealnya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam sekolah inklusi, terutama GPK, paling tidak mencakup menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran; dan mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampunya, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, dan melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran¹⁷⁶

Sedangkan di SD-IGS, evaluasi sumber daya yang menjadi titik fokus adalah kurangnya jumlah GPK dan beberapa fasilitas yang terkait perkembangan motorik.

Hal ini perlu menjadi perhatian sekolah, yang mana untuk menanganinya perlu dilakukan upaya peningkatan sumber daya manusia dengan cara pelatihan guru regular dan membuka kerjasama dengan lembaga lain. Tantangan ini memungkinkan manajemen sekolah untuk melakukan memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah dengan maksimal, yang meliputi input siswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk peningkatan fasilitas dapat

¹⁷⁶ Nada, "Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Di Kelas Inklusi Sd International Islamic (Intis) School Yogyakarta."

dilakukan dengan modifikasi ruang kelas kerjasama dengan komunitas ataupun dengan optimalisasi sumber daya yang ada seperti penggunaan teknologi dan kolaborasi dengan orang tua.

Adapun menurut penelitian sebelumnya, tentang analisis regulasi pendidikan inklusif yang ramah anak, menegaskan bahwa sekolah akan berjalan dengan efektif dan efisien jika manajemennya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Sumber daya manusia ini harus memiliki kemampuan untuk mengatur kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Pendidik yang memadai dan harus memiliki kemampuan dan komitmen terhadap tugasnya (tanggung jawab terhadap tugas), memiliki sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dan dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya. Jika salah satu hal di atas tidak sesuai dengan perkiraan dan/atau tidak berfungsi dengan baik, maka pengelolaan sekolah akan kurang efektif dan efisien.¹⁷⁷

3. Aplikasi: Disposisi dan Struktur Birokrasi yang berat pada salah satu pihak

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan akomodasi PDBK. Adapun evaluasi disposisi pelaksana kebijakan sangat penting untuk menilai sejauh mana komitmen, motivasi, dan sikap para pelaksana

¹⁷⁷ Munawwaroh, "Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak.", 30.

dalam menjalankan tugas mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, evaluasi yang nampak dari hasil penelitian IGS, setelah sekolah telah mencanangkan diri sebagai sekolah inklusi adalah perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman para pelaksana sekolah terkait pembelajaran dan pelayanan kepada PDBK. Selanjutnya tugas pelaksana sekolah adalah secara konsisten dan sadar untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilakukan apabila para pelaksana berkemauan dan berkemampuan untuk bekerja sama, berkolaborasi, serta memahami esensi dari tugasnya masing-masing selaku guru yang melayani PDBK.

Sedangkan evaluasi terkait struktur birokrasi yang digunakan untuk implementasi kebijakan akomodasi PDBK adalah adanya pembagian tugas yang lebih memberatkan kepada beberapa pihak saja. Adapun untuk struktur birokrasi, yang perlu ditanamkan adalah kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang jelas terkait dengan inklusi. Ini termasuk guru, staf administrasi, dan petugas kebersihan. Selain itu sekolah juga perlu menyusun kebijakan tertulis yang jelas mengenai inklusi, mulai dari penerimaan siswa baru, adaptasi kurikulum, hingga evaluasi. Termasuk memastikan semua anggota sekolah memahami dan menjalankan kebijakan inklusi. Setelah itu, sekolah perlu melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang ada dan melakukan revisi jika diperlukan.

Untuk meninjau dengan mudah, sekolah juga dapat membuat dokumentasi yang lengkap mengenai semua kegiatan inklusi, termasuk

data siswa, program pembelajaran, dan evaluasi. Serta menyusun sistem pelaporan yang efektif untuk memantau kemajuan program inklusi. Dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian di atas, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi PDBK dan memastikan bahwa kebijakan inklusi dapat dilaksanakan secara efektif.

Tantangan dan hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya, yakni kurangnya perhatian dan kepedulian guru akan segala hambatan di lingkungan sekolah dapat mengganggu konsentrasi ABK pada saat belajar. Para guru memang berkompetensi dan berkemauan untuk membantu PDBK, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut hanya sebuah formalitas. Di mana apabila terjadi kesulitan dalam menghadapi PDBK di luar kelas, sering kali diserahkan langsung kepada GPK yang bersangkutan.¹⁷⁸ Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi para stakeholder, khususnya melalui pelatihan dan pendampingan yang terstruktur, agar pendidikan inklusi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

¹⁷⁸ Diva Salma Hanifah et al., “Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022), 481.

C. Hasil Implementasi Kebijakan Akomodasi PDBK Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Inklusi di Kota Malang

Dampak implementasi kebijakan akomodasi PDBK dapat ditinjau dari *output* dan *Outcome* sebagai mutu pembelajaran di sekolah setelah implementasi kebijakan tersebut. Pertama, mutu pembelajaran bergantung dan dipengaruhi oleh 3 hal, yakni mutu input, mutu proses, dan mutu *output*. Mutu input mencakup segala sesuatu yang menjadi masukan dalam proses pembelajaran, seperti kualitas guru, sarana prasarana, kurikulum, dan karakteristik peserta didik. Mutu proses mengacu pada bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran yang inovatif, penggunaan teknologi yang tepat, serta interaksi yang efektif antara guru dan siswa akan sangat berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran. Terakhir, mutu *output* merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran, yang dapat diukur melalui prestasi akademik siswa, keterampilan yang dimiliki, serta sikap dan perilaku yang terbentuk.¹⁷⁹

Apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan akomodasi PDBK, mutu input erat kaitannya dengan proses perencanaan implementasi, sedangkan mutu proses erat kaitannya dengan proses implementasi itu sendiri. Sedangkan mutu *output* sendiri berkaitan dengan hasil implementasi kebijakan akomodasi PDBK yang ditinjau dari *output* dan *Outcome*.

¹⁷⁹ Umam, "Menciptakan Mutu Pembelajaran Di Sekolah.", 1.

Merujuk pada hasil penelitian, mutu input dari perencanaan implementasi kebijakan akomodasi PDBK di SD-AS dan SD-IGS sudah terlaksana dengan baik dan matang, di mana sekolah telah menyiapkan kualitas SDM yang kompeten dan kapabel melalui proses rekrutmen ketat, pemberian motivasi dan pelatihan secara berkala. Adapun kedua sekolah juga telah menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana untuk mendukung pembelajaran PDBK, serta kurikulum yang disederhanakan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan ketunaan PDBK. Sedangkan terkait mutu proses, SD-AS dan SD-IGS telah melaksanakan implementasi kebijakan akomodasi PDBK dengan sangat baik ditinjau dari pelaksanaan komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sekolah.

Adapun terkait mutu *output*, hasil implementasi kebijakan akomodasi PDBK ini ditinjau dari 2 aspek, yakni *output* dan *Outcome*. *Output* umumnya dapat dilihat dari nilai akademik, keterampilan, ataupun produk hasil *project* dari suatu pembelajaran.¹⁸⁰ Namun bagi PDBK, *output* dari keberhasilan suatu pembelajaran tidak dapat diukur dari nilai akademiknya, karena memang pembelajaran bagi PDBK sudah mengalami proses penyederhanaan dan penyesuaian berdasarkan kemampuan dan ketunaannya (disabilitasnya).

Sehingga *output* yang diharapkan dari pembelajaran PDBK adalah *softskill*-nya, yakni meningkatnya taraf kemandirian dan kemampuan sosialnya, termasuk kemampuan beradaptasi; di mana kedua kemampuan

¹⁸⁰ Ibid., 2.

tersebut akan menunjang pendidikan dan kehidupan PDBK selanjutnya, salah satunya adalah dapat berpartisipasi mandiri dan memahami pembelajaran di kelas sebagaimana teman-temannya. Adapun *output* yang terukur yang dapat dilihat dari perkembangan PDBK adalah kemampuan mengikuti instruksi, kemampuan calistung (membaca, menulis, dan berhitung), motorik kasar, dan motorik halus.¹⁸¹ Adapun *output* juga disesuaikan dengan terapi yang dilakukan oleh masing-masing PDBK; bagi PDBK yang menjalani terapi wicara, maka *outputnya* adalah PDBK dapat mengucapkan kata-kata dengan jelas; bagi PDBK yang menjalani terapi okupasi adalah PDBK dapat terampil mengerjakan aktivitas harian seperti makan, berpakaian, dan bermain; dan lain sebagainya.

Menurut penelitian sebelumnya, tentang analisis proses pembelajaran PDBK dalam mata pelajaran matematika, menunjukkan bahwa PDBK baik tunarungu, tunagrahita, maupun tunadaksa dalam memahami materi geometri bangun datar berada pada tahap 0 yaitu visualisasi, di mana siswa mampu mengidentifikasi bangun geometri berdasarkan penampakan fisiknya. Tahap ini terdiri dari deskripsi kemampuan PDBK meliputi PDBK memanipulasi, melukis, mewarnai, melipat dan mengkonstruksi bangun geometri; mengidentifikasi bangun geometri, membandingkan dan menyortir bangun berdasarkan fisiknya; membuat bangun dengan menjiplak gambar pada kertas bergaris, menggambar bangun dan mengkonstruksi bangun; mendeskripsikan

¹⁸¹ Hanifah et al., "Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar.", 481

atau memberi nama atau label pada bangun geometri secara verbal menggunakan bahasa baku atau tidak baku; dan mengerjakan masalah yang dapat dipecahkan dengan menyusun, mengukur dan menghitung.¹⁸² Hal ini membuktikan bahwa dalam *output* pembelajaran pada umumnya PDBK hanya mampu memahami konsep sederhana yang divisualisasikan. Sehingga dirasa tidak adil apabila standar penilaian dan *outputnya* disamakan dengan siswa reguler. Oleh karena itu sekolah inklusi menetapkan bahwa *output* PDBK diukur dari kemampuan membina dirinya secara deskriptif.

Sedangkan *Outcome* merupakan mutu pembelajaran yang dampaknya bersifat jangka panjang atau perubahan yang lebih mendalam sebagai akibat dari proses pembelajaran.¹⁸³ *Outcome* lebih bersifat kualitatif dan sulit diukur secara langsung dari suatu proses pembelajaran setelah diimplementasikannya kebijakan akomodasi PDBK. Setelah terbentuknya taraf kemandirian dan kemampuan bersosialisasi dengan sekitarnya, besar harapannya akan terbentuk suatu *Outcome* pada diri PDBK, salah satunya adalah munculnya potensi dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing PDBK. Adapun *Outcome* jangka panjang dan lebih mendalam yang diharapkan adalah sembuhnya disabilitas yang disandang oleh PDBK tersebut. Atau lebih tepatnya adalah mencapai kemandirian fungsional dan mencapai potensi maksimum sehingga berhasil beradaptasi dan mengatasi disabilitas yang disandanginya. Bahkan

¹⁸² Arnasari Merdekawati Hadi, "Analisis Proses Pembelajaran Matematika Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Dalam Memahami Bangun Datar Berdasarkan Teori Van Hiele Di SmpIb Bd Kota Bima," *Prosiding Silogisme* 1, no. 1 (2018): 24–33.

¹⁸³ Umam, "Menciptakan Mutu Pembelajaran Di Sekolah.", 2.

dengan mencapai kondisi tersebut, beberapa PDBK dapat dinyatakan terbebas dari label disabilitasnya.

Menurut hasil penelitian terdahulu, terkait pembelajaran PDBK di MI NW Tanak Beak, menunjukkan bahwa bakat dan potensi PDBK terletak pada potensi non akademik, dengan rincian: olah raga sebesar 36% atau sejumlah 8 peserta didik, bidang seni sebesar 32% atau sejumlah 7 peserta didik, bidang logis matematis sebesar 14% atau sejumlah 3 peserta didik, bidang linguistik, spasial, tilawah dan memasak yang besarnya masing masing adalah 5% atau sebanyak 1 peserta didik.¹⁸⁴ Oleh karena itu, penting untuk pelaksana sekolah dan masyarakat secara umum untuk tidak berfokus pada penilaian yang terukur secara kuantitatif, namun juga perlu berfokus pada perkembangan PDBK secara kualitatif. Dukungan yang konsisten dan berkelanjutan dari lingkungan sekitar PDBK sangat penting untuk keberhasilan perkembangan dan pendidikannya.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Arif Widodo et al., "Identifikasi Bakat Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di Madrasah Inklusi Kabupaten Lombok," *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 3, no. 2 (2020), 114.

¹⁸⁵ Felix Trisuko Nugroho, Sarah Talita Primadani, dan Michael WIdya Christian, "Efektivitas Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Metode Pembiasaan," *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP_ 2, no. 8 (2024), 1334.*

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi kebijakan akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang, dapat dirumuskan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Proses implementasi kebijakan akomodasi PDBK untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari 3 tahap, yakni tahap interpretasi dengan memperhatikan faktor komunikasi, tahap organisasi dengan memperhatikan faktor sumber daya dan faktor struktur birokrasi, serta tahap aplikasi dengan memperhatikan faktor disposisi.
2. Evaluasi implementasi kebijakan Akomodasi PDBK dalam penelitian ini meliputi *miss communication* akibat rendahnya kesadaran pelaksana, inkonsistensi akomodasi GPK, serta disposisi dan struktur birokrasi yang kurang merata.
3. Hasil implementasi kebijakan Akomodasi PDBK untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang ditinjau dari:
 - a. *Output* yang berhasil muncul dari hasil implementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK dari kedua sekolah adalah perkembangan *softskill*-nya, yakni meningkatnya taraf kemandirian dan kemampuan sosialnya, termasuk kemampuan beradaptasi.

- b. *Outcome* yang berhasil muncul dari hasil implementasi kebijakan akomodasi bagi PDBK adalah mencapai kemandirian fungsional dan mencapai potensi maksimum sehingga berhasil beradaptasi dan mengatasi disabilitas yang disandangnya. Bahkan dengan mencapai kondisi tersebut, beberapa PDBK dapat dinyatakan terbebas dari ‘label’ disabilitasnya.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi kebijakan akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada sekolah inklusi di Kota Malang, dapat dirumuskan saran dan rekomendasi sebagaimana berikut:

1. Untuk pemerintah
 - a. Kebijakan perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih detail dan spesifik, terutama terkait alokasi anggaran, pelatihan guru, dan sarana prasarana.
 - b. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan di satuan pendidikan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
2. Untuk sekolah
 - a. Melaksanakan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru terkait pengetahuan tentang PDBK, keterampilan pedagogik yang relevan, dan juga kesadarannya dalam melayani pendidikan bagi PDBK.

- b. Memberikan kesempatan kepada guru untuk berbagi praktik baik dan belajar dari pengalaman satu sama lain.
 - c. Melakukan fragmentasi yang merata sesuai porsi keahlian dan tupoksinya, serta menegaskan pentingnya kerja sama, kolaborasi, dan saling membantu dalam mendukung akomodasi yang layak bagi PDBK.
 - d. Melibatkan orang tua, siswa, komunitas, dan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.
3. Untuk peneliti selanjutnya
- a. Meneliti dampak jangka panjang dari implementasi kebijakan dengan melakukan studi longitudinal untuk melihat perkembangan siswa PDBK dalam jangka waktu yang lebih panjang.
 - b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di berbagai sekolah dengan melakukan studi komparatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang membedakan sekolah yang berhasil dan yang kurang berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukmawati, Atikah Dewi Utami, Ima Astuty Wunawarsih, Ade Febryanti, Ema, Afrahamiryano, Rezkiyana Hikmah, Nur Hasanah, dan Yoenita Jayadisastra. *Pengantar Komunikasi Pendidikan*, 2024.
- Agustriawan, Bagas, dan Muhamad Sholeh. “Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Inklusif di SDN Airlangga 1/198 Surabaya.” *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 11, no. 1 (2023): 1–14. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/56255%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/56255/44469>.
- Akhmad Shuhanji, Ahmad Zain, Iqbal Taufikurrahman. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MI TARBIYATUL ISLAMIYAH JAKARTA SELATAN Istitut PTIQ Jakarta , Istitut PTIQ Jakarta Mahasiswa Pscasarjana Istitut PTIQ Jakarta” I, no. 2 (2019): 251–76. <https://jurnal.kopertais1.or.id/alim/article/download/140/122>.
- Auldrin M. Ponto. “Implementasi Kebijakan Progam Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.” *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* 7, no. 1 (2019): 16–26.
- Chamidah, Atien Nur. “Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus.” *Magistra* 25, no. 86 (2013): 1–10. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-atien-nur-chamidah-mdisst/mengenal-abk.pdf>.
- Citriadin, Yudin. “Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner: Teknik Analisi Data Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif,” 201–18, 2020.
- Damayanti, Temi, Stephani Raihana Hamdan, dan Andhita Nurul Khasanah. “Kompetensi Guru Dalam Proses Pembelajaran Inklusi Pada Guru SD Negeri Kota Bandung.” *Journal of Psychological Research* 3, no. 1 (2017): 79–88. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/schema/article/view/1947>.
- Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiyati Leli Honesti Sri Wahyuni, Erland Mouw Jonata, Imam Mashudi Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati Resty Noflidaputri Nuryami, dan Lukman Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Hadi, Arnasari Merdekawati. “Analisis Proses Pembelajaran Matematika Anak

- Berkebutuhan Khusus (Abk) Dalam Memahami Bangun Datar Berdasarkan Teori Van Hiele Di Smp/bd Kota Bima.” *Prosiding Silogisme* 1, no. 1 (2018): 24–33.
- Hamsi Mansur. *Pendidikan Inklusif Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2019.
- Hanifah, Diva Salma, Annasjla Byandra Haer, Saraswati Widuri, dan Meilanny Budiarti Santoso. “Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi Di Tingkat Sekolah Dasar.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 473. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37833>.
- INOVASI, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Pembelajaran Yang Berkualitas Dalam Pendidikan Inklusif Inovasi,” no. November (2019).
- Ishartiwi. “Fungsi Unit Layanan Disabilitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif.” *Jurnal Pendidikan Khusus* 19, no. 1 (2023): 7–19.
- Juntak, Justin Niaga Siman, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati, Mudrikatul Arafah, dan Tekat Sukomardojo. “Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia.” *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 5, no. 2 (2023): 205–14.
- Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, n.d.
- Lukitasari, Sasadara Wahyu, Bambang Suteng Sulasmono, dan Ade Iriani. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi.” *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (2017): 121. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>.
- Maisyaroh. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.” *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara* 4, no. 4 (2015): 1–20. http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/887%0Ahttp://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/download/887/pdf_132.
- Meutia, Intan Fitri. *Analisis Kebijakan Publik*, n.d.
- Muhammad Darwin, Marianne Reynelda Mamondol Salman Alparis Sormin Yuliana Nurhayati Hardi Tambunan Diana Sylvia, I Made Dwi Mertha Adnyana Budi Prasetyo, dan Pasionista Vianitati Antonius Adolf Gebang. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, 2021.
- Munawwaroh, Lailatul. “Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah

- Anak.” *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 10, no. 2 (2019): 173–86. <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v10i2.167>.
- Mustanir, Ahmad, dan Jusman. “Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Ilmiah Akmen* 13, no. 3 (2016): 542–58. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/69%0Ahttps://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/issue/view/6>.
- Nada, Rifka Khoirun. “Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Di Kelas Inklusi Sd International Islamic (Intis) School Yogyakarta.” *As-Sibyan*, 2022, 56–78. https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/As_Sibyan/article/view/298%0Ahttps://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/As_Sibyan/article/view/298/178.
- Nugroho, Felix Trisuko, Sarah Talita Primadani, dan Michael Widya Christian. “Efektivitas Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Metode Pembiasaan.” *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP_2)*, no. 8 (2024): 1326–35.
- Nurwan, Tryas Wardani. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar.” *JESS (Journal of Education on Social Science)* 3, no. 2 (2019): 201. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>.
- Ramadhana, Rizka Norsy. “Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus.” *Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat*, 2020, 1–10. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/n8rxu>.
- Rukminingsih, Gunawan Adnan, dan Mohammad Adnan Latief. *Metode Penelitian Pendidikan. Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2020.
- Sianturi, Widya Rhenata, Azhari, Aziz Samudra, Uchaimid Biridlo, dan I Robby. “Implementasi Kebijakan Program Jak-Lingko Transjakarta dalam Upaya Perbaikan Transportasi Publik di Pinang Ranti Jakarta Timur.” *ANTASENA: Governance and Innovation Journal* X, no. X (2023): 25–30. <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/antasena>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung, 2015.
- . *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitati, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syahputra Hagabea Rambe, Taufan. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kecamatan Sungkai Kanan kabupaten

- Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.” *Institut Pendidikan Dalam Negeri*, no. July (2020): 1–23.
- Trisantra, Hikmah Eva, Prim Masrokan Mutohar, dan Sulastri Rini Rindrayani. “Manajemen Peningkatan Mutu Pembelajaran Dengan Sistem FDS,” 2018.
- Umam, Khotibul. “Menciptakan Mutu Pembelajaran Di Sekolah,” 2017.
- Utomo, Cahyo Budi. *Manajemen Pembelajaran*. UNNES Press, 2018.
- Wibowo, Agung T, dan Nur Laila Anisa. “Problematika Pendidikan Inklusi di Indonesia.” *Publikasi Ilmiah UMS*, no. 2 (2017): 16–20.
- Widodo, Arif, Dyah Indraswati, Deni Sutisna, Nursaptini Nursaptini, dan Setiani Novitasari. “Identifikasi Bakat Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di Madrasah Inklusi Kabupaten Lombok.” *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 3, no. 2 (2020): 102. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p102-116>.
- Wulandari, Ratna Sari, dan Wiwin Hendriani. “Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review).” *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 7, no. 1 (2021): 143. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3152>.
- Y. Gede Sutmasa. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Cakrawati* 04, no. 01 (2021): 25–36.
- Yasin, Muhamad, S Ag M Pd, Agus Purwowidodo, dan M Pd. “Menuju Pembelajaran Efektif Editor :,” n.d.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1929/Ps/TL.00/05/2024

20 Mei 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Kepala SD Anak Saleh Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Nadhira Rifqi
NIM : 220106210038
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Esa Nur Wahyuni, M.Pd
2. Dr. Muh. Hambali, M.Ag.
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Akomodasi Peserta Didik Disabilitas untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Inklusi di Kota Malang (Studi Multisitus SD Anak Saleh dan SD Islamic Global School Kota Malang)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : sv026W

Lampiran 2

Dokumentasi Kegiatan Penelitian di SD Anak Saleh Kota Malang



Lampiran 3

Dokumentasi Kegiatan Penelitian di SD Islamic Global School Kota Malang



BIOGRAFI PENULIS



Perkenalkan, penulis sekaligus peneliti tesis ini adalah Nadhira Rifqi. Penulis merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara di sebuah rumah tepatnya di Jl. Teluk Cendrawasih no. 45 D, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Selama hidup, penulis dinaungi oleh kedua orang tua yang sangat berjasa, baik secara materiil maupun moriil, yakni Bapak Rifqi dan Ibu Nurul Widayani.

Semasa menempuh pendidikan, penulis belum pernah mengenyam pendidikan Taman Kanak-kanak dan langsung menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Arjosari 1 pada tahun 2006 dan lulus dengan nilai yang memuaskan pada tahun ajaran 2011/2012. Selanjutnya penulis meneruskan kiat meraih cita-cita dengan mengenyam pendidikan menengah di SMP Negeri 16 Malang. Di sana, penulis mengeksplorasi potensi diri sehingga berprestasi secara akademik maupun non akademik. Tanpa disangka, penulis lulus sebagai 10 besar siswa terbaik pada tahun 2014/2015. Serasa memiliki harapan besar, penulis melanjutkan pendidikan menengah ke salah satu SMA terbaik di Kota Malang, yakni SMA Negeri 3, yang dikenal sebagai Bhawikarsu, dan lulus pada tahun 2017/2018.

Setelah lulus, penulis tersadar bahwa penulis sangat berminat dan jatuh cinta pada dunia pendidikan. Seraya memantapkan hati dan tekad, penulis membutuhkan waktu 1 tahun untuk berhasil masuk dan resmi menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Selama berkuliah, penulis turut aktif dalam kegiatan akademik dan non akademik. Penulis mengikuti penelitian dosen, menjadi panitia pelaksana acara Association of International Class Student (AICS), menjadi pengurus dan anggota aktif Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pada bidang bakat-minat, yakni Seni Religius (SR) dan Unit Olahraga (Unior). Selain itu, penulis juga mengikuti program Fast Track pendidikan S2 Magister Manajemen Pendidikan Islam (MMPI) di universitas yang sama. Di tengah kesibukan tersebut, penulis menjadi terlatih untuk membagi prioritas dan waktu. Tak disangka penulis berhasil lulus dengan nilai dan prestasi yang memuaskan, sehingga menjadi lulusan terbaik jurusan (PAI) pada akhir tahun 2023.

Selama menjadi mahasiswa MMPI, penulis sadar bahwa kepemimpinan sangat diperlukan dan bermanfaat dalam segala lini kehidupan, terutama bidang pendidikan. Kepemimpinan paling mudah sekaligus paling sulit adalah memimpin diri sendiri. Oleh karena itu, prinsip hidup yang penulis percayai saat ini untuk memimpin diri sendiri adalah ***“Keberhasilan dan kesuksesan adalah milik mereka yang memahami tanpa tapi, berharap tanpa meski, dan berjalan tanpa henti.”***